

# **Pariwisata Indonesia: Bertahan di Masa Pandemi, Bersiap Bangkit Lebih Kuat**











**BANK INDONESIA**  
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

**SekberParwisata**

# **Pariwisata Indonesia: Bertahan di Masa Pandemi, Bersiap Bangkit Lebih Kuat**

**Penulis :**

*Handri Adiwilaga*

*Umran Usman*

*Ramadhani Pratama Guna*

*Putri Faradina Iskandar*

*Dwi Febby Multiretno*

*Wasistha Maharani*

*Evy Marya Deswita Siburian (Kemenko Marves)*

*Muhammad Iqbal Rosyidi (Kemenparekraf)*

**BANK INDONESIA INSTITUTE**

# **Pariwisata Indonesia: Bertahan di Masa Pandemi, Bersiap Bangkit Lebih Kuat**

## **Penulis :**

Handri Adiwilaga

Umran Usman

Ramadhani Pratama Guna

Putri Faradina Iskandar

Dwi Febby Multiretno

Wasistha Maharani

Evy Marya Deswita Siburian (Kemenko Marves)

Muhammad Iqbal Rosyidi (Kemenparekraf)

**Copyright 2022, Bank Indonesia Institute**

Cetakan I, November 2022.

ISBN: 978-623-5662-39-8

978-623-5662-40-4 (e-book)

## **Line Editor :**

Solikin M. Juhro

I.G.P. Wira Kusuma

M. Abdul Majid Ikram

## **Penerbit :**

Bank Indonesia Institute

Jl. MH. Thamrin No. 02, Jakarta, 10350 Indonesia

### **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta**

#### **Pasal 1**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Ketentuan Pidana**

##### **Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



*Pink Beach, Labuan Bajo, NTT*

# Daftar Isi

Daftar Isi	8
Daftar Grafik	10
Daftar Tabel	11
Daftar Gambar	11
Sambutan Deputi Gubernur Bank Indonesia	12
Sambutan Ketua Tim Pelaksana Sekber Pariwisata	14
Tinjauan Umum	16

## Pendahuluan

---

# 1

1.1. Pariwisata sebagai Sumber Devisa	22
1.2. Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja	26
1.3. Arah Pengembangan Pariwisata Nasional	28

## Dinamika Pariwisata di Masa Pandemi COVID-19

---

# 2

2.1. Pandemi COVID-19 Menghadang	34
2.2. Langkah-langkah untuk bertahan	38
<b>BOKS:</b> Menyelamatkan Pariwisata Bali	46

## Memperkuat Asa Momentum Pemulihan Pariwisata

3	3.1. Membuka Pariwisata Secara Aman	52
	3.2. Daya Saing Pariwisata Membaik	70
	3.3. Tren Baru Pariwisata Mengemuka	76

## Menangkap Peluang Tren Baru Pariwisata

4	4.1. Pariwisata Berkelanjutan melalui <i>Quality Tourism</i> (QT)	80
	4.2. Dari <i>Bleisure</i> ke <i>Workcation</i>	86
	4.3. Akselerasi Pengembangan DPSP Berorientasi <i>Quality Tourism</i>	90
	4.4. Desa Wisata dan Ekraf untuk Pariwisata Inklusif	94
	4.5. Peran Bank Indonesia dalam Mendukung Pariwisata	100
	BOKS: Kajian Penguatan Pariwisata Indonesia Melalui Pengembangan <i>Quality Tourism</i>	110

## Bersinergi Membangkitkan Pariwisata Nasional

5	Bersinergi Membangkitkan Pariwisata Nasional	120
	Daftar Pustaka	128
	Daftar Istilah	131
	Daftar Singkatan	135

# Daftar Grafik

Grafik 1.1. Jumlah Kunjungan Wisman di Indonesia	23
Grafik 1.2. Nilai Ekspor Komoditas/Jasa Utama Indonesia	24
Grafik 1.3. Neraca Transaksi Berjalan dan Devisa Pariwisata Negara Peers Tahun 2019	24
Grafik 1.4. Kontribusi Pariwisata terhadap PDB	27
Grafik 1.5. Penyerapan Tenaga Kerja Pariwisata di Indonesia	27
Grafik 2.1. Perkembangan Tingkat Pengangguran Bali	46
Grafik 2.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Bali	47
Grafik 2.3. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Bali	49
Grafik 3.1. Travel Demand Global	55
Grafik 3.2. Mobilitas Masyarakat terkait Aktivitas Pariwisata di Daerah	57
Grafik 3.3. Jumlah Kedatangan Wisman 2020 – 2021 dan Perolehan Devisa Wisman	58
Grafik 3.4. Jumlah MICE dan Event	62
Grafik 3.5. Upaya yang Dilakukan Pelaku Usaha Pariwisata dalam Merespons Kenaikan Permintaan	64
Grafik 3.6. Harga Bahan Bakar Penerbangan dan Minyak Dunia	66
Grafik 3.7. Reservasi Tiket Pesawat Global	68
Grafik 3.8. Peringkat TTDI Indonesia	70
Grafik 3.9. Subindeks TTDI Indonesia	72
Grafik 3.10. Preferensi Pariwisata Muslim dan Nilai GMTI Indonesia	73
Grafik 4.1. Volume Pencarian “Workcation”	86
Grafik 4.2. Total Desa Wisata di Indonesia	95
Grafik 4.3. Performa Quality Tourism Nasional	116

# Daftar Tabel

Tabel 2.1. Indikator Pariwisata Nasional 2019-2021	36
Tabel 3.1. Lini Masa Pembukaan dan Pelonggaran Akses Wisatawan Mancanegara	61
Tabel 4.1. Peringkat Destinasi Digital Nomad	88

# Daftar Gambar

Gambar 1.1. Sebaran 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, 8 Destinasi Pariwisata Pengembangan, dan 1 Destinasi Revitalisasi dalam RPJMN 2020-2024	30
Gambar 2.1. Pembatasan Mobilitas Antarneegara	34
Gambar 2.2. Mobilitas Untuk Retail & Recreations Dibandingkan Baseline	35
Gambar 2.3. Capaian Sertifikasi CHSE Usaha Pariwisata selama Tahun 2020 dan 2021	41
Gambar 3.1. Kebijakan Restriksi Mobilitas Internasional berbagai Negara	55
Gambar 3.2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Terkait Mobilitas Wisnus	56
Gambar 4.1. Lima puluh Besar Desa Wisata Nominasi ADWI 2022 Berdasarkan Wilayah	94
Gambar 4.2. Klaster UMKM Ekraf Binaan Bank Indonesia	99
Gambar 4.3. Strategi yang Ditempuh Bank Indonesia dalam Mendukung Percepatan Pemulihan dan Pengembangan Pariwisata	101
Gambar 4.4. Jumlah UMKM Pengguna QRIS di Wilayah DPSP	102
Gambar 4.5. Faktor-faktor Pembentuk Quality Tourism	112

# Sambutan Deputi Gubernur Bank Indonesia

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat-Nya Bank Indonesia dapat meluncurkan buku "Pariwisata Indonesia: Bertahan di Masa Pandemi, Bersiap Bangkit Lebih Kuat". Buku ini merupakan salah satu wujud komitmen Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah, otoritas terkait, dan dunia usaha dalam upaya mengakselerasi pemulihan dan pengembangan pariwisata, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat, berkesinambungan, dan inklusif.



Penguatan peran pariwisata dalam mendukung perekonomian telah sejak lama menjadi perhatian bersama. Hal ini tidak terlepas dari besarnya potensi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Indonesia sebagai daya tarik pariwisata. Pariwisata memiliki peluang untuk memberi manfaat bagi aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi. Potensi penerimaan devisa dari kunjungan wisatawan mancanegara yang dihasilkan juga akan dapat memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Sejak tahun 2019, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkomitmen untuk bersama-sama mendorong pengembangan dan penguatan pariwisata. Sebagai wujud sinergi ini juga dibentuk Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata atau Sekber Pariwisata.

Momentum pemulihan ekonomi yang terus berlanjut setelah menghadapi tekanan luar biasa berat dari dampak pandemi COVID-19, memberikan optimisme bagi akselerasi pemulihan dan penguatan peran pariwisata.

Perjalanan tiga tahun perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan berat dari pandemi COVID-19 memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga. Pandemi COVID-19 yang tidak hanya memberi dampak sangat berat pada aspek kemanusiaan, melainkan juga pada perekonomian terutama dengan mobilitas yang harus ditahan untuk meredam penyebaran COVID-19. Pariwisata menjadi salah satu aktivitas yang terhantam paling keras dari dampak pandemi COVID-19. Terlebih bagi daerah-daerah yang selama ini mengandalkan pariwisata dalam perekonomiannya, seperti Bali. Namun, dengan berbagai upaya pemulihan yang ditempuh didukung sinergi yang erat maka secara bertahap perekonomian dapat pulih, termasuk aktivitas pariwisata. Proses berjalannya pemulihan ekonomi ini harus terus dijaga dengan sinergi yang erat, terutama menghadapi dinamika ketidakpastian yang masih akan tinggi ke depan.

Buku pariwisata ini merupakan sebuah catatan perjalanan pariwisata nasional dalam melewati tantangan berat dari pandemi COVID-19. Berbagai upaya penyelamatan dan pemulihan pariwisata yang pada akhirnya berhasil mengawal berjalannya pemulihan pariwisata akan menjadi catatan penting bagi perumusan kebijakan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depan. Buku ini juga menguraikan pemikiran untuk memperkuat pengembangan pariwisata nasional di tengah munculnya berbagai peluang baru, termasuk peluang yang

lahir dari proses adaptasi masyarakat terhadap kondisi pandemi COVID-19. Proses adaptasi ini telah mendorong pengembangan pariwisata ke depan semakin mengarah pada aspek-aspek pariwisata berkualitas. Pengembangan pariwisata ke depan tidak lagi hanya dapat dilihat dari aspek ekonomi semata, melainkan juga harus dapat memastikan aspek pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan.

Bank Indonesia berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam upaya penguatan pariwisata ke depan. Melalui seluruh jaringan kantor perwakilan Bank Indonesia, dukungan dalam upaya penguatan peran pariwisata ini akan kami optimalkan melalui advokasi dan kajian, pengembangan UMKM pendukung, promosi investasi terkait pariwisata, dukungan peningkatan akses pembiayaan, serta digitalisasi sistem pembayaran pendukung pariwisata.

Akhir kata, kami berharap buku pariwisata ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi salah satu rujukan utama yang berkualitas dan terpercaya untuk menyusun strategi bersama dalam mengembangkan pariwisata. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi setiap langkah kita untuk berkarya dan terus memajukan pariwisata Indonesia.

**Jakarta, 18 November 2022**

**Deputi Gubernur Bank Indonesia  
Dody Budi Waluyo**

# Sambutan Ketua Tim Pelaksana Sekber Pariwisata

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya, buku "Pariwisata Indonesia: Bertahan di Masa Pandemi, Bersiap Bangkit Lebih Kuat" dapat diluncurkan. Buku ini dapat menjadi catatan sejarah atas kejadian luar biasa yang terjadi sekali dalam seratus tahun. Seluruh kebijakan yang kita ambil jika tercatat dengan baik, dapat membantu pemerintah di masa yang akan datang menghadapi guncangan yang serupa. Buku ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi

Pemerintah untuk  
m e n i n g k a t k a n  
resiliensi pariwisata  
nasional dalam

menghadapi guncangan eksternal maupun internal.

Kita telah melewati masa turbulensi akibat pandemi COVID-19 sejak 2020. Guncangan ini menyebabkan kinerja pariwisata global dan juga Indonesia mengalami penurunan yang belum pernah terjadi. Fokus untuk menyelamatkan manusia, menyebabkan perlu dilakukan pengurangan mobilitas yang mempengaruhi seluruh aktivitas ekonomi, terutama pada sektor pariwisata. Pada kondisi ini kita belajar bahwa perlu strategi alternatif untuk menyiapkan ketahanan sektor pariwisata menghadapi berbagai jenis guncangan. Pada buku ini kita dapat memahami berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia yang terus berlanjut untuk membangun ketahanan sektor pariwisata.

Kolaborasi dan sinergi menjadi kunci peningkatan ketahanan pariwisata. Buku pariwisata ini turut menjadi catatan sejarah kinerja kolaborasi dan sinergi yang baik melalui Sekretariat Bersama (Sekber) Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata dalam mendorong



*pemulihan sektor pariwisata di masa pandemi. Sekber Pariwisata yang telah terbentuk sejak tahun 2019 terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Bank Indonesia serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dihadapkan pada tugas yang kritikal untuk menyelamatkan sektor pariwisata. Sinergi yang kuat dilakukan melalui penyusunan pokok-pokok kesepakatan sebagai rencana kerja bersama untuk mendorong pemulihan pariwisata. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah berperan besar dalam pemulihan sektor pariwisata melalui instrumen sistem pembayaran, dukungan pengembangan UMKM, dan kajian serta asesmen.*

*Akhir kata saya mengucapkan selamat kepada penulis dan kepada Sekber Pariwisata atas peluncuran buku ini. Saya berharap bahwa sesuai dengan tujuannya, buku ini dapat memberi manfaat yang besar bagi pemerintah, pelaku pariwisata, edukator dan paling utama bagi masyarakat. Semoga langkah baik kita senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk terus membangun ketahanan pariwisata menghadapi segala bentuk guncangan, membantu pemulihan ekonomi, dan mendukung Indonesia maju 2045.*

**Jakarta, 18 November 2022**

**Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi**

**Ketua Tim Pelaksana Sekber Pariwisata  
Odo. R.M. Manuhutu**

# Tinjauan Umum

## **Pariwisata memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.**

Sebelum pandemi COVID-19, kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian cukup besar dan berada dalam tren yang meningkat. Kontribusi pariwisata pada 2019 tercatat mencapai 4,8% terhadap PDB. Aktivitas pariwisata juga memiliki dampak berganda cukup besar bagi berbagai lapangan usaha terkait, seperti akomodasi-makanan-minuman, perdagangan, dan transportasi. Di samping itu, pendapatan devisa dari pariwisata juga cukup besar dari wisatawan mancanegara yang terus meningkat. Pendapatan devisa dari pariwisata bahkan dapat menempati posisi kedua setelah pendapatan ekspor batubara pada 2019. Kendati demikian, pendapatan devisa ekspor dari pariwisata tersebut masih cukup rendah bila dibandingkan dengan negara kawasan seperti Thailand dan Malaysia. Dengan kekayaan alam dan ragam budaya yang dimiliki Indonesia, pariwisata memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan. Peran pariwisata terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif, serta turut memperkuat transaksi berjalan Indonesia dari potensi devisa yang dihasilkan.

---

## **Pandemi COVID-19 yang menghadang pada 2020 berdampak sangat berat bagi dunia, termasuk Indonesia**

---

### **Kendati demikian, pandemi COVID-19 yang menghadang pada 2020 berdampak sangat berat bagi dunia, termasuk Indonesia.**

Dampak pandemi COVID-19 yang luar biasa, tidak hanya pada aspek kemanusiaan, melainkan juga pada perekonomian. Langkah segera ditempuh di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan pembatasan mobilitas dan interaksi masyarakat, termasuk mobilitas antar negara. Kondisi ini berimbas pada aktivitas pariwisata yang menurun sangat dalam, tidak terkecuali Indonesia. Berbagai langkah ditempuh untuk bertahan dan mendorong pemulihan ekonomi, termasuk pembukaan aktivitas pariwisata secara bertahap. Di Indonesia, langkah untuk melonggarkan mobilitas mulai ditempuh dengan sangat terukur pasca gelombang varian Delta pada triwulan III 2021. Langkah pemulihan juga secara khusus difokuskan pada daerah basis wisata nasional, terutama Bali, sembari memperkuat persiapan pembukaan aktivitas pariwisata termasuk dengan akselerasi vaksinasi dan memperluas



sertifikasi cleanliness, healthy, safety, dan environment sustainability (CHSE). Pelonggaran mobilitas berangsur terus berlanjut di seluruh daerah dengan didukung oleh kebijakan pemerintah untuk membatalkan penerapan PPKM level pada periode perayaan natal dan tahun baru 2021. Perkembangan ini berdampak positif pada mulai membaiknya berbagai indikator kinerja pariwisata.

---

**Pelonggaran mobilitas yang terus berlanjut sejak awal 2022 memberikan optimisme bagi akselerasi pemulihan pariwisata**

---

**Melandainya kasus COVID-19 pada awal 2022 dan pelonggaran mobilitas yang terus berlanjut memberikan optimisme bagi akselerasi pemulihan pariwisata.** Pelonggaran mobilitas terus diperluas secara bertahap, baik domestik

maupun antar negara. Meski pergerakan mobilitas sempat sedikit tertahan akibat gelombang varian Omicron, travel demand global tetap berada dalam tren yang menguat. Optimisme pemulihan aktivitas pariwisata juga didukung peringkat daya saing pariwisata Indonesia yang naik signifikan menjadi 32 dari sebelumnya 44. Posisi ini menempatkan Indonesia pada peringkat kedua di antara negara - negara ASEAN, setelah Singapura. Di samping itu, Indonesia juga dinobatkan sebagai salah satu negara tujuan destinasi wisata ramah muslim terbaik dunia. Daya saing pariwisata yang terus membaik ini tidak terlepas dari berbagai upaya pemulihan pariwisata, yang disertai berlanjutnya pengembangan dan penataan destinasi wisata. Perkembangan positif ini juga ditandai dengan mengemukanya perubahan preferensi berwisata secara global sebagai dampak proses adaptasi masyarakat terhadap pandemi COVID-19.

**Momentum pemulihan pariwisata perlu terus diperkuat ditengah mengemukanya tantangan dari ketidakpastian global yang meningkat.**

Perang Rusia-Ukraina, gangguan rantai pasok global, kenaikan inflasi global terutama energi dan pangan, hingga risiko stagflasi dan bahkan ancaman resesi di sejumlah negara menjadi tantangan berat yang masih harus dihadapi dalam proses pemulihan pariwisata. Menghadapi tantangan global yang masih berat itu, dukungan peran wisatawan nusantara (wisnus) untuk menopang berlanjutnya pemulihan menjadi semakin penting. Secara umum, terdapat tiga langkah strategis yang akan dapat terus menopang pemulihan aktivitas pariwisata ke depan. Pertama, kebijakan pelonggaran akses wisman dan mobilitas wisnus akan terus dioptimalkan dengan tetap mengedepankan keamanan di tengah belum berakhirnya pandemi. Kedua, penerapan disiplin protokol kesehatan dan sertifikasi cleanliness, healthy, safety, dan environment sustainability (CHSE) terus diperkuat untuk meningkatkan confidence wisatawan. Ketiga, stimulus dan insentif terus dioptimalkan untuk mendorong akselerasi pemulihan kinerja pelaku usaha pariwisata.

---

**Berbagai peluang perlu dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan dan penguatan pariwisata**

---

Ke depan, peluang yang mengemuka perlu dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan dan penguatan pariwisata. Dalam jangka pendek, penyelenggaraan meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE) yang terus meningkat perlu terus didorong untuk meningkatkan aktivitas pariwisata. Beberapa event besar pada 2022, termasuk sport event skala internasional, agenda Presidensi G20 termasuk berbagai rangkaian side events, serta agenda Kharisma Event Nusantara (KEN) di berbagai daerah memberi dampak positif pada aktivitas pariwisata. Dukungan dari kampanye Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) yang lebih masif pada 2023 melalui berbagai rangkaian kegiatannya, termasuk event internasional F1 H20 di Danau Toba, MotoGP dan WSBK, diarahkan untuk mendorong pergerakan wisnus sekaligus menarik wisman. Berkembangnya tren 'workcation' di masa pandemi atau digital nomad juga menjadi peluang yang dapat menarik wisman untuk tinggal lebih panjang dengan pengeluaran yang lebih besar. Peluang ini juga telah mulai dimanfaatkan banyak negara dengan mengeluarkan skema visa khusus dan/atau insentif. Tentu saja berbagai risiko yang menyertai peluang ini juga perlu dimitigasi, misalnya potensi penyalahgunaan visa yang dapat mengurangi kesempatan pekerja lokal. Dalam jangka menengah, peluang juga mengemuka dari percepatan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) yang akan mengarah pada quality tourism (QT).



Potensi lain bersumber dari terus berkembangnya desa wisata di berbagai daerah dan ekonomi kreatif, sejalan dengan mengemukanya tren pariwisata ke depan.

---

**Potensi pergerakan mobilitas domestik perlu terus didorong melalui inovasi di tengah optimalisasi pembukaan akses wisman yang lebih luas**

---

**Dengan melihat peluang dan tantangan yang masih dihadapi, sinergi kebijakan perlu terus diperkuat, termasuk melalui Sekber Pariwisata.** Secara keseluruhan, berbagai upaya dan sinergi kebijakan yang telah dan akan terus ditempuh untuk mengakselerasi pemulihan pariwisata, sehingga dapat

mendukung akselerasi pencapaian kinerja pariwisata yang lebih baik. Perkembangan ketidakpastian global yang meningkat perlu direspons dengan baik agar tidak merambat pada terganggunya proses pemulihan pariwisata yang tengah berlangsung. Potensi pergerakan mobilitas domestik perlu terus didorong melalui berbagai inovasi dan pada saat bersamaan terus mengoptimalkan pembukaan akses wisman yang lebih luas.

**Jakarta, 18 November 2022**

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia  
 Sekretaris Tim Pelaksana Sekber Pariwisata  
**Solikin M. Juhro**





# Bab 1

## Pendahuluan

### 1.1

Pariwisata sebagai Sumber Devisa

### 1.2

Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

### 1.3

Arah Pengembangan Pariwisata Nasional

*Dengan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang terus meningkat sebelum pandemi COVID-19, aktivitas pariwisata menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan devisa nasional. Di samping itu, aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif turut memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut menjadikan peran pariwisata semakin strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.*

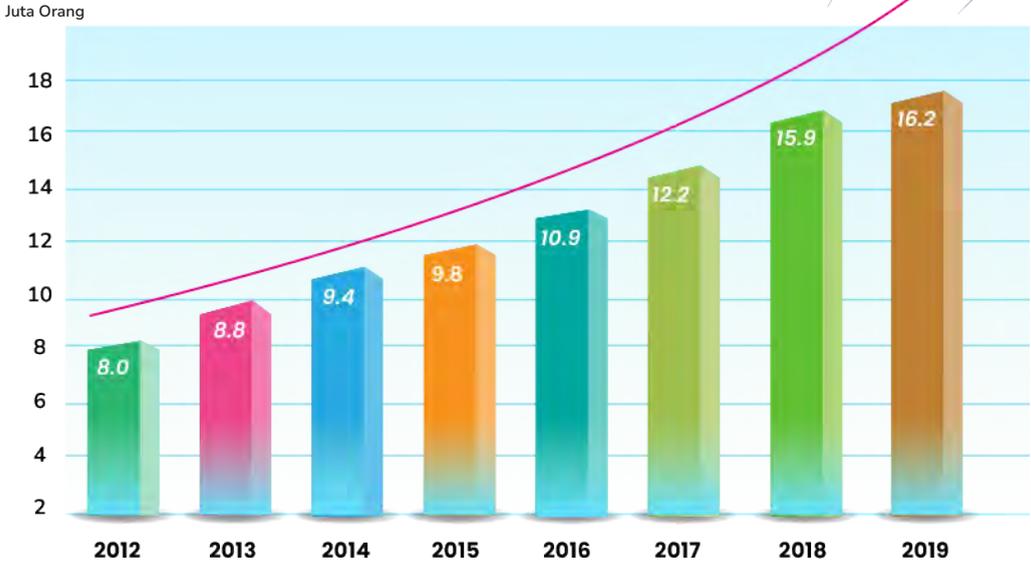
# 1.1 Pariwisata sebagai Sumber Devisa

**Pariwisata memegang peran yang besar dalam perekonomian Indonesia.** Potensi sumber daya alam dan budaya yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi tujuan utama wisata dunia. Terdiri atas 17.508 pulau yang menjadi rumah bagi lebih dari 25.000 spesies tumbuhan dan 400.000 jenis hewan dan ikan, Indonesia dipandang sebagai salah satu destinasi paling indah di dunia. Sementara itu, kekayaan budaya yang berasal dari lebih dari 1.300 suku bangsa dari Sabang sampai Merauke

menambah daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata global. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia tercatat meningkat sebanyak dua kali lipat dalam rentang tujuh tahun, yakni dari sebanyak 8 juta orang pada tahun 2012 menjadi sebanyak 16,1 juta orang pada tahun 2019 - utamanya berasal dari Tiongkok, Singapura, Australia, Malaysia, dan Jepang (Grafik 1.1.).



*Pura Ulun Danu Beratan, Bedugul, Bali*



Sumber : BPS, diolah

Grafik 1.1. Jumlah Kunjungan Wisman di Indonesia

Sebelum pandemi COVID-19, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) terus meningkat dan menjadikan pariwisata sebagai salah satu penyumbang penerimaan devisa ekspor terbesar nasional. Aktivitas terkait pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan penyumbang terbesar kedua devisa setelah batubara. Nilai penerimaan devisa terkait aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2019 tercatat 18,7 miliar dolar AS, atau sekitar 8,5% dari total penerimaan devisa ekspor barang dan jasa yang mencapai 220,1 miliar dolar AS (Grafik 1.2.). Capaian tersebut utamanya disumbang oleh pengeluaran wisman terkait perjalanan, dengan pangsa hingga lebih dari 90%

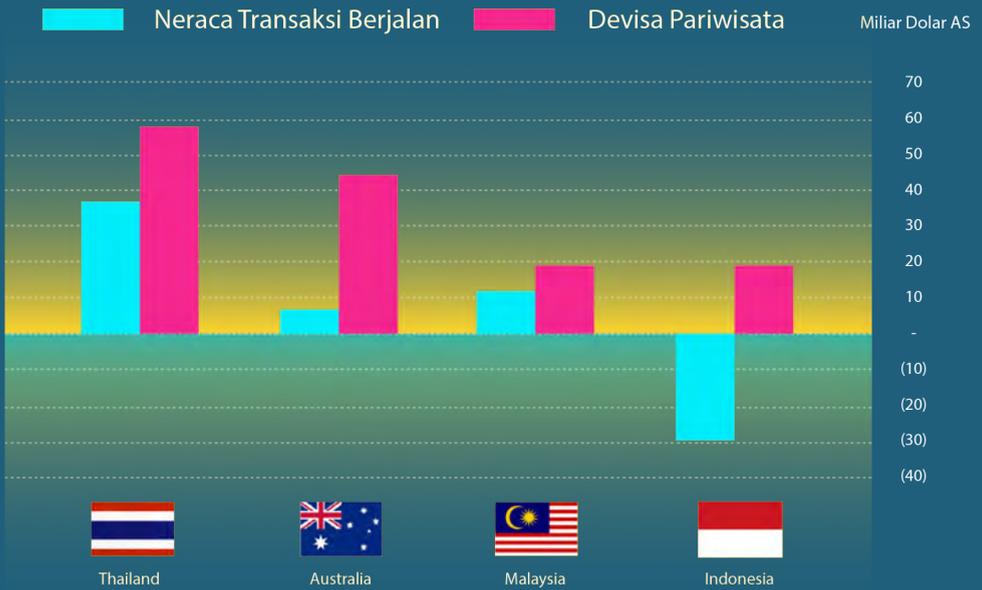
dari total pengeluaran selama di Indonesia. Dalam setiap kunjungan, wisman di Indonesia secara rata-rata mengeluarkan biaya sekitar 1.257 dolar AS atau sekitar Rp17,5 juta, di luar biaya transportasi dari dan ke negara asal<sup>1</sup>. Pengeluaran terbesar terutama berasal dari wisman asal Saudi Arabia (2.793 dolar AS), Austria (2.568 dolar AS), dan UEA (2.333 dolar AS). Besarnya potensi penerimaan devisa pariwisata nasional tersebut berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

<sup>1</sup> Rata-rata pengeluaran dari Januari – Desember 2019 untuk seluruh wisman yang tercatat masuk ke Indonesia (non-MPD / Mobile Positioning Data). Asumsi 1 USD = Rp13.901,00.



Sumber: Bank Indonesia

Grifik 1.2. Nilai Ekspor Komoditas/Jasa Utama Indonesia



Sumber: World Bank, UNWTO, 2019 diolah

Grifik 1.3. Neraca Transaksi Berjalan dan Devisa Pariwisata Negara Peers

Kendati demikian, penerimaan Indonesia dari sektor terkait pariwisata relatif masih terbatas bila dibandingkan negara-negara di kawasan. Thailand pada 2019 mencatat penerimaan devisa dari pariwisata sebesar 59,8 miliar dolar AS sehingga berkontribusi pada surplus transaksi berjalan sebesar 38 miliar dolar AS. Sementara Australia dan Malaysia pada tahun yang sama dapat mencatat devisa dari pariwisata sebesar 45,7 miliar dolar AS dan 19,8 miliar

dolar AS (Grafik 1.3). Berkaca pada hal ini, kebijakan prioritas pariwisata perlu diperkuat untuk semakin meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap penerimaan devisa sehingga dapat memperkuat transaksi berjalan. Optimisme penguatan penerimaan devisa ini akan terus diperkuat dan dioptimalkan dalam proses pemulihan ekonomi yang tengah berjalan dari dampak berat pandemi COVID-19.



# 1.2

## Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

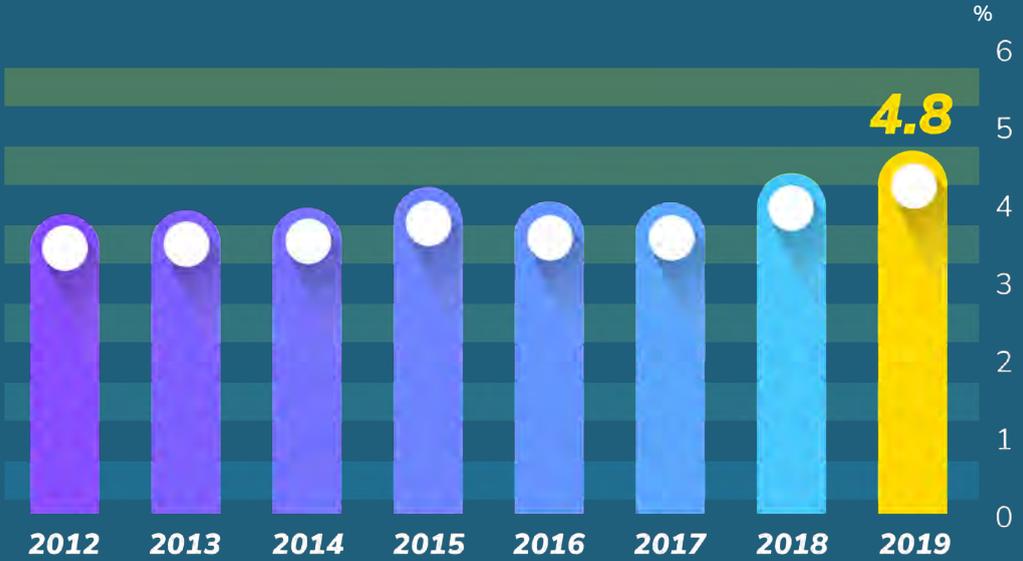
Aktivitas pariwisata juga memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelum pandemi COVID-19, kontribusi pariwisata terhadap perekonomian nasional berada dalam tren yang terus meningkat. Kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus berada dalam tren yang meningkat, dan pada tahun 2019 tercatat perannya mencapai 4,8% PDB (Grafik 1.4.). Selain itu, aktivitas pariwisata juga memiliki efek berganda yang cukup besar terhadap lapangan usaha (LU) terkait, terutama LU akomodasi-makanan dan minuman, pertanian, serta transportasi dan pergudangan. Lebih lanjut, aktivitas pariwisata juga tidak terlepas dari bidang usaha ekonomi kreatif pendukung seperti kuliner, fesyen, kriya, animasi dan video, seni pertunjukan, dan desain komunikasi visual. Lebih dari 8,2 juta usaha di Indonesia bergerak di bidang ekonomi kreatif dan mampu menyumbang 7,3% terhadap total PDB Indonesia pada 2019.

---

*Pariwisata memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja serta mendukung inklusivitas perekonomian*

---

**Peran pariwisata yang besar dalam perekonomian memiliki dampak yang positif bagi penyerapan tenaga kerja nasional.** Data Kemenparekraf menunjukkan penyerapan tenaga kerja di sektor terkait pariwisata selama 2010-2019 dalam tren yang terus meningkat hingga 10,3% atau mencapai 13 juta tenaga kerja (Grafik 1.5.). Secara keseluruhan, pariwisata memiliki peranan penting dalam perekonomian dengan mendorong pertumbuhan sektor jasa, menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, serta mendukung inklusivitas perekonomian.



Sumber : BPS, diolah

Grafik 1.4. Kontribusi Pariwisata terhadap PDB



Sumber : Kemenparekraf, diolah

Grafik 1.5. Penyerapan Tenaga Kerja Pariwisata di Indonesia

# 1.3 Arah Pengembangan Pariwisata Nasional

Pariwisata memiliki peran strategis yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pariwisata ditetapkan sebagai salah satu unggulan yang menjadi prioritas pengembangan. Kepariwisataan nasional dalam pengembangannya diarahkan pada tiga aspek yakni peningkatan produktivitas, inklusif, dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas ditempuh melalui strategi penguatan rantai pasok usaha kepariwisataan, percepatan pembangunan infrastruktur pengembangan destinasi prioritas pariwisata, perluasan pemasaran pariwisata, serta *reskilling*, *upskilling*, dan *newskillling* tenaga kerja. Peningkatan inklusivitas dilakukan untuk memastikan pariwisata dapat melibatkan dan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat di sekitar

destinasi. Pengembangan pariwisata nasional juga harus mengedepankan prinsip keberlanjutan yang memastikan dampak positif jangka panjang dari kepariwisataan dengan keberimbangan pada aspek lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi. Tidak hanya untuk saat ini, melainkan juga untuk masa depan.

---

*Pengembangan pariwisata nasional diarahkan pada tiga aspek yakni peningkatan produktivitas, inklusif, dan berkelanjutan*

---



Lompat Batu, Nias, Sumatera Utara



Pulau Wayag, Raja Ampat, Papua Barat

**Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menetapkan tiga jenis / produk pariwisata yang akan ditingkatkan.** *Pertama*, wisata alam yang terdiri dari produk wisata ekowisata, wisata bahari, dan wisata petualangan. Wisata alam merupakan jenis wisata yang paling banyak dijumpai di seluruh destinasi wisata di Indonesia. *Kedua*, wisata budaya yang terdiri dari *heritage tourism*, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota, dan wisata desa. Wisata budaya cukup mudah dijumpai di sejumlah destinasi wisata di Indonesia, terutama di wilayah Pulau Jawa dan Bali. *Ketiga*, wisata buatan yang terdiri dari MICE, yacht dan cruise,

wisata kebugaran, wisata kesehatan, dan wisata olahraga. Wisata jenis ini lebih banyak dijumpai di destinasi wisata yang memiliki reputasi tinggi dan dukungan infrastruktur yang memadai. Pengembangan ketiga jenis pariwisata tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan bagi wisatawan untuk berpartisipasi dalam aktivitas pengembangan pengetahuan, pendidikan, dan kesukarelawanan (*volunteerism*) dalam kegiatan wisata.

Pengembangan destinasi pariwisata secara konsisten terus dilakukan oleh pemerintah, melalui penetapan destinasi pariwisata prioritas sebagai proyek strategis. Terdapat sepuluh destinasi yang ditetapkan sebagai destinasi pariwisata prioritas (DPP), dengan lima di antaranya ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Di samping itu, pemerintah juga menetapkan delapan destinasi pariwisata

pengembangan yang diarahkan pada peningkatan kunjungan wisatawan dan satu destinasi revitalisasi untuk meningkatkan daya dukungnya (Gambar 1.1.). Pengembangan destinasi-destinasi pariwisata tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing pariwisata nasional, sekaligus meningkatkan pendapatan devisa pariwisata.



Sumber : RPJMN 2020-2024, diolah

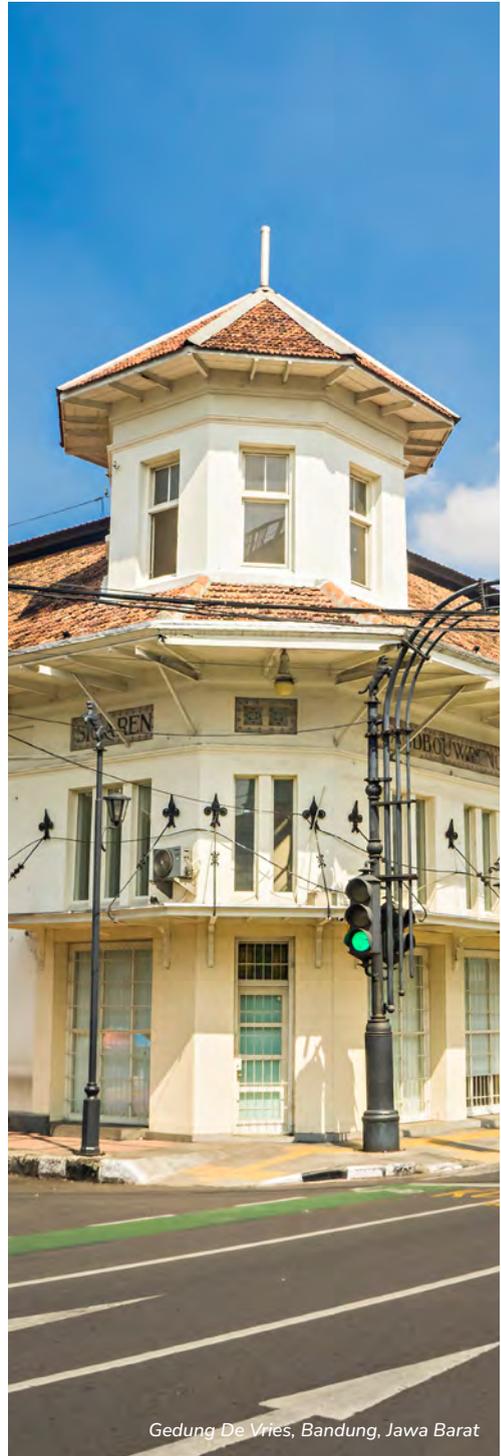
Gambar 1.1. Sebaran 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, 8 Destinasi Pariwisata Pengembangan, dan 1 Destinasi Revitalisasi dalam RPJMN 2020-2024

---

*Bank Indonesia dan pemerintah telah menyepakati pembentukan Sekber Pariwisata pada 18 Maret 2019 untuk memperkuat sinergi dalam mendorong peningkatan devisa pariwisata*

---

Penguatan peran dan daya saing pariwisata juga menjadi perhatian khusus Bank Indonesia, terutama dengan besarnya potensi devisa yang dihasilkan untuk memperkuat ketahanan nasional. Hal ini merupakan bagian utama dari dukungan Bank Indonesia dalam mendorong keberlanjutan agenda reformasi struktural. Untuk itu, Bank Indonesia dan pemerintah menyepakati pembentukan Sekber Pariwisata pada 18 Maret 2019 untuk memperkuat sinergi dalam mendorong peningkatan devisa pariwisata. Terdapat enam strategi yang akan dilakukan melalui Sekber Pariwisata, meliputi percepatan pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas ke destinasi wisata, pengembangan atraksi dengan mengedepankan prinsip *quality tourism*, peningkatan ketersediaan dan kualitas amenities, peningkatan promosi pariwisata untuk menarik wisman dengan *spending* dan *length of stay* yang lebih panjang, dukungan peningkatan investasi dan pembiayaan untuk pengembangan destinasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku pariwisata, serta penyusunan standar manajemen krisis kepariwisataan.



Gedung De Vries, Bandung, Jawa Barat





# **Bab 2** **Dinamika** **Pariwisata di Masa** **Pandemi COVID-19**

**2.1**  
Pandemi COVID-19 Menghadang

**2.2**  
Langkah-langkah Untuk Bertahan

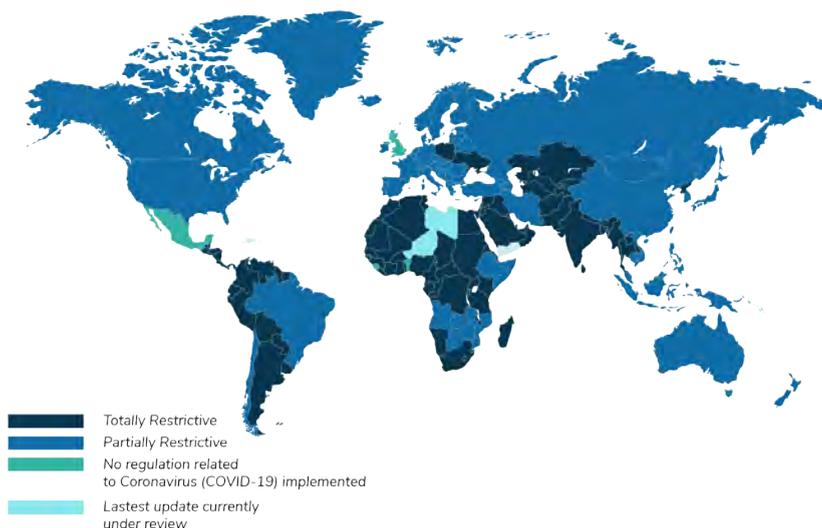
**BOKS:**  
Menyelamatkan Pariwisata Bali

*Pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang luar biasa berat bagi kinerja pariwisata. Berbagai indikator pariwisata mengalami penurunan tajam dalam kurun waktu 2020-2021, dengan Bali sebagai daerah yang merasakan dampak terberat pandemi COVID-19. Sejumlah kebijakan digulirkan pemerintah pusat dan daerah untuk memulihkan kinerja pariwisata, melalui PEN dan realokasi anggaran Pemda sebagai upaya tanggap darurat dan penyelamatan. Berbagai upaya pemulihan yang telah ditempuh dan seiring mulai membaiknya kondisi pandemi COVID-19, aktivitas pariwisata berangsur kembali meningkat. Ke depan, momentum pemulihan pariwisata perlu terus diperkuat dengan mengoptimalkan berbagai peluang yang mengemuka.*

# 2.1 Pandemi COVID-19 Menghadang

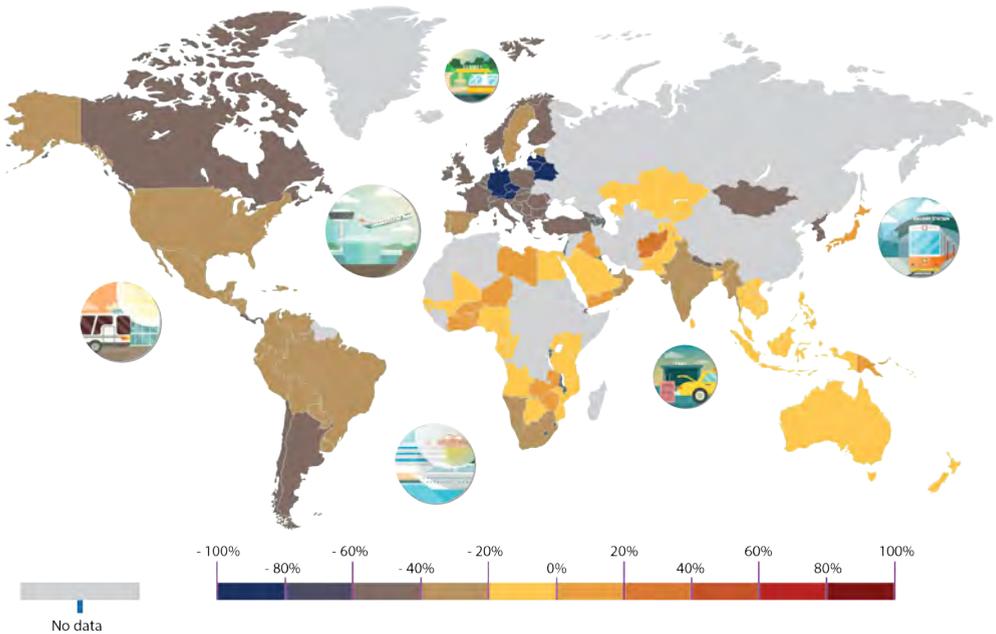
Memasuki tahun 2020, dunia harus menghadapi tantangan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang luar biasa, tidak hanya pada aspek kemanusiaan, melainkan juga pada perekonomian. Pariwisata merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang menurun sangat dalam dan berimbas terutama bagi daerah yang mengandalkan pariwisata dalam ekonominya. Langkah segera harus ditempuh oleh pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mencegah penyebaran COVID-19

dengan pembatasan mobilitas dan interaksi masyarakat. Pembatasan mobilitas dilakukan tidak hanya untuk aktivitas domestik melainkan juga mobilitas antarnegara. Hampir seluruh negara melarang penduduknya untuk melakukan perjalanan internasional dengan tujuan non-esensial. Selain itu, kebijakan karantina diberlakukan dengan durasi hingga 14 hari sebagai salah satu instrumen pembatasan mobilitas masuk ke suatu negara (Gambar 2.1.).



Sumber : IATA, Mei 2020

Gambar 2.1. Pembatasan Mobilitas Antarnegara



Sumber : Google Mobility, Oktober 2020

Gambar 2.2. Mobilitas Untuk Retail & Recreations Dibandingkan Baseline

**Pembatasan mobilitas memberikan dampak signifikan pada aktivitas pariwisata secara global** (Gambar 2.2.). Jumlah perjalanan internasional mengalami penurunan tajam dari 1,5 miliar sebelum terjadinya pandemi menjadi hanya sekitar 381 juta pada tahun 2020. Fenomena ini terjadi di seluruh negara, yang menyebabkan jatuhnya aktivitas pariwisata. Kinerja penerbangan dan jasa perhotelan merupakan salah satu sektor pendukung pariwisata yang mengalami guncangan paling besar. Pada 2020, kinerja penerbangan turun hingga 60% (yoy), sehingga berdampak pada kerugian maskapai global hingga mencapai 370 miliar dolar AS<sup>2</sup>.

Sementara itu, kinerja perhotelan turun hingga 65% dan hanya sedikit terbantu oleh penggunaan akomodasi untuk pasien COVID-19 yang tidak dapat ditampung di rumah sakit di berbagai negara<sup>3</sup>. Kondisi ini tidak terhindarkan berdampak pada ketenagakerjaan. UNWTO mencatat pada 2020 terdapat 174,4 juta tenaga kerja pariwisata yang kehilangan pekerjaan. Secara keseluruhan, penurunan PDB pariwisata global diperkirakan mencapai 4,7 miliar dolar AS.

<sup>2</sup> Sumber : IATA 2020

<sup>3</sup> Sumber : UNTWO

**Pembatasan mobilitas berimbas pada penurunan yang sangat dalam pada kinerja pariwisata Indonesia.** Selain dipengaruhi oleh pembatasan pada tingkat global, penurunan kinerja pariwisata juga dipengaruhi oleh pembatasan mobilitas yang harus ditempuh untuk menekan penyebaran COVID-19. Pada tahun 2020, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pertama kalinya diberlakukan pada April 2020<sup>4</sup>. PSBB ini kemudian berlanjut hingga Agustus 2020, mempertimbangkan penyebaran COVID-19 di sebagian besar provinsi di Indonesia. Kebijakan pembatasan PSBB kemudian dilanjutkan pada skala terbatas, melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan nusantara (wisnus) turun signifikan pada tahun 2020. Data BPS mencatat jumlah kunjungan wisman pada 2020 hanya sebanyak 4,07 juta, atau turun 79,46% dibandingkan tahun 2019. Sementara pergerakan wisnus tercatat sebanyak 518 juta perjalanan, atau turun dari 722 juta perjalanan pada tahun 2019. Berbagai indikator pariwisata nasional mengalami penurunan tajam pada 2020 (Tabel 2.1.).

<sup>4</sup> Sumber : Permenkes No.9 Tahun 2020

<b>Indikator Pariwisata</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Wisman (Juta Orang)	16,15	4,07	1,56
Wisnus (Juta Orang)	722	518	603
Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang (%)	54,99	33,79	36,26
Jumlah Kedatangan Penumpang Domestik di 5 Bandara Destinasi Utama (Juta Penumpang)	39,43	17,93	18,16
Devisa Pariwisata (Miliar Dolar AS)	16,91	3,38	0,52
Rata-rata Pengeluaran Wisnus Per Perjalanan (Rp Juta)	2,22	1,55	2,40
Rata-rata Pengeluaran Wisman Per kunjungan (Dolar AS)	1.145	2.165	3.097

Sumber : BPS, Bank Indonesia, PT. AP1 dan PT. AP2, diolah

Tabel 2.1. Indikator Pariwisata Nasional 2019-2021

**Bali menjadi daerah yang harus menghadapi dampak terberat dari pandemi COVID-19 dan pembatasan yang diberlakukan.** Kondisi ini tidak terlepas dari struktur perekonomian Bali yang sangat bergantung pada aktivitas pariwisata, termasuk kunjungan wisman. Pada 2020 kunjungan wisman ke Bali tercatat turun 83,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, tingkat penghunian kamar juga turun hingga dibawah 20%, terendah sejak peristiwa bom Bali tahun 2002. Tingkat pengangguran terbuka juga naik signifikan dari 1,57% pada tahun 2019, menjadi 5,63% pada 2020. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi sangat dalam hingga 9,33% (yoy) pada 2020.

---

*Pelonggaran mobilitas secara bertahap berangsur menahan penurunan kinerja pariwisata*

---

**Pelonggaran mobilitas yang secara bertahap mulai diberlakukan pada 2021 berangsur menahan penurunan kinerja aktivitas pariwisata lebih lanjut.** Secara global, pelonggaran mulai terlihat pada paruh kedua 2021, terutama di Amerika Serikat (AS) dan Eropa setelah meredanya gelombang varian Delta dan peningkatan vaksinasi. Pelonggaran di AS dan Eropa dilakukan masih secara terbatas, baik untuk mobilitas domestik maupun

pembukaan akses internasional. Meski demikian, keyakinan untuk melakukan aktivitas wisata masih belum cukup pulih di kedua wilayah tersebut, dengan masih tingginya ketidakpastian dari COVID-19. Jumlah perjalanan internasional tahun 2021 secara global baru mencapai 415 juta atau masih 72% dibawah level 2019. Di Indonesia, langkah untuk mulai melonggarkan pembatasan mobilitas juga mulai ditempuh secara bertahap pasca gelombang varian Delta, dengan tetap menekankan pada penegakan protokol kesehatan, *tracing* dan *tracking* melalui aplikasi PeduliLindungi. Pelonggaran mobilitas terus berlanjut dan berangsur meluas di seluruh daerah, dengan didukung oleh kebijakan pemerintah untuk membatalkan penerapan PPKM level pada periode perayaan Natal dan tahun baru 2021. Perkembangan ini berangsur berdampak positif pada mulai membaiknya indikator pariwisata (Tabel 2.1.).



# 2.2 Langkah-Langkah untuk Bertahan

Langkah segera ditempuh pemerintah untuk menangani penyebaran COVID-19, sekaligus menahan dampak penurunan kinerja perekonomian. Pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal dalam jumlah besar, termasuk di dalamnya anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Program PEN mencakup bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif kepada UMKM, usaha, dan korporasi. Pemerintah mengalokasikan anggaran PEN sebesar Rp695,2 triliun pada 2020 dan Rp744,7 triliun pada 2021. Bank Indonesia juga menempuh kebijakan akomodatif untuk mendorong pemulihan ekonomi, serta melalui mekanisme "burden sharing" turut berpartisipasi dalam pembiayaan APBN di masa pandemi, melalui pembelian surat berharga negara (SBN) secara langsung. Sementara itu, OJK memberikan relaksasi bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit

melalui penundaan angsuran pokok dan bunga, sehingga tidak berdampak pada kenaikan kredit bermasalah dan penurunan permodalan. Demikian pula, LPS memastikan terjaminnya simpanan masyarakat pada perbankan, sehingga mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan<sup>5</sup>.

---

*Sejumlah langkah ditempuh pemerintah untuk menangani penyebaran COVID-19 dan menahan dampak penurunan kinerja perekonomian*

---

<sup>5</sup> Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang



Pura Tanah Lot, Tabanan, Bali



Sejumlah langkah strategis secara khusus ditempuh untuk menahan penurunan kinerja pariwisata lebih dalam. Untuk menyelamatkan pariwisata yang menjadi sektor usaha paling terdampak dari pandemi COVID-19, pemerintah mengalokasikan dana hibah pariwisata sebesar Rp3,3 triliun pada 2020 kepada pelaku usaha pariwisata. Alokasi dana hibah tersebut meningkat menjadi Rp3,7 triliun pada 2021. Selain itu, pemerintah juga memberikan Bantuan

bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, serta penguatan koordinasi penyelamatan di daerah basis wisata. Upaya tanggap darurat ini juga dilakukan dengan membebaskan pembayaran iuran BPJS, keringanan pembayaran listrik dan air bersih, termasuk dengan relaksasi dan restrukturisasi pinjaman bank, serta mendorong kreativitas dan produktivitas sebagai bagian dari proses adaptasi dengan pola *work from home*.



Insentif Pemerintah (BIP) kepada pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk pelaku usaha yang bergerak di kriya, busana, dan kuliner. Dukungan alokasi anggaran yang besar, merupakan cerminan perhatian terhadap aktivitas pariwisata yang menghadapi hantaman berat dari dampak pandemi COVID-19.

---

*Upaya tanggap darurat ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan kinerja pariwisata*

---

Pemerintah menempuh upaya tanggap darurat untuk menyelamatkan kinerja usaha pariwisata. Upaya tanggap darurat difokuskan pada kesehatan, termasuk akselerasi vaksinasi dengan bersinergi bersama seluruh pihak dalam membuka sentra vaksinasi dan penyelenggaraan vaksinasi di daerah basis wisata, dan perlindungan sosial

Upaya pemulihan ditempuh secara bertahap dengan mempersiapkan dan pembukaan aktivitas pariwisata. Pada fase ini, pemerintah menempuh dua strategi utama. Strategi pertama difokuskan pada penguatan *confidence* wisatawan melalui penerapan protokol kesehatan dan implementasi sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability* (CHSE). Pemerintah menyusun panduan pelaksanaan protokol CHSE pada bidang usaha pengelolaan daya tarik wisata, penyediaan *homestay*, perhotelan, MICE dan *event*, restoran, wisata arung jeram, wisata golf, wisata selam, dan usaha spa. Pedoman yang disusun bersama dengan pelaku/asosiasi usaha pariwisata tersebut,

menjadi acuan bagi pelaku usaha dan juga konsumen untuk meningkatkan rasa aman dalam menjalankan usaha pariwisata sekaligus bagi wisatawan. Penerapan CHSE terus diperluas melalui lembaga sertifikasi usaha pariwisata (LSUP) dengan pemberian label *I Do Care* bagi usaha yang lulus sertifikasi. Hingga akhir 2021, jumlah usaha pariwisata yang tersertifikasi secara kumulatif mencapai 12.166 usaha, tersebar di seluruh provinsi dan 403 kabupaten/kota, termasuk di Bali dan daerah wilayah lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) – (Gambar 2.3.).



Sumber : Kememparekraf, diolah

Gambar 2.3. Capaian Sertifikasi CHSE Usaha Pariwisata selama Tahun 2020 dan 2021



Pulau Lengkuas, Belitung, Bangka Belitung

---

*Strategi pemulihan ditempuh dengan mendorong pergerakan wisatawan domestik untuk menopang pemulihan pariwisata*

---

**Strategi kedua pada tahap pemulihan ditempuh dengan mendorong wisatawan domestik untuk menopang pemulihan pariwisata.** Strategi ini tetap menyesuaikan dengan perkembangan pandemi COVID-19. Terdapat tiga program utama yang dilakukan dalam strategi ini. Pertama, melalui program *Work From Bali* (WFB) untuk membantu kinerja pariwisata Pulau Dewata yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 (Lihat Boks: Menyelamatkan Pariwisata Bali). Program ini bertujuan untuk mengajak masyarakat, termasuk kementerian/lembaga dan BUMN, melakukan aktivitas bekerja dari Bali untuk menghidupkan kembali aktivitas pariwisata di wilayah ini. Kedua, kampanye *Bangga Berwisata #diIndonesiaAja* (BBWI) untuk mendorong masyarakat berwisata di dalam negeri, guna mendorong angka perjalanan domestik dan pengeluaran wisatawan nusantara. Hal ini juga mengingat wisatawan nusantara memiliki potensi besar untuk mendorong pemulihan kinerja pariwisata lebih cepat. Kampanye ini disinergikan dengan Gerakan Nasional *Bangga Buatan Indonesia* (BBI) yang pertama kali diluncurkan Presiden Republik Indonesia pada 14 Mei 2020, dan merupakan bagian dari upaya pemerintah mempersiapkan dan mempercepat pengembangan DPSP.

Ketiga, mengoptimalkan event dan MICE yang memiliki peran besar untuk menopang kinerja usaha hotel dan sektor usaha terkait lainnya, dengan menyesuaikan pola adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi.

---

**Pemerintah terus bersinergi  
menguatkan kesiapan destinasi  
dan sumber daya pendukung  
pariwisata**

---

Pemerintah juga terus bersinergi menguatkan kesiapan destinasi dan sumber daya pendukung pariwisata. Pengembangan dan penataan destinasi terus dilakukan untuk mempersiapkan kebangkitan pariwisata nasional. Pemerintah secara konsisten menjalankan amanat RPJMN 2020-2024 untuk mengembangkan destinasi pariwisata prioritas, termasuk di dalamnya yang merupakan DPSP. Pengembangan dan penataan destinasi dilakukan secara terintegrasi dengan mengedepankan prinsip kesinambungan dan inklusivitas<sup>6</sup>. Pengembangan destinasi juga diperkuat dengan dukungan aspek digitalisasi, termasuk meningkatkan adopsi teknologi dalam transaksi pembayaran non tunai, terutama melalui perluasan QRIS. Dalam penguatan sumber daya pendukung, fokus program dilakukan untuk *reskilling*, *upskilling*, dan *new-skilling* sumber daya

manusia (SDM) pelaku pariwisata. Penguatan kemampuan SDM tersebut menyasar pada peningkatan literasi dan keterampilan digital dibidang kepariwisataan, sejalan dengan pesatnya perkembangan digitalisasi di masa pandemi.



Penari Dayak, Kalimantan




---

**6** Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) dengan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) sebagai pedoman dalam pembangunan kepariwisataan di lima DPSP.

## Sinergi kebijakan dalam forum Sekber Pariwisata terus diperkuat untuk mendorong pemulihan pariwisata.

Forum pertemuan tingkat pimpinan kementerian/lembaga pada 24 Maret 2021 menyepakati delapan program prioritas yang perlu ditempuh untuk mendorong pemulihan pariwisata<sup>7</sup>. Pertama, melanjutkan pengembangan DPSP dengan monitoring progres dilakukan secara intensif. Kedua, memperluas penerapan sertifikasi CHSE, terutama di Bali dan Kepulauan Riau. Ketiga, dukungan untuk peningkatan penyelenggaraan MICE di Bali dan Jakarta dengan menyesuaikan kesiapan destinasi dan mengedepankan protokol kesehatan. Keempat, perluasan digitalisasi transaksi pembayaran di destinasi pariwisata dengan penerapan QRIS. Kelima, dukungan dan kolaborasi dalam pelaksanaan agenda kegiatan BBI yang disinergikan dengan BBWI. Keenam, pengembangan UMKM pendukung pariwisata dan ekonomi kreatif dalam ekosistem desa wisata. Ketujuh, dukungan dalam pengembangan aplikasi Jaringan Pariwisata Hub (JP Hub). Kedelapan, penguatan kajian dan asesmen untuk mendukung perumusan kebijakan pemulihan dan pengembangan pariwisata nasional oleh Sekber Pariwisata.

---

*Pada tahap normalisasi, pemerintah berupaya mendorong peningkatan minat pasar dan insentif pariwisata*

---

**Memasuki tahap normalisasi, pemerintah berupaya mendorong peningkatan minat pasar dan insentif pariwisata.** Tahapan ini sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi COVID-19 yang disertai pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat. Pembukaan akses wisman sejak awal 2022 secara gradual, mendorong kinerja pariwisata nasional kembali naik. Kampanye BBWI juga terus dilakukan melalui peningkatan promosi pariwisata untuk semakin mendorong minat wisatawan nusantara. Rangkaian penyelenggaraan event strategis yang diinisiasi oleh pemerintah, termasuk gelaran *World Superbike* di Mandalika pada akhir 2021 dan MotoGP pada awal 2022, turut menjadi pengungkit bagi akselerasi pemulihan pariwisata nasional.

---

**7** Rapat Koordinasi High Level Sekber Pariwisata 2021 diselenggarakan pada 24 Maret 2021 dengan tema "Mendorong Perbaikan Pariwisata di Era Adaptasi Kebiasaan Baru"



Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, NTB



*Pantai Kuta Mandalika, Lombok, NTB*

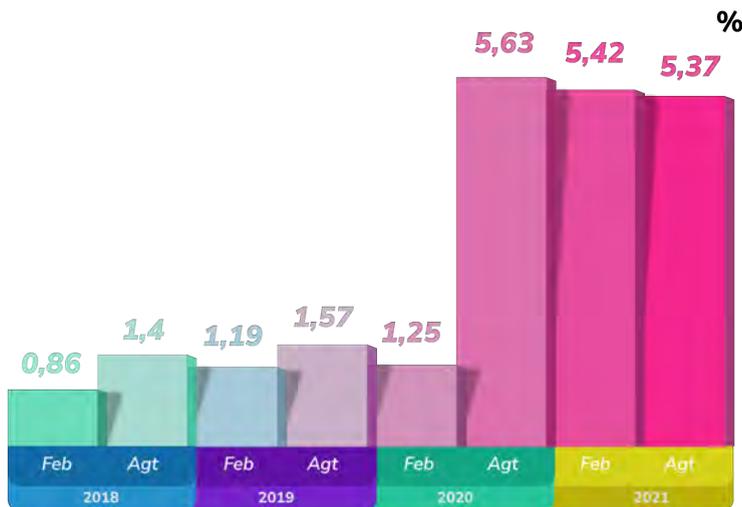
# BOKS: Menyelamatkan Pariwisata Bali

Sebagai daerah yang mengandalkan pariwisata dalam perekonomiannya, Bali menghadapi tekanan berat pada masa pandemi COVID-19. Perekonomian Bali turun hingga mencapai -12,4% (yoy) pada triwulan III 2020. Kondisi ini berimbas pada naiknya angka pengangguran terbuka di Bali hingga di atas 5% pada 2020 dan 2021, jauh di atas periode sebelum pandemi yang selalu berada di bawah 2% (Grafik 2.1.). Lebih lanjut, tingkat kemiskinan Bali meningkat hingga menjadi 4,7% pada September 2021, dibandingkan masa sebelum pandemi yang sebesar 3,6% (Grafik 2.2.). Survei yang dilakukan BPS pada akhir

2020 menunjukkan sebanyak 20,9% responden sementara dirumahkan dan 3,0% di-PHK<sup>8</sup>. Selain itu, dari hasil survei yang sama juga menunjukkan 92,2% responden yang bekerja pada lapangan usaha akomodasi-makanan-minuman mengalami penurunan pendapatan hingga lebih dari 50%.

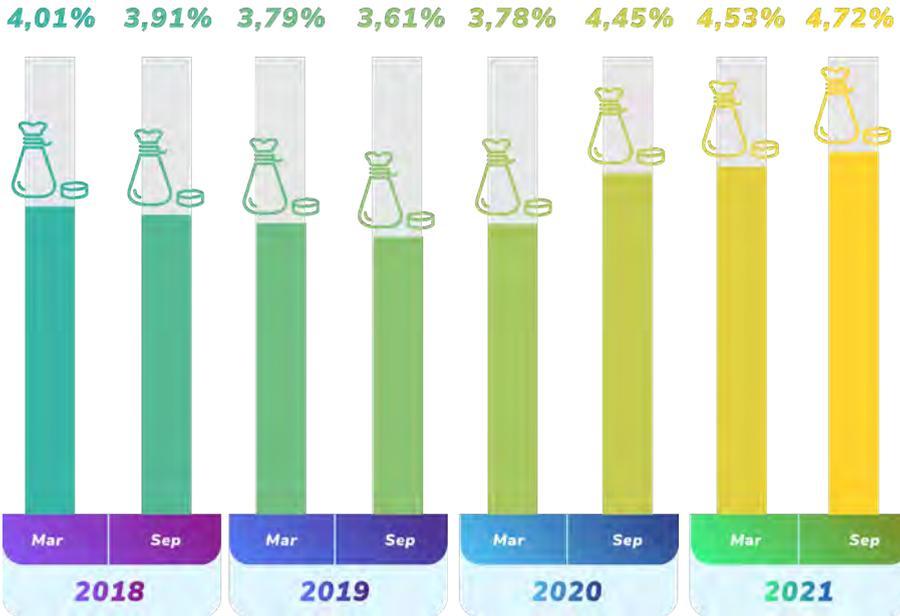
*Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap kinerja ekonomi Bali*

<sup>8</sup> Hasil survei dampak COVID-19 terhadap sosial demografi dan pelaku usaha Provinsi Bali 2020



Sumber : BPS, diolah

Grafik 2.1. Perkembangan Tingkat Pengangguran Bali



Sumber : BPS, diolah

Grifik 2.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Bali

### Berbagai langkah ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi Bali

Sejumlah langkah segera ditempuh oleh pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi Bali agar dapat bertahan dan segera pulih dari dampak pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan tanggap darurat dan upaya pemulihan ditempuh juga difokuskan untuk Bali. Percepatan vaksinasi dilakukan bekerjasama dengan berbagai pihak dengan membuka gerai-gerai vaksinasi massal hingga dilakukan secara *door-to-door*. Pada akhir 2021 tingkat vaksinasi di Bali telah mencapai lebih dari 80% untuk dosis kedua. Selain itu, dukungan stimulus untuk menopang kinerja usaha di Bali untuk tidak jatuh

lebih dalam ditempuh antara lain melalui pembebasan pembayaran iuran BPJS, keringanan pembayaran listrik dan air bersih, relaksasi dan restrukturisasi pinjaman bank, serta hibah PEN sektoral terkait pariwisata. Sementara itu, dukungan program bantuan sosial juga ditempuh untuk tetap menopang daya beli masyarakat. Pada saat yang sama, alokasi anggaran belanja daerah di Bali direalokasi untuk mendukung penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak, dan pelaksanaan jaring pengaman sosial, termasuk dalam bentuk pemberian bantuan masyarakat miskin berbasis adat, khusus untuk masyarakat yang belum memperoleh bantuan perlindungan sosial dari pemerintah pusat.

**Inisiatif program khusus ditempuh untuk menyelamatkan perekonomian Bali melalui program WFB, sekaligus mempersiapkan pembukaan aktivitas pariwisata Bali.** Inisiatif program WFB dilakukan dengan mendorong kementerian/lembaga, otoritas terkait, dan BUMN untuk bekerja dari Bali. Program mulai dilakukan secara bertahap sejak Juli 2021 dengan lokasi terpusat di Kawasan Nusa Dua. Pada saat yang bersamaan, Bali terus dipersiapkan untuk dapat mulai membuka aktivitas pariwisata secara bertahap. Implementasi sertifikasi CHSE yang dimulai sejak tahun 2020 terus diperluas untuk memastikan pembukaan aktivitas wisata yang aman dan mendorong *confidence* wisatawan. Hingga akhir 2021 tercatat sebanyak 2.091 pelaku usaha pariwisata di Bali telah tersertifikasi CHSE.

---

*Work From Bali merupakan program untuk mempersiapkan pembukaan aktivitas pariwisata Bali*

---

**Bank Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung pemulihan pariwisata Bali.** Sinergi program dilakukan melalui perluasan digitalisasi transaksi pembayaran dengan QRIS di seluruh Bali, termasuk di destinasi wisata. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, sekaligus mengakselerasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia turut mengambil inisiatif untuk terlibat secara aktif dalam program WFB, termasuk dengan

melibatkan satuan kerja di kantor pusat, termasuk penyelenggaraan kegiatan internal. Dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM Bali, termasuk UMKM pendukung pariwisata juga terus berlanjut selama pandemi, melalui pelaksanaan bantuan teknis, fasilitasi dalam pemasaran produk, serta penguatan kelembagaan.



Berbagai langkah yang ditempuh dan pembukaan pariwisata secara bertahap mendorong ekonomi Bali berangsur pulih. Tanda-tanda pemulihan ekonomi Bali terutama sejak akhir tahun 2021, didukung mobilitas yang meningkat dengan pembatalan pemberlakuan PPKM pada periode perayaan Natal dan tahun baru 2021. Pemerintah juga terus mendorong kesiapan pembukaan akses wisman yang kemudian dapat dipercepat pada

Maret 2022. Pelonggaran wisnus dan wisman, telah memberikan dampak yang positif terhadap kinerja ekonomi Bali. Perekonomian Bali mulai dapat kembali tumbuh positif pada triwulan IV 2021 dan terus membaik hingga pada triwulan II 2022 tercatat tumbuh 3,04% (yoy) seperti pada Grafik 2.3.

(%)



Sumber : BPS, diolah

Grafik 2.3. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Bali



Tari Kecak, Uluwatu, Bali



# Bab 3

## Memperkuat Asa Momentum Pemulihan Pariwisata

3.1  
Membuka Pariwisata Secara Aman

3.2  
Daya Saing Pariwisata Membaik

3.3  
Tren Baru Pariwisata Mengemuka

*Pasca meredanya gelombang varian Omicron, pelonggaran mobilitas kembali diberlakukan dan terus diperluas, termasuk di Indonesia, dimulai dengan kebijakan travel bubble yang kemudian diikuti pembukaan akses wisman. Pemulihan pariwisata juga didukung oleh kembali meningkatnya penyelenggaraan event dan MICE. Momentum pemulihan pariwisata juga didukung daya saing pariwisata nasional yang meningkat. Namun demikian, proses pemulihan kinerja pariwisata dibayangi sejumlah tantangan, antara lain operasional pelaku usaha yang belum sepenuhnya pulih, kapasitas angkutan udara yang masih terbatas, dan dinamika ketidakpastian global yang meningkat. Proses adaptasi masyarakat terhadap kondisi pandemi COVID-19 pada akhirnya diikuti mengemukanya tren baru pariwisata yang akan turut memberi dampak pada perubahan lanskap pengembangan atraksi dan destinasi pariwisata.*

# 3.1 Membuka Pariwisata Secara Aman

## *Pelonggaran Mobilitas Secara Global Berangsur Dimulai*

Pasca mulai melandainya kasus varian Delta COVID-19, sejumlah negara mulai menempuh pelonggaran mobilitas secara bertahap pada triwulan III 2022 termasuk untuk perjalanan antarnegara. Berbagai negara di Eropa timur dan selatan, Skandinavia dan AS, serta Singapura mulai melonggarkan perjalanan domestik, terutama dengan pembukaan secara bertahap aktivitas terkait tempat kerja dan pertemuan. Beberapa negara Skandinavia juga melonggarkan protokol penggunaan masker. Selain mobilitas domestik, pelonggaran mobilitas antarnegara juga mulai ditempuh secara bertahap pada akhir kuartal ketiga 2022 di negara-negara maju, seperti Kanada, Qatar, Finlandia, Norwegia, termasuk Singapura, menyusul sejumlah negara seperti Swiss, Swedia, dan Polandia. Pelonggaran berbentuk kewajiban *screening* maupun karantina parsial, dari yang sebelumnya berbentuk penutupan total maupun penutupan parsial.

Restriksi mobilitas secara global semakin meluas dan longgar pada triwulan IV 2021. Pada periode ini negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Inggris, Belgia, hingga Jepang telah membuka penuh aktivitas kantor. Negara-negara seperti Taiwan, Belgia, Italia, hingga Jepang juga melonggarkan kegiatan pertemuan berskala besar. Menyusul negara-negara Skandinavia, Oman, Qatar, India, Ukraina, juga menempuh pelonggaran masker, dengan kewajiban hanya di tempat publik yang ramai, dan selebihnya hanya bersifat rekomendasi. Pada periode ini juga, negara seperti AS, Turki, Denmark, Ceko, hingga Spanyol terus melonggarkan akses wisman, dengan hanya kewajiban *screening* dan tanpa karantina. Beranjak dari gelombang varian Delta, Indonesia juga menempuh pelonggaran level PPKM, dengan semakin meningkatkan rasio WFO, uji coba sekolah tatap muka, dan memperbolehkan pertemuan skala menengah.

---

*Terkendalinya penyebaran COVID-19 mendukung perbaikan mobilitas secara global*

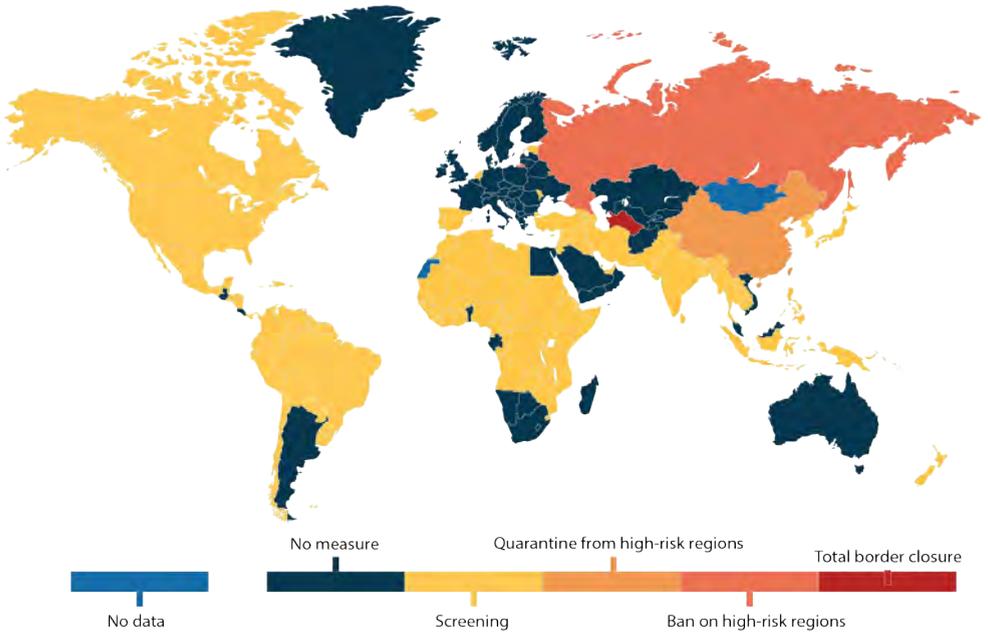
---

Merebaknya varian Omicron COVID-19 pada akhir 2021 hingga awal 2022 menyebabkan sejumlah negara kembali memperketat restriksi mobilitas. Kendati varian Omicron tidak seberat varian Delta (*less severe*), namun lonjakan kasus yang terjadi pada periode ini mengharuskan dilakukannya kembali pengetatan mobilitas di berbagai negara. Pembatasan mobilitas kembali ditempuh pada periode ini, antara lain dengan kembali mewajibkan *work from home* secara parsial, seperti yang diberlakukan di sejumlah negara seperti Hong Kong, Malaysia, dan Thailand. Pembatasan pertemuan skala besar juga kembali diberlakukan di sejumlah negara seperti Jerman, Austria, Thailand, dan Hong Kong. Bahkan terdapat negara yang melarang pertemuan lebih dari 10 orang. Sejumlah negara seperti India, Hong Kong, dan Rusia juga kembali mewajibkan penggunaan masker di tempat publik. Sementara itu, negara-negara seperti Qatar, Taiwan, dan Hong Kong kembali menerapkan kewajiban karantina dan melarang kedatangan warga negara asing dari negara yang dianggap memiliki risiko tinggi COVID-19.



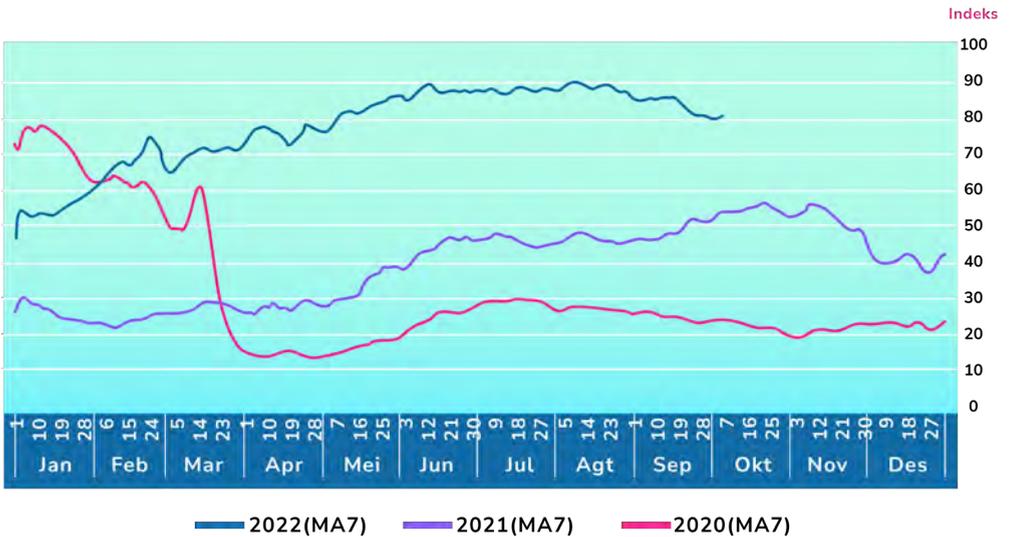
Gelombang varian Omicron secara global mulai mereda pada Maret 2022 sehingga pelonggaran mobilitas kembali diberlakukan dan terus semakin luas. Pembukaan aktivitas kerja secara terbatas hanya diberlakukan di beberapa negara Timur Tengah, Afrika, dan Tiongkok. Sebagian besar negara telah membuka aktivitas kerja dan pertemuan skala besar, termasuk pengaturan penggunaan masker yang hanya wajib terbatas di tempat publik yang ramai dan di Eropa kini hanya bersifat himbauan. Pelarangan pertemuan skala besar hingga saat ini hanya diberlakukan oleh Tiongkok, Iran, Aljazair, Laos, dan Tunisia. Lebih lanjut, pembukaan akses mobilitas antarnegara yang longgar telah semakin luas diterapkan di berbagai negara, terutama di Eropa, Timur Tengah, Asia Tengah, Afrika bagian selatan, Asia Tenggara, dan Australia (Gambar 3.1). Pengaturan mobilitas domestik dan antarnegara yang masih cukup ketat hingga Agustus 2022, hanya diberlakukan di Tiongkok sejalan dengan penerapan *Zero Covid Policy* (ZCP). Pelonggaran restriksi mobilitas antarnegara di berbagai negara telah mendorong *travel demand* global kembali dalam tren yang terus menguat (Grafik 3.1.).





Sumber : Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Oktober 2022

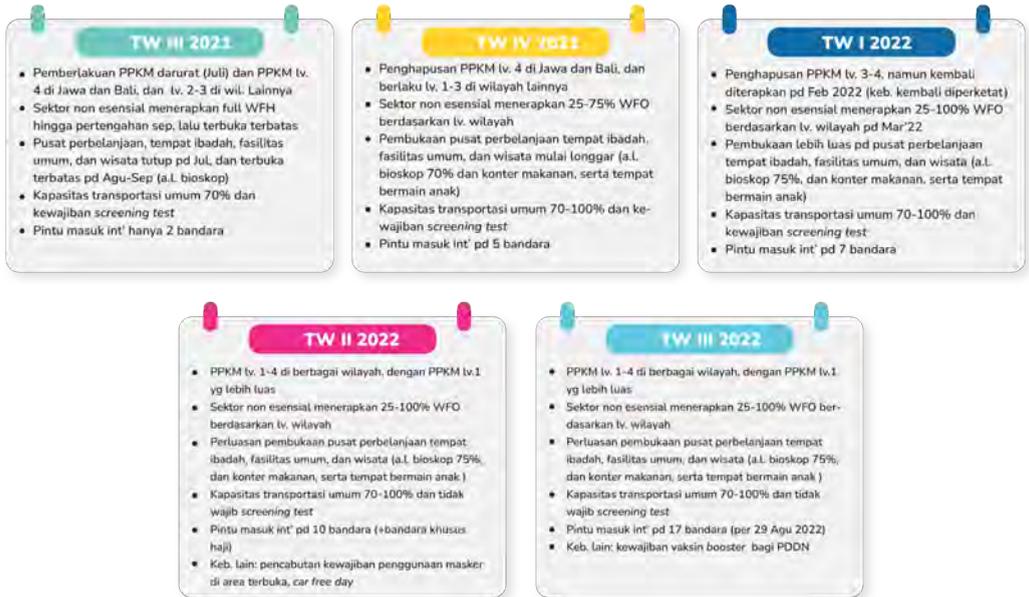
Gambar 3.1. Kebijakan Restriksi Mobilitas Internasional berbagai Negara



Sumber : Google Destination Insight 2020-Oktober 2022, diolah

Grafik 3.1. Travel Demand Global

## Pelonggaran Mobilitas dan Pembukaan Akses Wisatawan Mancanegara di Indonesia



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, diolah

Gambar 3.2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Terkait Mobilitas Wisnus

Di Indonesia, sejalan dengan membaiknya kasus varian Delta yang mengemuka pada triwulan III 2021, restriksi mobilitas secara perlahan mulai dipelonggar. Setelah sebelumnya menerapkan PPKM Darurat akibat lonjakan kasus COVID-19 varian Delta hingga mencapai 56 ribu kasus per-hari pada pertengahan Juli 2021, pemerintah secara berangsur mulai melonggarkan pembatasan mobilitas pada awal September 2021, meski masih cukup ketat. Pelonggaran terus berlanjut hingga akhir September 2021 dengan pembukaan aktivitas usaha kebutuhan pokok yang terus

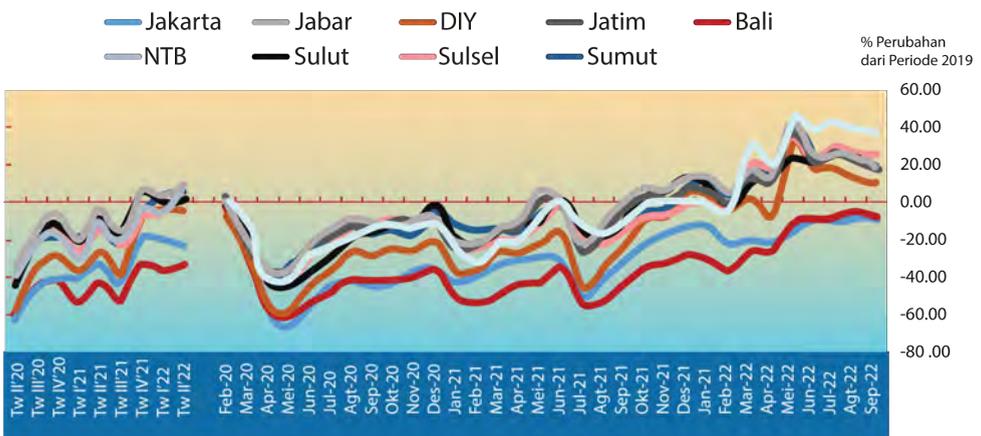
diperluas, hingga kembali dibukanya bioskop secara terbatas. Pelonggaran mobilitas dilakukan sangat berhati-hati mempertimbangkan masih tingginya angka kasus aktif COVID-19 kendati mulai membaik (Gambar 3.2.).

**Memasuki triwulan IV 2021, pelonggaran mobilitas terus berlanjut dengan penghapusan PPKM level 4 di Jawa dan Bali serta pemberlakuan PPKM level 1 di berbagai daerah.** Pembatasan operasional pada sektor non-esensial dilonggarkan dengan penerapan 25-75% *work from office*. Pelonggaran pembukaan fasilitas publik juga diperluas, seperti pembukaan fasilitas olahraga

indoor, perluasan pembukaan pusat perbelanjaan, termasuk pembukaan konter makanan di bioskop dan mulai dibukanya tempat bermain anak, serta peningkatan kapasitas penumpang transportasi publik hingga 100%. Pelonggaran kebijakan yang terus berlanjut, mendorong perbaikan pergerakan wisnus sebagaimana tercermin pada meningkatnya mobilitas terkait aktivitas pariwisata di berbagai daerah, terutama pada periode hari besar keagamaan nasional akhir tahun dan tahun baru.

menghapus kewajiban *screening* pada transportasi umum. Pelonggaran terus berlanjut dengan diperbolehkannya kembali perjalanan mudik pada periode lebaran 2022, setelah sempat dilarang selama periode 2020-2021. Perkembangan ini mendorong pergerakan mobilitas terkait aktivitas wisata yang melonjak hingga lima kali lipat dari pergerakan mobilitas pada periode mudik tahun sebelumnya, dan telah mencapai sekitar 75% dari level pra-pandemi (Grafik 3.2.).

**Meningkatnya kembali kasus COVID-19 varian Omicron pada triwulan I 2022 menyebabkan mobilitas kembali diperketat.** Pemerintah kembali menerapkan kebijakan PPKM level 3 dan 4 di sejumlah daerah, walaupun dengan penyesuaian sehingga tidak seketat sebelumnya. Namun, seiring meredanya kasus varian Omicron pelonggaran pembatasan mobilitas kembali diterapkan, termasuk



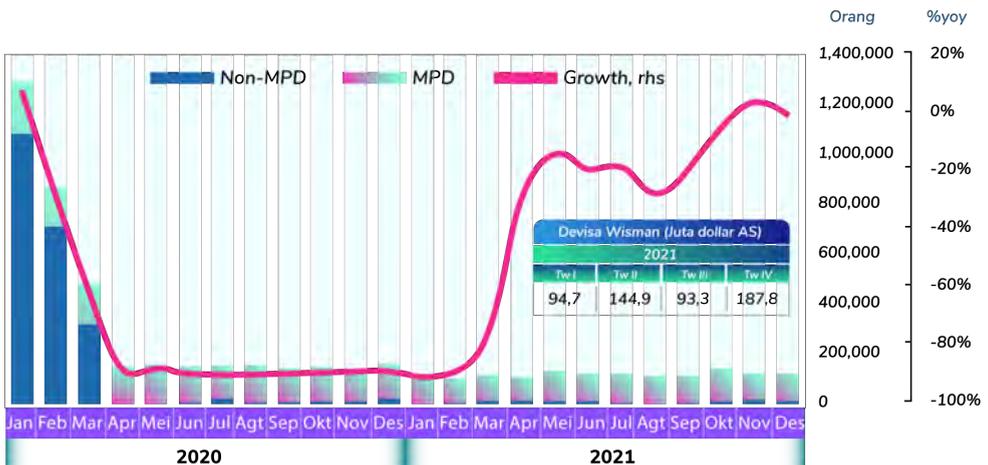
Sumber : Google Mobility Report, diolah  
Data s.d. 30 September 2022

**Grafik 3.2. Mobilitas Masyarakat terkait Aktivitas Pariwisata di Daerah**

**Pelonggaran mobilitas domestik juga disertai pembukaan akses wisatawan mancanegara (wisman) secara bertahap.** Dengan terkendalinya varian Delta COVID-19, pembukaan akses wisman mulai dilakukan sejak 14 Oktober 2021 di pintu kedatangan Bali. Pembukaan wisman hanya diperuntukan bagi wisman yang telah memperoleh vaksin lengkap dan berasal dari negara dengan tingkat risiko rendah COVID-19<sup>9</sup>. Persyaratan ketat tetap diberlakukan bagi wisman, seperti syarat tes PCR tiga hari sebelum kedatangan dan setelah menjalani karantina selama delapan hari, serta syarat tes PCR tiga hari sebelum berangkat kembali ke negara asal. Pembukaan akses wisman yang mulai dilakukan, disertai pelaksanaan event internasional pada triwulan IV 2021 mulai mendorong perbaikan jumlah kedatangan wisman ke Indonesia.

Beberapa penyelenggaraan event internasional pada periode ini seperti *International Badminton Festival* di Bali dan *World Superbike* di Mandalika, turut mendorong jumlah wisman masuk yang kembali tumbuh positif dengan penerimaan devisa yang juga tumbuh positif (Grafik 3.3.).

<sup>9</sup> Ditentukan berdasarkan pertimbangan beberapa parameter, antara lain positivity rate <5%, return home policy yang mendukung, high spender, dan mempunyai penerbangan langsung ke Bali. Pada tahap awal ini, pembukaan akses wisman diperuntukan bagi wisman asal negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, China, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Perancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, dan Norwegia.



Sumber : BPS, Bank Indonesia, diolah

**Grafik 3.3. Jumlah Kedatangan Wisman 2020-2021 dan Perolehan Devisa Wisman**

Kebijakan *travel bubble* juga ditempuh pada Januari 2022 untuk mendukung perbaikan kunjungan wisman, terutama dari Singapura ke Batam dan Bintan. Penerapan kebijakan *travel bubble* merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pertemuan antara Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Singapura pada forum *Leaders' Retreat* Indonesia-Singapura tanggal 25 Januari 2022. Dari hasil kesepakatan tersebut, Indonesia telah memfasilitasi perjalanan wisata bebas karantina antara Batam - Bintan - Singapura. Sementara itu, skema *Vaccinated Travel Lanes (VTL) by Sea* dijalankan oleh pihak Singapura mengakomodasi perjalanan kapal ferry bagi para pemuda yang memasuki kawasan yang ditetapkan, yakni Lagoi-Bintan dan Nongsa-Batam. Beberapa persyaratan masuk tetap diberlakukan, seperti syarat vaksin dosis lengkap minimal 14 hari sebelum keberangkatan dan mendapatkan hasil negatif PCR maksimal tiga hari sebelum kedatangan, bukti pemesanan paket wisata *travel bubble*, serta asuransi kesehatan minimal senilai 30.000 dolar Singapura.



Kawasan Jembatan Barelang, Batam, Kepulauan Riau



**Kebijakan pembukaan akses wisman ke Indonesia terus diperlonggar dan diperluas secara bertahap.** Pengurangan masa karantina menjadi tujuh hari mulai diterapkan sejak awal 2022, kendati syarat wajib PCR dan syarat asuransi dengan nilai tanggungan 100.000 dolar AS tetap berlaku. Pintu masuk wisman dipusatkan pada dua bandara, yakni Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai Bali. Pelonggaran akses wisman diperluas pada Februari 2022 dengan memangkas waktu karantina bagi yang telah memperoleh vaksin dosis lengkap, termasuk kewajiban PCR yang tidak lagi harus menunggu hari ke-6 masa karantina, serta nilai tanggungan asuransi turun menjadi 25.000 dolar AS. Pada periode ini pintu masuk wisman diperluas hingga mencakup tujuh bandara, lima pelabuhan laut, dan tiga pos lintas batas. Pelonggaran akses wisman mulai signifikan dilakukan pada awal Maret 2022 dengan penerapan uji coba bebas karantina di Bali dan Kepri<sup>10</sup>. Pembebasan kewajiban karantina secara luas dilakukan sejak 23 Maret 2022 bagi wisman yang telah memperoleh vaksin dosis lengkap. Kewajiban asuransi juga diserahkan kepada pengelola atau pemerintah daerah masing-masing destinasi wisata. Negara subyek penerima VoA

diperluas menjadi 42 negara. Pintu masuk kedatangan wisman diperluas dengan syarat kedatangan yang terus diperlonggar pada April 2022, disertai penambahan negara subyek penerima VoA dan penerapan Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk sembilan negara ASEAN. Hingga awal September 2022, pintu masuk wisman telah ditetapkan menjadi 15 bandara, dengan negara subyek penerima VoA sebanyak 86 negara, serta tidak ada lagi syarat *pre-departure* dan *arrival test*, kecuali bagi yang bergejala, dan tidak ada lagi syarat wajib asuransi (Tabel 3.1.).

---

**10** Kebijakan bebas karantina pada periode uji coba dikhususkan bagi wisman yang telah mendapatkan vaksin dosis lengkap, namun tetap wajib menjalani tes PCR kedatangan dan menunggu hasil tes di hotel. Pada periode ini negara yang diperbolehkan memasuki Indonesia bertambah dari 19 negara menjadi 23 negara melalui skema Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata (VKSK-KK) atau Visa on Arrival (VoA).

KEBIJAKAN	8 Mar 2022	23 Mar 2022	5 Apr 2022	19 Apr 2022	18 Mei 2022	8 Jun 2022	17 Jul 2022	1 Sep 2022
 <b>Karantina</b>	1/7 Hari	Tanpa Karantina						
 <b>Vaksinasi</b>	Wajib lengkap/ booster							
 <b>Kebijakan Test</b>	RT-PCR (max 2x24h) Saat kedatangan & hari ke-3/6	RT-PCR (max 2x24h) Entry RT-PCR test	RT-PCR (max 2x24h) Entry RT-PCR test	RT-PCR (max 2x24 h) Antigen from SIN (max 1x24h) Entry RT-PCR test	Kebijakan Pre Departure test dihapuskan Entry RT-PCR Test hanya untuk yang bergejala			
 <b>Asuransi</b>	\$25,000	Ditetapkan pengelola atau pema				Dihapuskan		
 <b>Pintu Masuk</b>	7 Bandara, 5 Pelabuhan, 3 Pos Lintas Batas	10 Bandara, 7 Pelabuhan, 3 Post Lintas Batas	10 Bandara, 8 Pelabuhan, 3 Post Lintas Batas	16 Bandara (4 untuk haji), seluruh Pelabuhan Int', 8 Pos Lintas Batas	17 Bandara (6 untuk haji), seluruh Pelabuhan Int', 8 Pos Lintas Batas	17 Bandara, seluruh Pelabuhan Int', 8 Pos Lintas Batas		

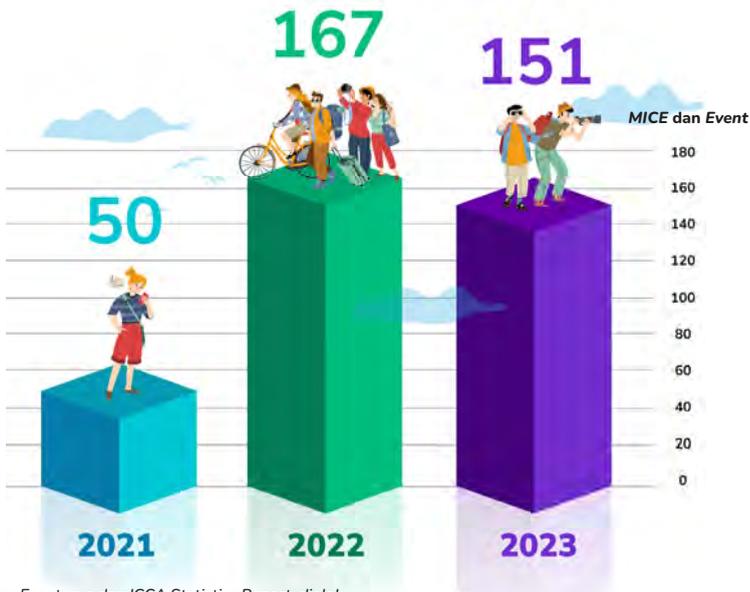
Sumber : SE Satgas COVID-19, diolah

Tabel 3.1. Lini Masa Pembukaan dan Pelonggaran Akses Wisatawan Mancanegara

### Penyelenggaraan MICE dan event berangsur terus meningkat

Pemulihan pariwisata juga didukung oleh kembali meningkatnya penyelenggaraan MICE dan event terutama sejak akhir 2021. Perkembangan tersebut diperkirakan terus berlanjut. Data sementara menunjukkan penyelenggaraan MICE dan event terjadwal pada 2022 meningkat dan akan terus berlanjut pada 2023 (Grafik 3.4.). Meningkatnya penyelenggaraan MICE dan event pada awal pelonggaran mobilitas terutama didorong oleh pemerintah, salah satunya melalui penyelenggaraan *international event* MotoGP yang menjadi titik balik peningkatan kembali event skala besar di Indonesia. Pelaksanaan event MotoGP setelah penantian 25 tahun tersebut disambut

baik antusias oleh masyarakat, serta telah memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian daerah maupun nasional. Lebih lanjut penyelenggaraan MICE dan event berskala besar pada paruh pertama 2022 menunjukkan peningkatan, termasuk dukungan dari rangkaian berbagai agenda kegiatan Presidensi Indonesia pada G20 yang akan mencapai puncaknya pada akhir 2022. Seiring dengan terus membaiknya kondisi pandemi COVID-19 dan pelonggaran mobilitas yang ditempuh pemerintah, penyelenggaraan event dan MICE diperkirakan akan kembali mengarah kepada format fisik. Meski demikian preferensi penyelenggaraan dalam format *hybrid* akan tetap tinggi. Lebih lanjut, penyelenggaraan berbagai MICE dan event skala besar masih terus terjadwal hingga tahun 2023.



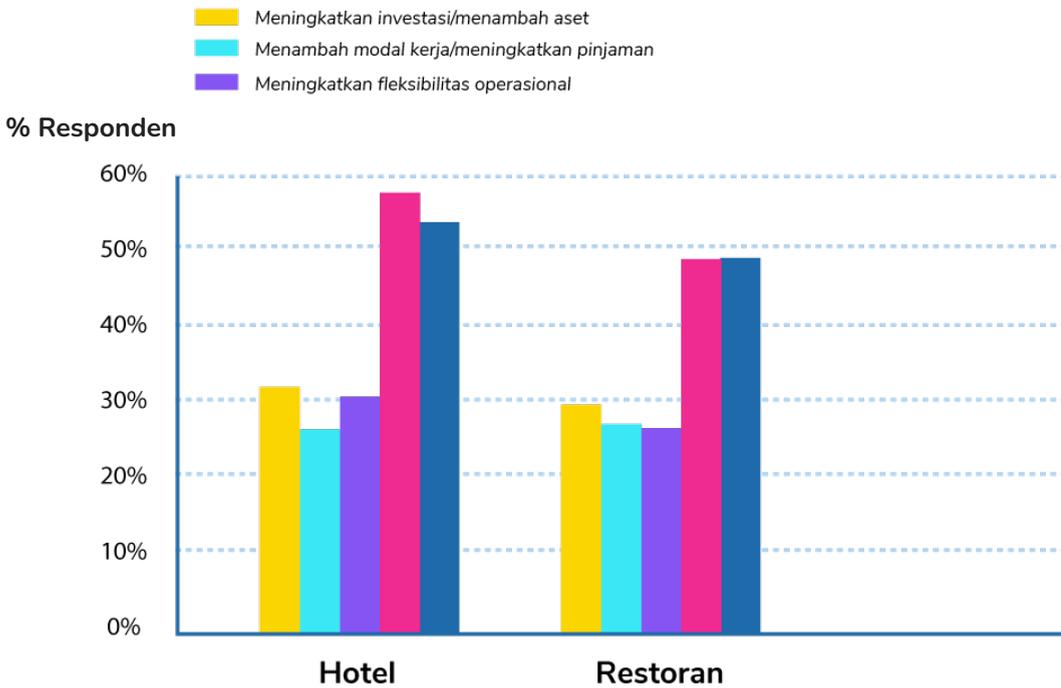
Sumber: Eventseye dan ICCA Statistics Report, diolah

Ket: \*) jumlah MICE terjadwal akan terus mengalami perubahan hingga mendekati waktu pelaksanaan

Grafik 3.4. Jumlah MICE dan Event



*Dieng Culture Festival, Dieng, Jawa Tengah*



Sumber: Bank Indonesia

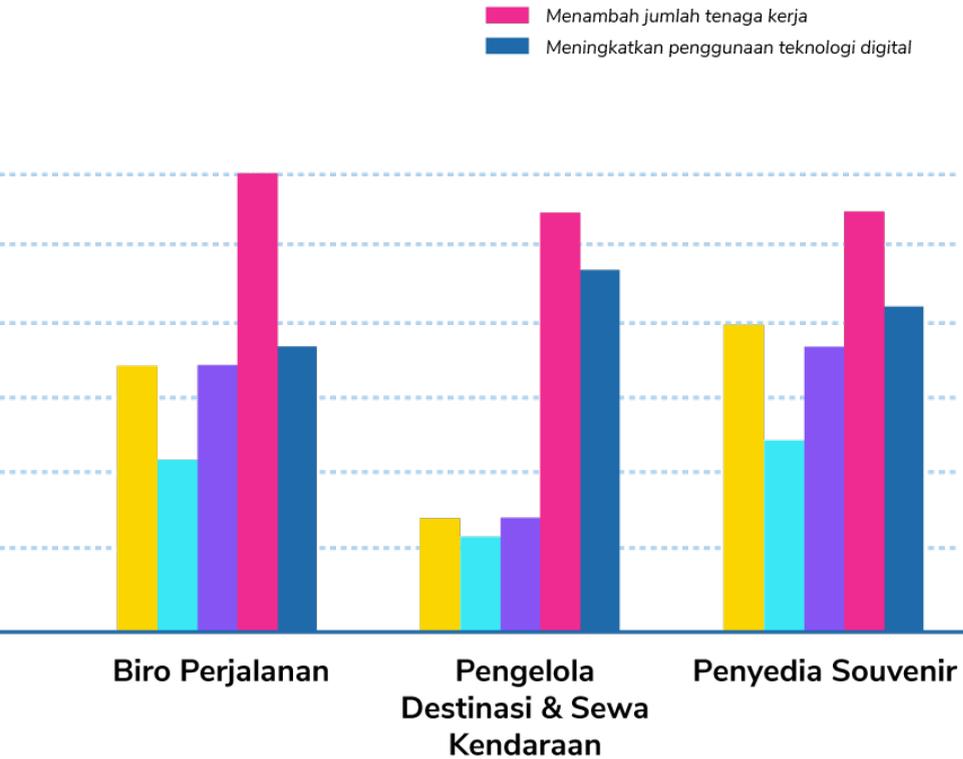
Grafik 3.5. Upaya yang Dilakukan Pelaku Usaha Pariwisata dalam Merespons Kenaikan Permintaan

### Tantangan yang Masih Mengemuka

**Proses pemulihan kinerja pariwisata yang tengah berlangsung masih dibayangi sejumlah tantangan.** Setelah menghadapi tekanan sulit akibat pandemi COVID-19, pemulihan permintaan pariwisata belum dapat diimbangi oleh kemampuan sisi pasokan yang memadai. Tantangan pertama mengemuka dari kinerja operasional pelaku usaha pariwisata yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia mengindikasikan kegiatan

operasional dan penggunaan tenaga kerja oleh pelaku usaha belum sepenuhnya kembali ke tingkat pada masa pra pandemi<sup>11</sup>. Pelaku usaha biro perjalanan dan pengelola destinasi termasuk dalam kelompok yang pemulihannya lebih lambat. Setidaknya terdapat tiga hal yang menyebabkan belum pulihnya penggunaan tenaga kerja ini, yakni kinerja usaha/keuangan yang masih di bawah level pra pandemi,

<sup>11</sup> Survei Khusus Sektor Riil (SKSR) periode Triwulan II 2022



perampingan usaha/proses bisnis yang dilakukan sebelumnya dalam menghadapi situasi pandemi, serta peningkatan penggunaan teknologi informasi/digital dalam operasional usaha (Grafik 3.5.).

Kendati demikian, hasil survei yang sama juga menunjukkan kesiapan pelaku usaha dalam hal implementasi protokol COVID-19 / sertifikasi CHSE dan vaksinasi kepada tenaga kerja.

Lebih lanjut, adaptasi penggunaan teknologi untuk fleksibilitas operasional akan semakin dioptimalkan oleh pelaku usaha.

Tantangan kedua berkaitan dengan kapasitas angkutan udara yang masih terbatas ditengah kenaikan harga energi global. Pada pertengahan 2022, jumlah pesawat yang beroperasi diperkirakan hanya sekitar 63% dari sebelum pandemi dengan frekuensi penerbangan dan jam operasional beberapa bandara yang belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini setidaknya dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, banyaknya tenaga kerja di industri penerbangan yang beralih profesi sebagai lanjutan dari upaya efisiensi yang ditempuh industri penerbangan akibat dampak pandemi. Kedua, kenaikan biaya operasional terutama akibat kenaikan harga energi global (Grafik 3.6.). Ketiga, terbatasnya ketersediaan armada karena isu pengembalian armada

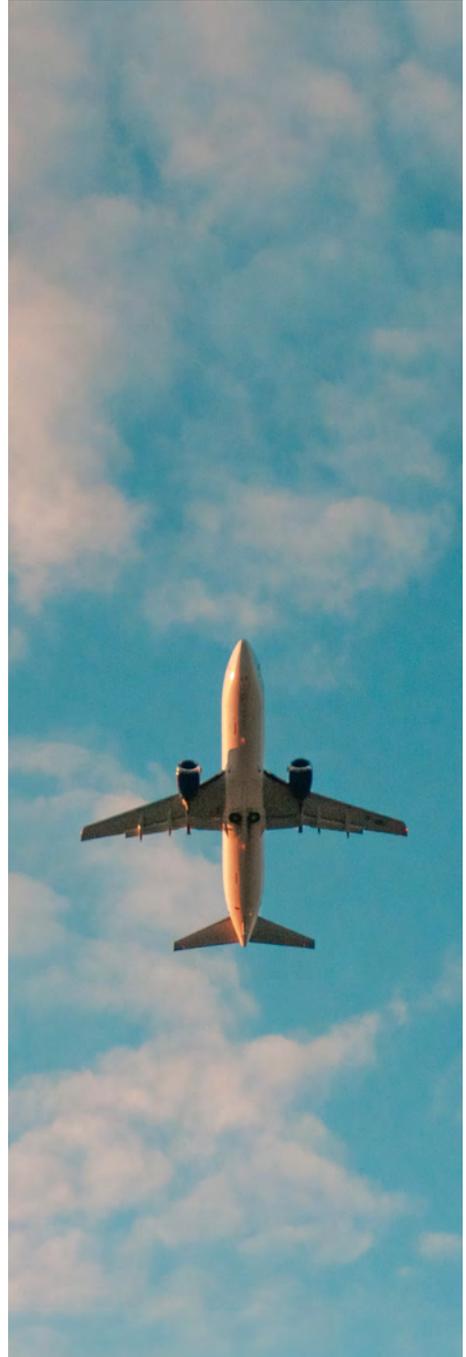
oleh maskapai kepada pihak *lessor*, serta antrean di fasilitas *Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO)*. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong peningkatan kapasitas angkutan udara, antara lain dalam jangka pendek dilakukan optimalisasi rotasi penerbangan dengan mempertimbangkan kemampuan maskapai dan bandara, penerapan *fuel surcharge* untuk meredam dampak kenaikan harga energi, serta stimulus untuk mendorong peningkatan frekuensi angkutan udara. Dalam jangka menengah, peningkatan kapasitas dan pemerataan lokasi MRO dapat menjadi salah satu opsi prioritas dalam memperkuat kapasitas angkutan udara.



Sumber : IATA

Grafik 3.6. Harga Bahan Bakar Penerbangan dan Minyak Dunia

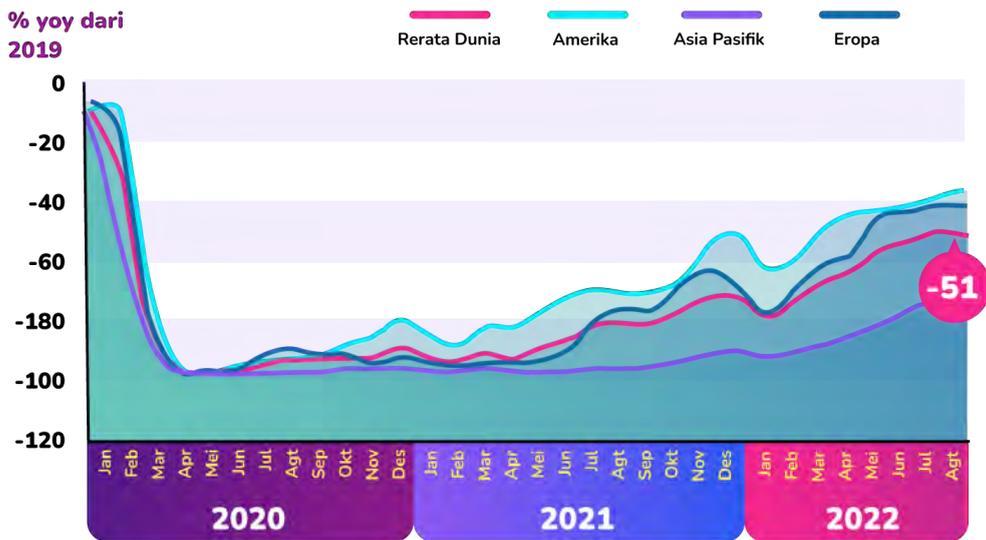
Tantangan ketiga bersumber dari dinamika ketidakpastian global yang meningkat sehingga memberi risiko pada berlangsungnya proses pemulihan. Momentum pemulihan ekonomi global pada awal 2022 harus kembali dihadapkan pada ketidakpastian global yang meningkat akibat perang Rusia-Ukraina. Kondisi ini kemudian mendorong mengemukanya risiko stagflasi dengan prospek pertumbuhan ekonomi global yang tidak sebaik prakiraan awal dan resesi di sejumlah negara maju. Tekanan inflasi secara global juga mengalami peningkatan akibat harga energi dan pangan. Kenaikan harga energi dan pangan ini mencapai puncaknya pada pertengahan 2022. Meski mulai mengalami koreksi, harga komoditas terutama energi dan bahan bakar penerbangan masih bertahan pada level yang tinggi. Kombinasi dari berbagai ketidakpastian tersebut dapat berimbas pada tertahannya peningkatan *global travel demand*. Perkembangan ini tentunya memberikan tantangan bagi prospek pemulihan pariwisata ditengah penerapan ZCP yang masih diberlakukan di Tiongkok, serta masih terdapatnya risiko mengemukanya varian baru COVID-19.



Berbagai tantangan yang mengemuka perlu diwaspadai agar tidak mengganggu proses pemulihan pariwisata nasional. Masih tingginya harga bahan bakar penerbangan yang membuat masih tingginya harga tiket pesawat, di tengah harga pangan dan berbagai komoditas lainnya yang masih tinggi, dikhawatirkan mendorong sebagian wisman untuk menunda perjalanan wisatanya. Hasil survei Bank Indonesia<sup>12</sup> terhadap wisman pada Mei – Juni 2022 menunjukkan bahwa faktor biaya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam merencanakan perjalanan wisata, setelah faktor persyaratan

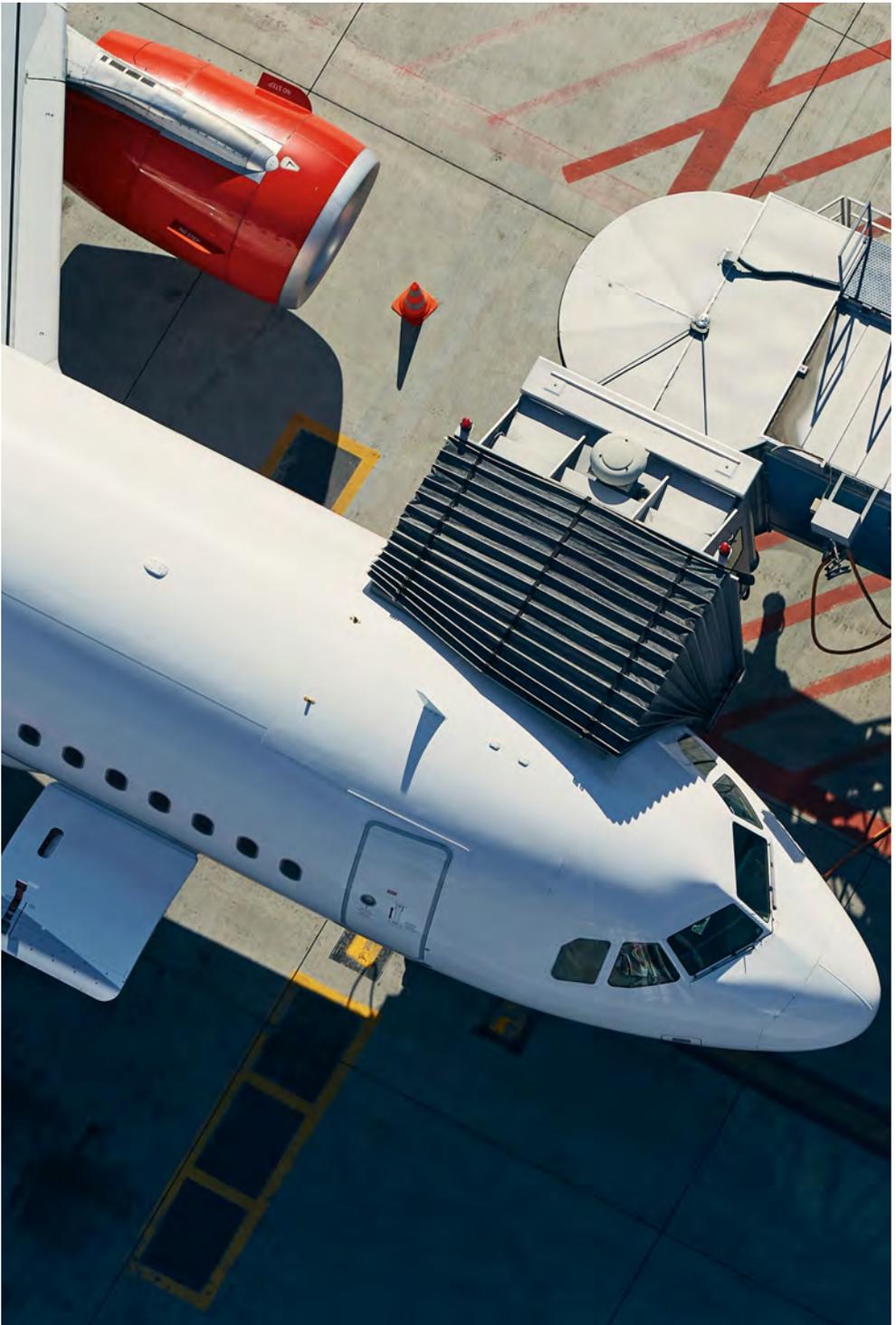
perjalanan dan atraksi yang menarik. Data *travel demand* global yang mulai cenderung stagnan sejak Agustus 2022 mengkonfirmasi bahwa kekhawatiran tersebut mulai membayangi kondisi pariwisata nasional yang berangsur membaik (Grafik 3.7.). Dalam menghadapi berbagai tantangan yang masih membayangi, penguatan sinergi perlu dilakukan khususnya untuk memitigasi risiko yang mengemuka sekaligus mengoptimalkan peluang yang timbul. Sinergi kebijakan dan kolaborasi diarahkan untuk memastikan keberlanjutan proses pemulihan pariwisata nasional.

12 Survei Preferensi Pariwisata Berkualitas di Indonesia



Sumber : UNWTO Tourism Recovery Tracker, diolah

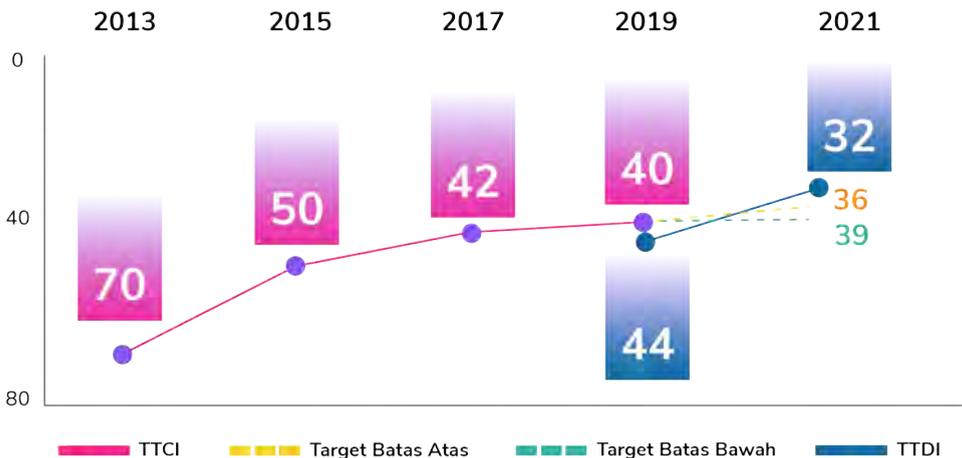
Grafik 3.7. Reservasi Tiket Pesawat Global



# 3.2 Daya Saing Pariwisata Membaik

Momentum pemulihan pariwisata didukung daya saing pariwisata nasional yang meningkat. Berbagai kebijakan pemulihan dan pengembangan pariwisata yang terus ditempuh pemerintah selama pandemi, telah berhasil mendorong peningkatan daya saing pariwisata Indonesia. Berdasarkan *Travel and Tourism Development Index* (TTDI) 2021 yang dirilis *World Economic Forum* (WEF) pada Mei 2022, daya saing pariwisata Indonesia berada pada peringkat 32,

atau naik 12 peringkat dari tahun 2019 (Grafik 3.8). Posisi tersebut menempatkan daya saing Indonesia berada pada peringkat tertinggi ke-2 di ASEAN, setelah Singapura. Sejalan dengan hal ini, Indonesia juga dinobatkan sebagai salah satu negara destinasi wisata ramah muslim terbaik di dunia. *Global Muslim Travel Index* 2022 (GMTI) Indonesia menempatkan Indonesia pada peringkat 2, setelah Malaysia sebagai destinasi tujuan wisata ramah muslim.



Sumber : World Economic Forum 2022, diolah

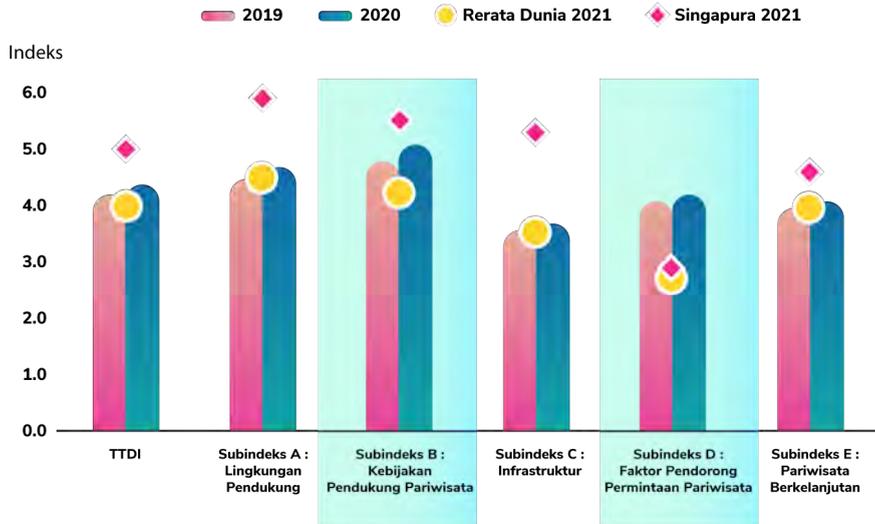
Grafik 3.8. Peringkat TTDI Indonesia

**Peningkatan daya saing pariwisata nasional pada *Travel Tourism Development Index* (TTDI) didukung oleh seluruh subindeks.**

Secara umum, peringkat Indonesia meningkat pada seluruh subindeks yang terdapat dalam TTDI (Grafik 3.9.). Peningkatan tertinggi terutama pada subindeks kebijakan dan kondisi pendukung, serta subindeks *demand drivers*. Kedua subindeks tersebut berada di atas nilai rata-rata global, dan bahkan untuk subindeks *demand drivers* berada di atas peringkat Singapura. Perkembangan yang sangat baik ini tidak terlepas dari komitmen dan konsistensi kebijakan pemerintah dalam mendorong pengembangan pariwisata, termasuk dalam perbaikan iklim usaha, dukungan ketersediaan dan pasar tenaga kerja, serta infrastruktur teknologi informasi. Selain itu, kekayaan alam dan ragam budaya yang dimiliki Indonesia menempatkan peringkat subindeks *demand drivers* berada dalam posisi yang baik. Peningkatan daya saing pariwisata nasional pada TTDI ke depan dapat ditempuh dengan memperkuat aspek keberlanjutan lingkungan, dukungan MICE, serta layanan kesehatan dan sanitasi. Dari seluruh capaian perbaikan peringkat daya saing pariwisata Indonesia pada TTDI, terdapat tiga pilar dalam subindeks yang justru mengalami penurunan. Penurunan paling dalam terutama pada pilar terkait keberlanjutan lingkungan atau *environmental sustainability*. Pilar ini berkaitan langsung dengan perlindungan alam terhadap kerentanan dan kesiapan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, penurunan peringkat juga terjadi pada pilar *non-leisure resources* yang berkaitan dengan daya tarik *business*

*travellers*. Penurunan peringkat yang perlu menjadi perhatian penting juga pada pilar sanitasi dan higienis, yang berkaitan erat dengan dukungan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, serta sanitasi yang memadai.





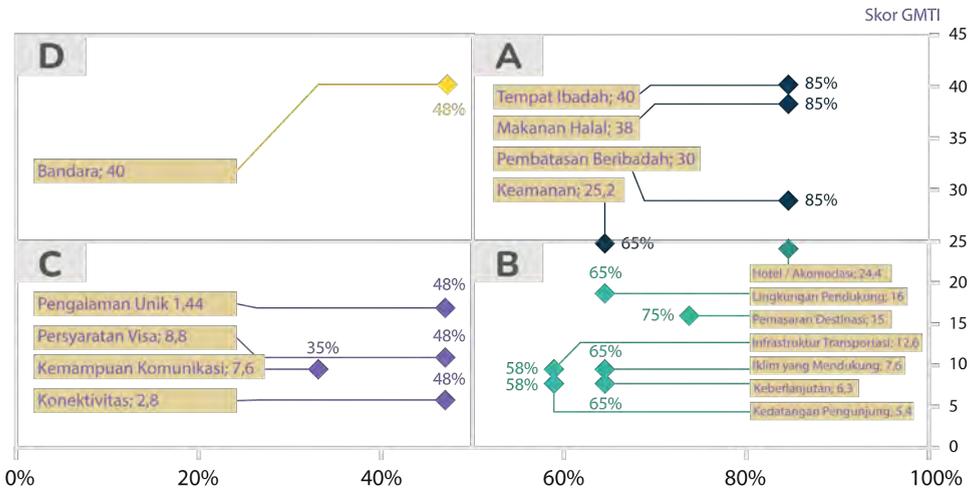
Sumber : World Economic Forum 2022, diolah

Grafik 3.9. Subindeks TTDI Indonesia

Sejalan dengan peringkat TTDI yang meningkat, Indonesia juga menempati posisi sebagai salah satu destinasi wisata ramah muslim terbaik dunia. Hal ini tercermin dari peringkat *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2022* yang dirilis Crescent Rating menempatkan Indonesia pada peringkat 2 setelah negara Malaysia, naik dari peringkat 4 pada tahun sebelumnya. Perkembangan yang sangat baik ini tidak terlepas dari komitmen dan konsistensi kebijakan pemerintah dalam mendorong promosi destinasi pariwisata nasional sebagai tujuan yang ramah muslim pada pilar komunikasi. Hal ini tercermin pada meningkatnya skor pada subindikator *destination marketing* yang meningkat, dan tetap kuatnya skor pada sub indikator lain seperti *transport infrastructure, stakeholder awareness enabling condition, enabling climate, faith restrictions, visitor arrivals, halal*

*dining, prayer places, airport, hotel / accommodations*<sup>13</sup>. Posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi ramah muslim terbaik dunia juga menjadi salah satu peluang untuk mendorong pemulihan dan penguatan pariwisata ke depan. Crescent Rating dalam rilisnya juga memproyeksikan pergerakan wisatawan muslim secara global akan mencapai 140 juta pada 2023, dan akan terus meningkat hingga 160 juta pada 2024.

<sup>13</sup> *Global Travel Muslim Index (GMTI)* dirilis oleh Crescent Rating secara periodik. GMTI diukur dari empat pilar utama yaitu aksesibilitas, komunikasi, lingkungan pendukung, dan layanan. Masing-masing pilar tersebut terbagi menjadi beberapa sub indikator.



Preferensi Responden (%)

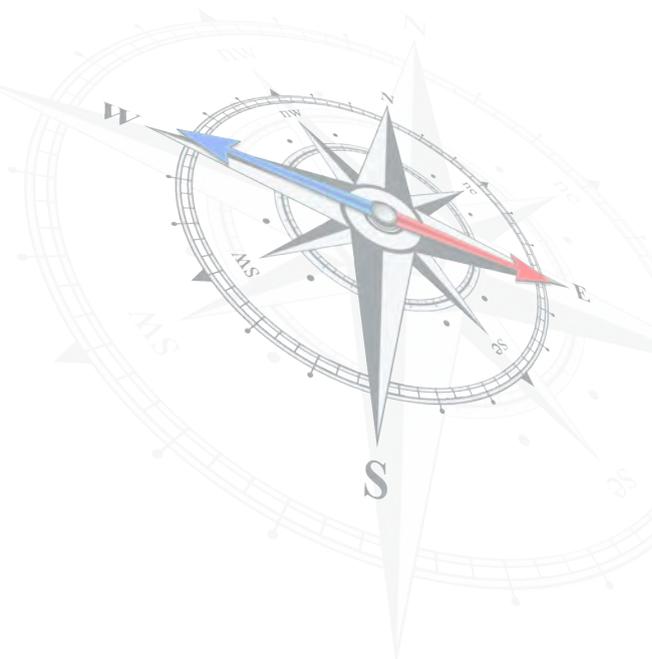
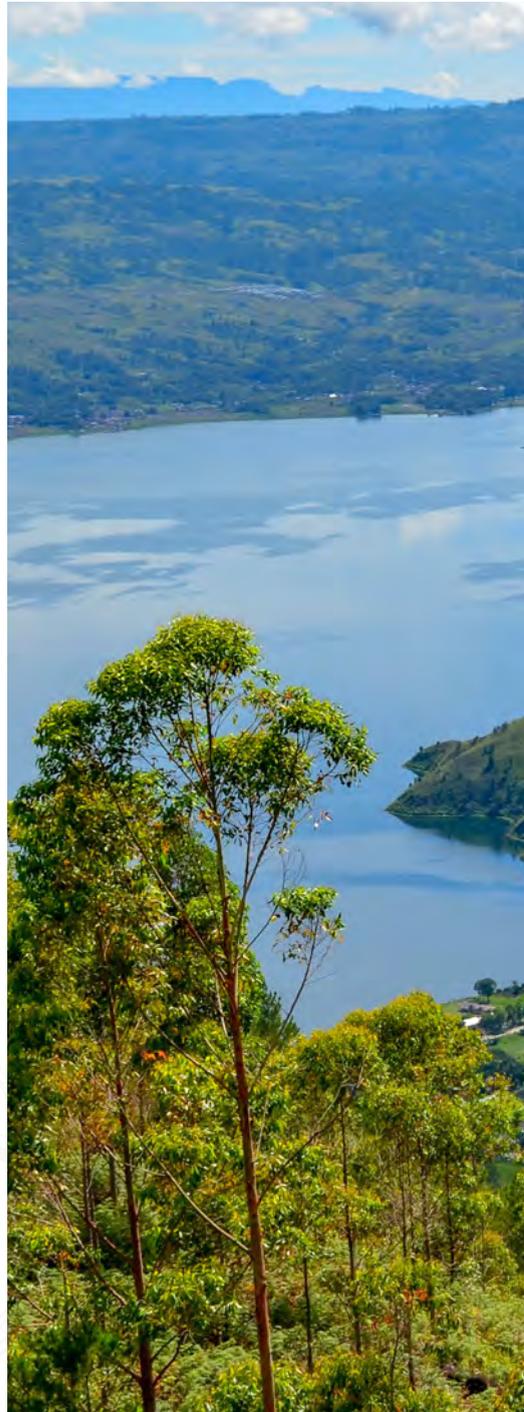
Sumber : Crescent Rating, diolah

Grafik 3.10. Preferensi Pariwisata Muslim dan Nilai GMTI Indonesia

Lebih lanjut, peringkat Indonesia sebagai salah satu destinasi ramah muslim terbaik sejalan dengan preferensi utama wisatawan global. Dari hasil perolehan skor dan tingkat preferensi wisatawan global terlihat bahwa kekuatan Indonesia sebagai destinasi ramah muslim terutama terbaik, didukung oleh ketersediaan restoran halal (*halal dining*), ketersediaan tempat ibadah (*prayer places*), *faith restrictions*, dan *general safety*. Kendati masih tetap tinggi, khusus skor pada subindikator *general safety* justru mengalami penurunan dibandingkan hasil pemeringkatan tahun 2021. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian untuk memastikan daya saing pariwisata nasional sebagai destinasi ramah muslim tetap kuat. Secara umum, kekuatan Indonesia sebagai destinasi ramah muslim terbaik dunia (sejalan dengan preferensi wisatawan global) tercermin pada subindikator pada kuadran A (Grafik 3.10.).



**Penguatan daya saing pariwisata ramah muslim ke depan dapat ditempuh dengan memperkuat aspek akses dan keamanan.** Selain penguatan *general safety* sebagaimana dikemukakan sebelumnya, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Dari Grafik 3.10. terlihat skor pada kuadran B yang mencakup subindikator *hotel, stakeholder awareness enabling condition, destination marketing, enabling climate, transport infrastructure, sustainability, visitor arrivals* masih perlu ditingkatkan sebagai prioritas penguatan daya saing pariwisata nasional khususnya destinasi ramah muslim. Hal ini mengingat subindikator tersebut termasuk bagian yang menjadi preferensi utama wisatawan global.





*Danau Toba, Sumatera Utara*

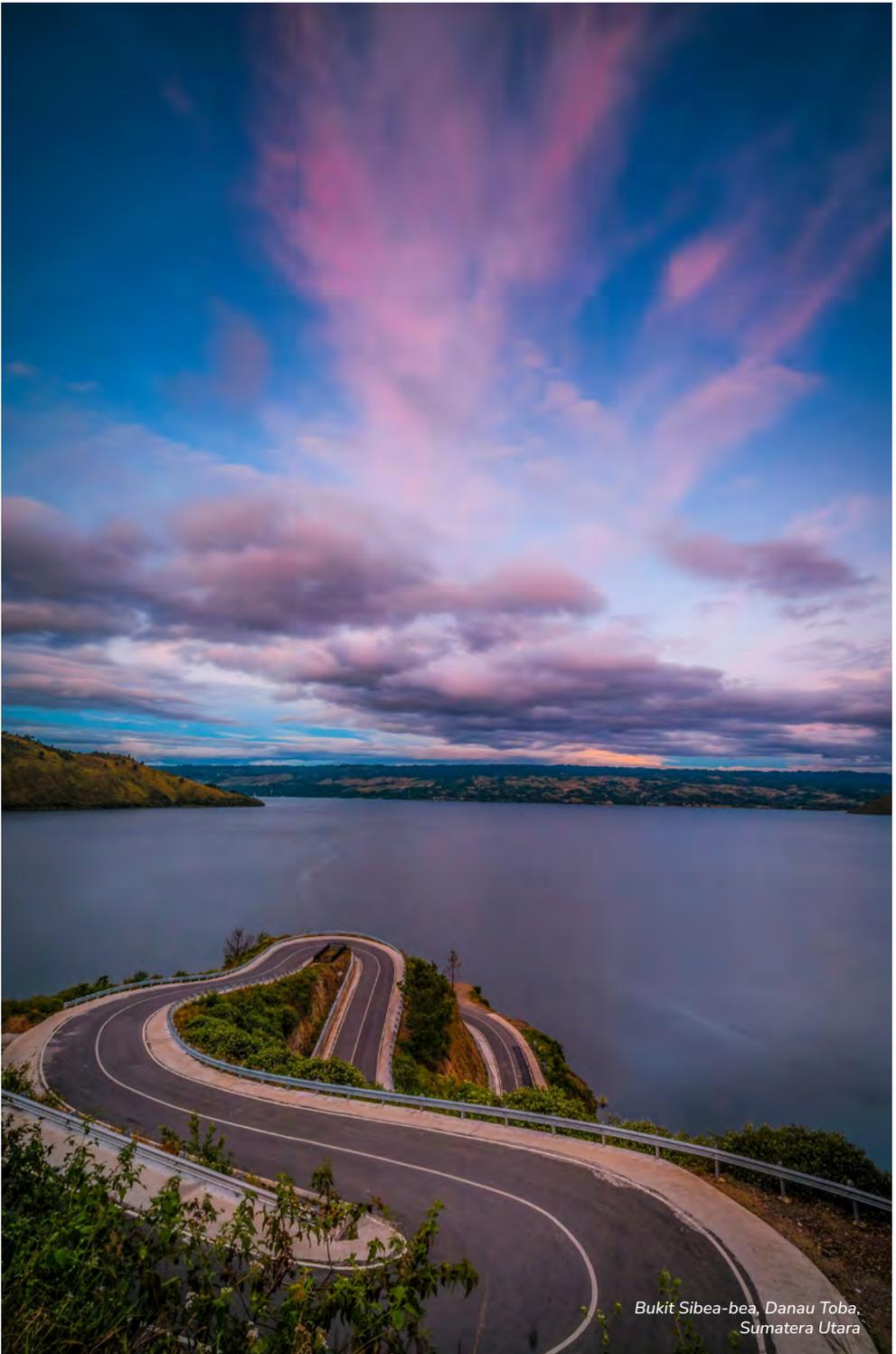
# 3.3

## Tren Baru Pariwisata Mengemuka

Proses adaptasi masyarakat terhadap kondisi pandemi COVID-19 diikuti mengemukanya tren baru pariwisata. Hal ini tidak terlepas dari pergeseran preferensi berwisata masyarakat secara global. Preferensi berwisata saat ini lebih mengedepankan *sustainability*, termasuk dalam hal frekuensi bepergian, mengunjungi atraksi, dan memilih akomodasi. Sejalan dengan itu, wisatawan cenderung menghindari keramaian dalam berwisata. Penekanan berwisata juga mengarah pada aspek pengalaman otentik dan interaksi dengan budaya lokal, serta dapat memberi dampak positif pada masyarakat lokal. Secara umum, tren baru pariwisata yang mengemuka lebih mengedepankan *quality tourism* yang mencakup *basic competitiveness*, *unique experience*, *high value* dan *sustainability*.

Perkembangan ini tentunya akan turut memberi dampak pada perubahan lanskap pengembangan atraksi dan destinasi pariwisata. Pengembangan destinasi pariwisata di berbagai daerah yang tengah menjadi prioritas pemerintah, perlu juga dipersiapkan untuk menangkap perubahan tren baru pariwisata ini sebagai peluang peningkatan wisman yang berkualitas. Pengembangan destinasi pariwisata perlu mengedepankan aspek-aspek *quality tourism* yang semakin menjadi daya tarik global. Perhatian pada konteks *quality tourism* ini pada akhirnya akan dapat menyeimbangkan dampak ekonomi, sosial dan budaya, dan keberlanjutan.





*Bukit Sibea-bea, Danau Toba,  
Sumatera Utara*



# Bab 4

## Menangkap Peluang Tren Baru Pariwisata

- 4.1  
Pariwisata Berkelanjutan Melalui *Quality Tourism*
  - 4.2  
Dari *Bleisure* ke *Workcation*
  - 4.3  
Akselerasi Pengembangan DPSP Berorientasi *Quality Tourism*
  - 4.4  
Desa Wisata dan Ekraf untuk Pariwisata Inklusif
  - 4.5  
Peran Bank Indonesia dalam Mendukung Pariwisata
- BOKS:**  
Kajian Penguatan Pariwisata Indonesia Melalui Pengembangan *Quality Tourism*

*Proses adaptasi masyarakat terhadap kondisi pandemi COVID-19 mendorong terjadinya pergeseran tren pengembangan pariwisata yang lebih mengedepankan pariwisata berkualitas atau *quality tourism* (QT) dan berkembangnya pola bekerja secara jarak jauh. Tren lain yang juga mengemuka di tengah pandemi adalah desa wisata yang terus berkembang di berbagai wilayah, yang didukung dengan munculnya desa wisata terbaik di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan di tingkat dunia. Lebih lanjut, pengembangan potensi ekonomi kreatif (ekraf) di destinasi wisata juga diarahkan untuk mendukung aktivitas wisata yang inklusif. Bank Indonesia terus bersinergi mendorong percepatan pemulihan dan pengembangan pariwisata, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.*

# 4.1 Pariwisata Berkelanjutan melalui *Quality Tourism*

Proses adaptasi masyarakat terhadap kondisi pandemi COVID-19 mendorong terjadinya pergeseran tren pengembangan pariwisata yang lebih mengedepankan pariwisata berkualitas atau *quality tourism* (QT). Pembatasan pergerakan manusia di seluruh dunia dan kekhawatiran terhadap COVID-19 menyebabkan keyakinan wisatawan untuk bepergian menjadi turun. Jumlah kunjungan wisman anjlok pada periode 2020-2021, sehingga berdampak pada penerimaan devisa pariwisata dan tekanan berat bagi perekonomian, khususnya bagi daerah yang merupakan basis wisata nasional. Lebih lanjut, proses adaptasi di masa pandemi mendorong preferensi wisatawan bergeser dan cenderung memilih destinasi yang jauh dari keramaian (*secluded*), berlokasi di alam terbuka, dan mengedepankan aspek *cleanliness, safety, health*, dan *environment sustainability* (CHSE).

Dinamika pemulihan pariwisata yang terjadi dengan disertai perubahan perilaku wisata secara global, menjadikan orientasi pengembangan pariwisata mulai mengarah pada QT. Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, pengembangan QT berkaitan erat dengan aspek *basic competitiveness, unique experience, high value* dan *sustainability*. Perhatian pada



Pulau Padar, Labuan Bajo, NTT



Komodo, Hewan Endemik NTT

QT dalam pengembangan pariwisata tidak terlepas dari mulai terlihatnya dampak negatif dari pengembangan pariwisata yang hanya berorientasi pada kuantitas (*mass tourism*). Kendati *mass tourism* dapat mewakili nilai inklusivitas pariwisata yang memungkinkan berbagai kelompok masyarakat melakukan kunjungan ke suatu destinasi wisata, namun sejumlah studi menunjukkan dampak negatif dari *mass tourism* terhadap kelestarian lingkungan dan sosial budaya<sup>14</sup>. Dalam kaitan ini, berbagai kajian juga mulai menunjukkan perhatian atau orientasi terhadap *quality tourism* yang berpeluang untuk memberikan

pendapatan devisa relatif lebih besar, dengan *multiplier effect* pada sektor lainnya yang lebih signifikan.

---

<sup>14</sup> Cracolici & Nijkamp, 2008; Croucha & Ritchie, 1999

**Pengembangan pariwisata yang mengarah pada orientasi QT sejalan dengan arah pengembangan pariwisata nasional pada RPJMN 2020 – 2024.** Peningkatan nilai tambah pariwisata yang lebih difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan dengan meningkatkan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas. Selain itu, pengembangan destinasi pariwisata diperkuat pada alam, budaya, dan MICE. Pemerintah juga terus berfokus untuk meningkatkan daya saing pariwisata nasional dan mendorong peningkatan target devisa dari pariwisata hingga 30 miliar dolar AS (meningkat 77% dibanding target devisa 2019). Berdasarkan tuntutan target tersebut, maka pengembangan

pariwisata Indonesia, selain harus berdasarkan asas keberlanjutan (*sustainable tourism*), juga harus dapat meningkatkan manfaat ekonomi, baik untuk masyarakat lokal maupun perekonomian yang direpresentasikan oleh kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan devisa.

---

*Quality Tourism menjadi arah pengembangan pariwisata nasional sejalan dengan RPJMN 2020-2024*

---



Untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pariwisata Indonesia, setidaknya terdapat lima pertimbangan terhadap pentingnya pengembangan pariwisata berorientasi QT. *Pertama*, pengembangan QT berpeluang untuk dapat meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia, yang meski sudah membaik pada 2021 namun masih memiliki sejumlah aspek yang memerlukan penguatan. *Kedua*, sejalan dengan semangat pariwisata berkelanjutan, QT menjadi pilihan untuk menghindari dampak negatif *mass tourism* terhadap kelestarian lingkungan dan sosial budaya. *Ketiga*, QT berpotensi lebih besar dalam menangkap peluang pergeseran preferensi pariwisata pasca pandemi COVID-19. *Keempat*, sejalan dengan RPJMN 2020-2024,

pengembangan QT diharapkan akan mendukung akselerasi pemulihan pariwisata pasca pandemi dan penguatan peran pariwisata ke depan. *Kelima*, pengembangan QT diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pariwisata Indonesia terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

---

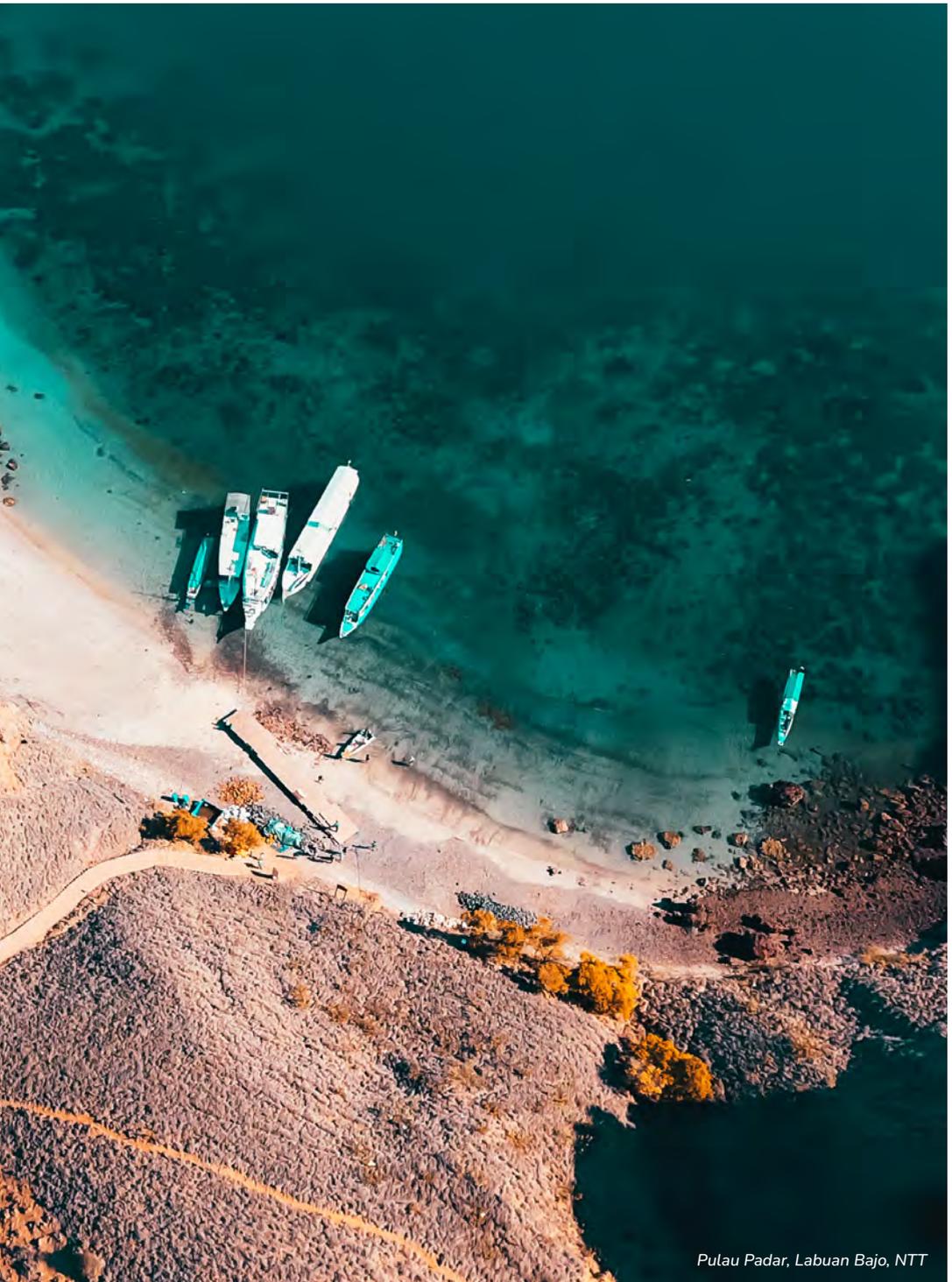
*Pengembangan QT berpeluang untuk dapat meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia sekaligus meningkatkan kontribusi pariwisata Indonesia terhadap perekonomian nasional*

---



Sejumlah upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan pariwisata yang lebih berorientasi QT. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menggulirkan program *Sustainable Tourism Development* (STDev) sejak tahun 2016, yang dijabarkan melalui program turunan seperti *Sustainable Tourism Destination* (STD), *Sustainable Tourism Observatory* (STO), *Sustainable Tourism Industry* (STI), *Sustainable Tourism Marketing* (STM), serta *Sustainable Tourism Certification* (STC). Pemerintah juga terus mendorong pengembangan desa wisata sebagai bagian dari *sustainable tourism*, antara lain melalui sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Village Certification*) terhadap 32 Desa Wisata di Indonesia. Dari sisi regulasi, pemerintah telah menyusun pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan melalui Peraturan Menteri Parekrif Nomor 9 Tahun 2021. Pedoman tersebut merupakan revisi dari Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Tahun 2016 yang telah disesuaikan dengan standar *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC) dan mendapat pengakuan dari *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO). Lebih lanjut, sinergi melalui Sekber Pariwisata juga diarahkan untuk mendorong berkembangnya QT dalam mendukung penguatan pariwisata ke depan. (Lihat Boks Kajian Penguatan Pariwisata Indonesia melalui Pengembangan *Quality Tourism*).



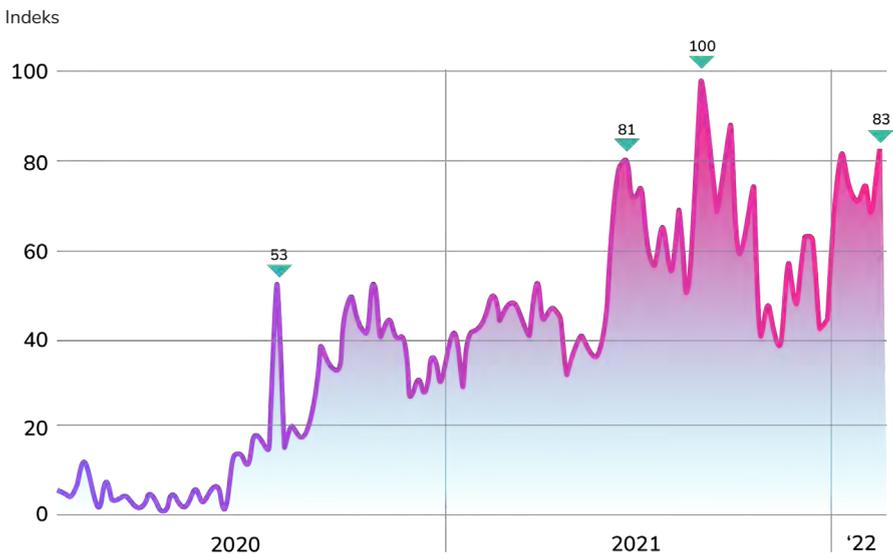


*Pulau Padar, Labuan Bajo, NTT*

# 4.2 Dari Bleisure ke Workcation

Proses adaptasi terhadap pandemi COVID-19 terutama dalam mengemukanya pola bekerja secara jarak jauh menjadi peluang yang dapat mendukung kinerja pariwisata ke depan. Pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembatasan mobilitas di sisi lain juga telah mengakselerasi perubahan pola budaya kerja yang semakin mengandalkan teknologi serta tidak lagi mengenal jarak dan waktu. Pekerja tidak lagi harus terpaku di satu tempat dalam satu waktu untuk menyelesaikan pekerjaan,

melainkan juga dapat dilakukan sembari berwisata. Tren 'workcation' merupakan perubahan konsep dalam bekerja, yang menggabungkan unsur liburan dengan bekerja. Berbagai survei yang dilakukan lembaga internasional memprakirakan tren workcation di berbagai negara akan tetap kuat ke depan. Hal ini terindikasi juga dari pencarian aktivitas terkait 'workcation' melalui mesin peramban daring yang menunjukkan akselerasi sejak 2020 (Grafik 4.1).

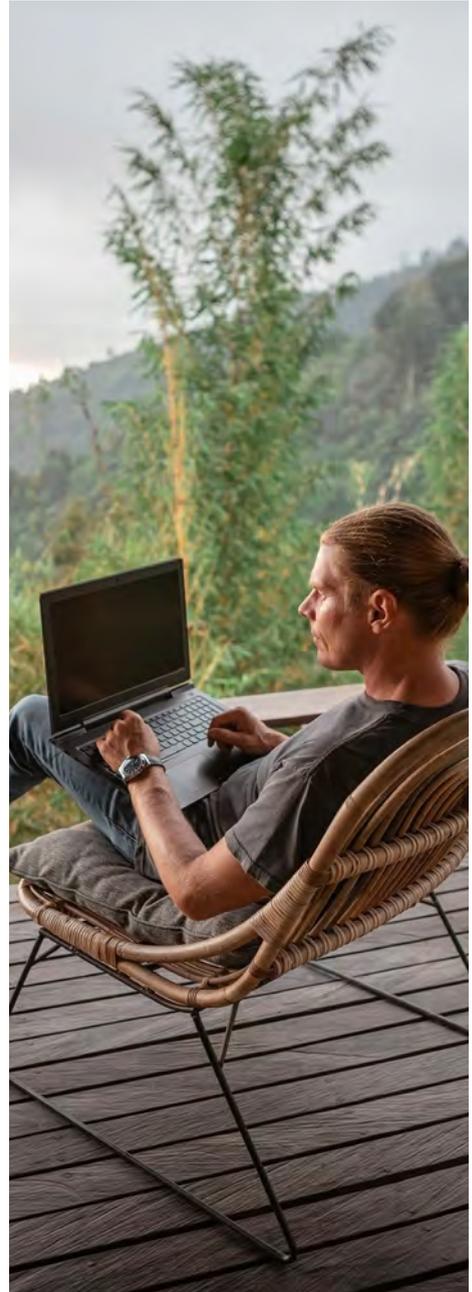


Sumber : Statista

Grafik 4.1 Volume Pencarian "Workcation"

Mengemukanya tren *'workcation'* dianggap sebagai evolusi dari *'bleisure'* yang merupakan kombinasi dari perjalanan bisnis dan wisata yang telah berkembang sebelum pandemi. Berkembangnya konsep *'bleisure'* sebelum pandemi diarahkan untuk mendorong wisman yang banyak, dikaitkan dengan penyelenggaraan MICE di destinasi wisata. Berkembangnya tren *'workcation'* di masa pandemi atau *digital nomad* diperkirakan dapat mendorong waktu tinggal wisman yang lebih panjang dan pengeluaran yang lebih besar. Saat ini diperkirakan sebanyak 35 juta orang secara global telah menerapkan pola bekerja secara *remote* atau *nomad*, dengan sebagian besarnya menjalani profesi di bidang marketing, teknologi informasi, desain, publikasi, dan *ecommerce*. Hasil survei juga mengindikasikan rata-rata pengeluaran para pelaku *digital nomad* sebesar 1.875 dolar AS per-orang setiap bulannya<sup>15</sup>. Potensi dari berkembangnya tren *workcation* atau *digital nomad* ini mendorong berbagai negara untuk mengeluarkan skema visa khusus dan/atau insentif. Pada Agustus 2022, Thailand resmi memperkenalkan fasilitas "Visa Emas" dengan masa izin tinggal 10 tahun untuk dapat menarik para profesional asing dengan gaji tinggi dunia bekerja secara *nomad* di Thailand. Skema visa yang dikeluarkan Thailand ini sekaligus berlaku untuk pemegang dan empat orang tanggungannya atau satu keluarga.

Langkah yang ditempuh Thailand ini menunjukkan semakin ketatnya persaingan untuk menarik wisatawan yang memiliki peluang *length of stay* lebih panjang dan *spending* lebih besar.



<sup>15</sup> ABrotherAbroad.com

PERINGKAT	DESTINASI	SKOR
1	Warsawa, Poland	4,89
2	Gran Canaria, Canary Islands	4,89
3	Da Nang, Vietnam	4,82
4	Lisbon, Portugal	4,81
5	Belgrade, Serbia	4,76
11	Seseh, Bali	4,64
40	Ubud, Bali	4,29
71	Seminyak, Bali	4,14

Sumber : Nomadlist, Juli 2022 diolah

Tabel 4.1. Peringkat Destinasi *Digital Nomad*

Bali sebagai destinasi wisata utama nasional merupakan salah satu destinasi favorit bagi para pelaku *digital nomad*. Mengacu pada survei yang dilakukan Nomadlist, terdapat tiga daerah di Bali yang masuk dalam 100 destinasi terfavorit bagi *digital nomad* di dunia (Tabel 4.1.). Hal ini terutama didukung aspek biaya hidup yang terjangkau, pilihan destinasi wisata yang beragam, dan indeks keamanan yang tinggi. Meski demikian, hasil survei tersebut menunjukkan tantangan terkait kecepatan internet dan minimnya fasilitas kesehatan menahan kenaikan peringkat Bali lebih lanjut. Mengemukanya tren *workcation* atau *digital nomad* ini dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi pemulihan pariwisata Indonesia, terutama untuk

meningkatkan kunjungan wisman dengan *length of stay* dan lebih panjang, ditengah persepsi positif terhadap Indonesia sebagai salah satu tujuan favorit untuk '*workcation*'.

**Kendati demikian, optimalisasi tren *workcation* perlu dilakukan dengan tetap memastikan aspek keamanan dan peran masyarakat lokal.** Setidaknya terdapat tiga hal yang tetap perlu menjadi perhatian dengan mengemukanya tren *workcation* atau *digital nomad*. *Pertama*, meningkatnya kunjungan *digital nomad* di suatu daerah dapat diikuti naiknya harga sewa properti seiring permintaan yang tinggi. Hal ini tentu akan menjadi suatu persoalan sendiri bagi penduduk lokal atau turis lokal untuk memperoleh hunian yang terjangkau. Pada beberapa kasus, kenaikan tidak hanya terjadi pada biaya hunian sewa tetapi juga harga jual properti di daerah yang menjadi tempat *workcation*. *Kedua*, para wisatawan *digital nomad* atau *nomadist* cenderung memiliki perhatian yang rendah terhadap nilai budaya yang berlaku di tempat tujuan. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik para *nomadist* yang fokus pada pekerjaannya sehingga perhatian terhadap nilai budaya setempat menjadi rendah. *Ketiga*, adanya kemungkinan para *nomadist* mencari pekerjaan lain di tempat tujuan sehingga dapat menjadi friksi dengan masyarakat lokal. Terkait hal ini, pengaturan regulasi terkait skema visa bagi para *nomadist* ini menjadi elemen penting, termasuk negara yang menjadi subyek skema visa *digital nomad*. Di beberapa negara yang telah menerapkan skema visa *digital nomad*,

aturan ketat diberlakukan dan hanya ditujukan bagi negara-negara tertentu – dengan potensi tingkat pengeluaran (*spending*) di destinasi yang biasanya sebagai pertimbangan.



Canggu, Bali

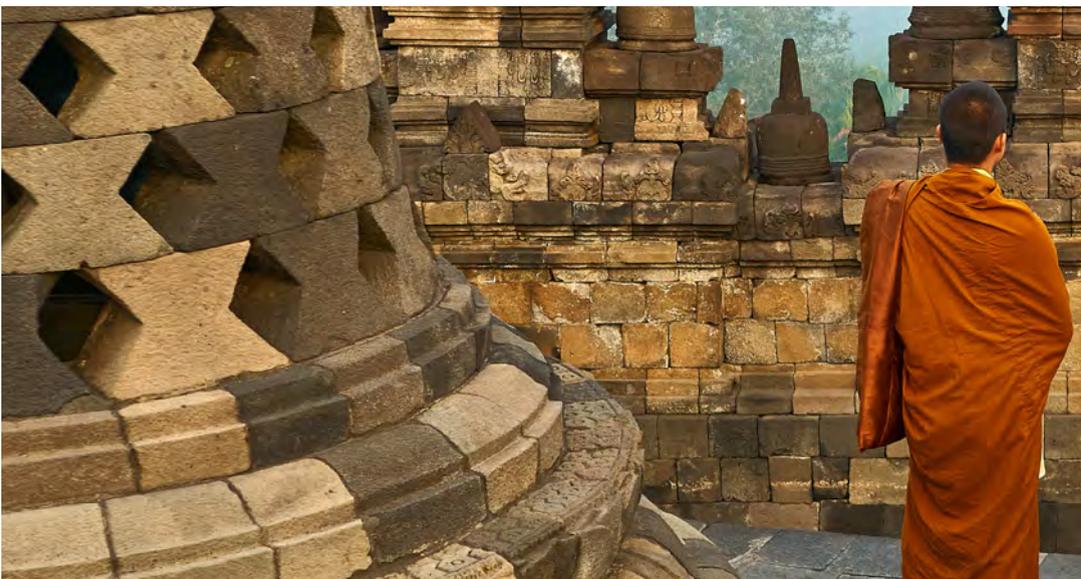
# 4.3

## Akselerasi Pengembangan DPSP Berorientasi *Quality Tourism*

Perkembangan tren pariwisata mengarah pada keberlanjutan. Hal ini salah satunya ditandai dengan Penilaian daya saing pariwisata oleh *World Economic Forum* sejak tahun 2019 telah dibaharui menjadi menjadi *Travel & Tourism Development Index (TTDI)*, yang mencakup juga aspek-aspek terkait keberlanjutan. Berangkat dari kesadaran tersebut, pengembangan DPSP juga dituntut untuk mengedepankan QT terutama pada tiga aspek yaitu *environmental sustainability, socioeconomic resilience and conditions travel*, dan *tourism demand pressure and*

*impact*. Berdasarkan asesmen awal yang dilakukan Sekber Pariwisata, masih terdapat sejumlah aspek terkait QT yang perlu diperkuat dalam pengembangan DPSP, termasuk indikator atraksi, pengelolaan destinasi berkelanjutan, dan aksesibilitas.

Dalam pengembangan Danau Toba penguatan QT lebih difokuskan pada atraksi, akomodasi, dan infrastruktur transportasi. Salah satu pengembangan atraksi dilakukan melalui rencana penyelenggaraan



F1H20 yang akan menjadi event tahunan untuk mendukung keberagaman atraksi, selain atraksi alam dan budaya yang saat ini telah ada. Dalam hal pengembangan akomodasi dilakukan melalui percepatan investasi akomodasi di lahan Otorita Danau Toba, termasuk untuk investasi akomodasi premium. Fokus ketiga berkaitan dengan penguatan aksesibilitas melalui pembangunan infrastruktur transportasi dasar di lahan Otorita Danau Toba. Penyelesaian ketiga isu utama tersebut sebagai langkah awal yang menjadi prioritas untuk mendukung perbaikan aspek QT dari Danau Toba.

**Pengembangan QT di Borobudur difokuskan pada peningkatan aksesibilitas, atraksi, dan penetapan *carrying capacity*.** Peningkatan aksesibilitas di destinasi ini dilakukan melalui penguatan penataan dan pengelolaan Kawasan Borobudur yang terintegrasi dan terkoneksi, termasuk pemenuhan *Heritage Impact Assesment*

(HIA) oleh pemerintah daerah untuk izin pembangunan di dalam kawasan Borobudur. Pemenuhan dokumen HIA ini juga akan dapat mengakselerasi pengembangan atraksi dan memenuhi aspek keberlanjutan lingkungan di dalam kawasan Borobudur, termasuk pengelolaan sampah yang saat ini masih menjadi tantangan. Mengingat Borobudur merupakan warisan budaya maka aspek keberlanjutan dilakukan melalui penetapan *carrying capacity* yang mengatur jumlah pengunjung di kawasan Borobudur, selaras dengan aspek kelestarian lingkungan dan warisan budaya.

---

*Pengembangan DPSP mengarah pada penerapan prinsip-prinsip Quality Tourism*

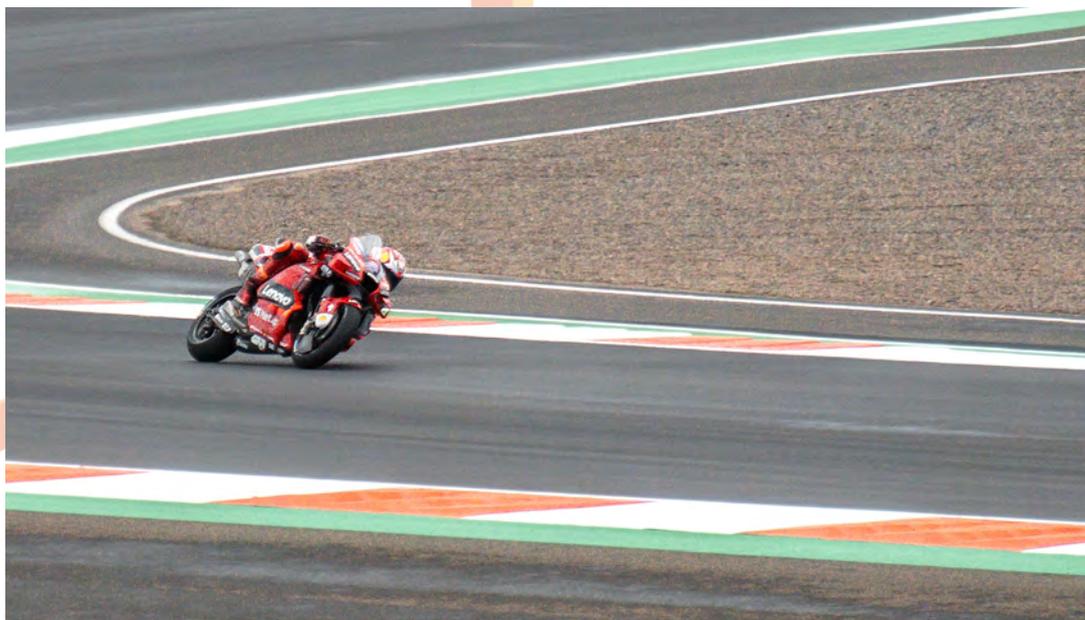
---



Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah

**Pengembangan QT di Mandalika berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan atraksi.**

Peningkatan aksesibilitas utamanya ditargetkan untuk penyelesaian pembangunan jalan Kuta-Keruak untuk mendukung aksesibilitas dari kawasan sirkuit Mandalika ke destinasi alam sekitar lainnya. Penguatan konektivitas ini juga ditempuh dengan penataan daerah sekitar guna memastikan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, untuk meningkatkan atraksi dilakukan melalui pengembangan desa wisata berbasis budaya. Arah pengembangan desa wisata mempertimbangkan keberagaman atraksi antar desa wisata di sekitar agar memiliki daya tarik yang tinggi bagi wisatawan.



**Pengembangan Labuan Bajo** diarahkan juga untuk memperkuat aspek QT terutama melalui peningkatan aksesibilitas dan atraksi. Peningkatan aksesibilitas dilakukan melalui pembangunan akses jalan di kawasan Otorita Labuan Bajo. Penyelesaian akses jalan di kawasan otorita, sekaligus akan mendukung pengembangan berbagai atraksi di dalam kawasan. Selanjutnya untuk mendukung peningkatan atraksi, isu utama yang akan menjadi fokus penyelesaian adalah berkaitan dengan penataan pengelolaan aset kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) di Labuan Bajo. Pengelolaan aset ini menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan pemeliharaan berbagai atraksi buatan manusia dan budaya yang telah terbangun.

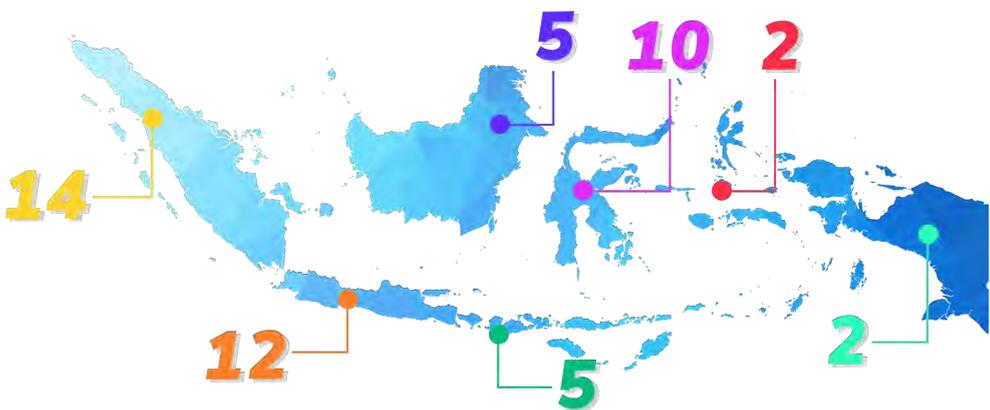
**Peningkatan aksesibilitas, atraksi dan keberlanjutan lingkungan** menjadi fokus dalam pengembangan destinasi berkualitas di Likupang. Sebagai prioritas, peningkatan aksesibilitas ditargetkan melalui pembangunan akses jalan di Pulau Bangka yang akan menghubungkan berbagai moda transportasi, termasuk pengembangan trotoar untuk pejalan kaki. Selanjutnya, untuk mendukung pengembangan atraksi akan dibangun museum budaya, pusat *diving*, dan penataan kawasan pantai. Di samping itu, pengembangan desa wisata akan terus dilakukan untuk mendukung pengembangan ragam atraksi sebagai alternatif wisata di Pulau Bangka. Untuk meningkatkan aspek keberlanjutan lingkungan, fokus pengembangan dilakukan pada isu pengelolaan sampah yang berorientasi sirkular. Ditargetkan agar pengelolaan sampah dapat 100% mengakomodir produksi sampah.



# 4.4 Desa Wisata dan Ekraf untuk Pariwisata Inklusif

Tren lain yang juga mengemuka di tengah pandemi adalah desa wisata yang terus berkembang di berbagai wilayah. Hal ini sejalan dengan penguatan tren pariwisata yang mengarah pada pariwisata yang berkesinambungan dan inklusif. Kementerian Desa-PDTT mencatat bahwa lebih dari 6.900 desa wisata telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Grafik 4.2.). Sebagian dari ribuan desa wisata tersebut berpotensi menjadi desa wisata unggul berdasarkan kategori Anugerah Desa Wisata (ADWI) - (Gambar 4.1.). Ribuan desa wisata tersebut masuk ke

dalam kategori unggul berdasarkan ADWI mengacu pada tiga kriteria yakni: (i) atraksi yang mendorong daya tarik pengunjung, (ii) amenities yang mencakup souvenir, *homestay*, toilet umum, dan penerapan CHSE, (iii) digital dan kreatif, serta (iv) kelembagaan.



Angka adalah jumlah desa wisata  
Sumber : Kemenparekraf, diolah

Gambar 4.1. Lima puluh Besar Desa Wisata Nominasi ADWI 2022 Berdasarkan Wilayah



Sumber : Kemparekraf & Kemendes, diolah

Grafik 4.2. Total Desa Wisata di Indonesia

Dukungan yang besar pada pengembangan desa wisata turut mendorong munculnya desa wisata terbaik di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan di tingkat dunia. Salah satu kisah sukses pengembangan desa wisata adalah Desa Wisata Nglangeran di Yogyakarta (DIY) yang dinobatkan sebagai desa wisata terbaik dari UNWTO pada tahun 2021. Desa wisata tersebut memiliki atraksi utama yakni gunung api purba sebagai ikon wisata daerah tersebut, serta menawarkan kuliner yang menarik berbasis olahan coklat. Pengembangan atraksi terus dilakukan oleh masyarakat desa wisata ini untuk dapat menyuguhkan atraksi yang terintegrasi, bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Desa wisata lain yang juga dinobatkan sebagai nominasi *Best Tourism Village* oleh UNWTO pada tahun 2021 adalah Desa Wisata Tetebatu di Nusa Tenggara Barat, dengan kekayaan alam Hutan Tetebatu selatan Rinjani yang berkontribusi dalam menghambat perubahan iklim

dan keasliannya yang masih terjaga. Terdapat pula Desa Wisata Wae Rebo di Nusa Tenggara Timur, dengan berbagai keunikannya seperti kain tenun, Tarian Caci, dan Mbaru Niang.



---

## Pengembangan desa wisata dilakukan sebagai bagian dalam pengembangan DPSP

---

Pemerintah terus mengakselerasi pengembangan desa wisata untuk menangkap peluang dari tren pariwisata, sekaligus juga mengedepankan aspek kesinambungan dan inklusif. Pengembangan desa wisata juga dilakukan sebagai bagian dalam pengembangan DPSP. Salah satu strategi yang dilakukan yakni melalui tahapan pola pengembangan berdasarkan tingkat kematangan desa wisata, yakni desa wisata rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Sejalan dengan itu, pengembangan dilakukan melalui model pendampingan dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, dan perguruan tinggi; sertifikasi dan *monitoring*; peningkatan promosi dan pemasaran hingga pemanfaatan

platform digital; serta pengembangan model bisnis dalam pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan. Dalam implementasinya, strategi ini ditempuh antara lain melalui *workshop* promosi konten wisata, pendampingan promosi, fotografi, hingga *story telling* seperti yang dilakukan di kawasan Mandalika; kerjasama dengan *content creator* dan *influencer* sebagaimana dilakukan di Desa Wisata Cikolelet; serta pembuatan aplikasi desa wisata seperti di Desa Wisata Tilanah di DIY. Bank Indonesia juga turut mendorong akselerasi pengembangan desa wisata, melalui fasilitasi pengembangan UMKM dan digitalisasi transaksi pembayaran melalui QRIS, sebagai bagian dalam mendukung berkembangnya ekosistem desa wisata. Selanjutnya, pemberdayaan komunitas lokal dan dukungan kelembagaan juga terus ditempuh untuk mendukung akselerasi peranan desa wisata dalam mendorong pariwisata nasional.



Pertunjukan Gendang Beleg, Dusun Sasak, Sade, Lombok, NTB



*Desa Wisata Wae Rebo, Flores, NTT*



Proses Pembuatan Kain Batik Tulis, Imogiri, Yogyakarta

Lebih lanjut, pengembangan potensi ekonomi kreatif (ekraf) di destinasi wisata juga diarahkan untuk mendukung aktivitas wisata yang inklusif. Potensi ekraf yang besar tercermin dari kontribusi ekraf terhadap perekonomian yang mencapai 7,0% PDB pada 2021 dengan tren PDB ekraf yang juga terus meningkat. Sejalan dengan itu, nilai pangsa subsektor ekraf didominasi oleh kuliner (41,3%), fesyen (18,2%), dan kriya (15,1%) yang juga berkaitan erat dengan aktivitas pariwisata. Pengembangan potensi ekraf yang terus dilakukan diarahkan untuk dapat turut mengakselerasi pemulihan dan penguatan ekonomi, didukung adopsi teknologi sehingga pada gilirannya mendorong inklusivitas dari aktivitas pariwisata.

Ke depan, pengembangan ekraf terus dilakukan melalui berbagai strategi yang terintegrasi. Pengembangan potensi ekraf dalam mendukung pariwisata dilakukan sebagai bagian dari kerangka penguatan aksesibilitas, atraksi, amenities, promosi dan pelaku (3A2P). Strategi tersebut diantaranya ditempuh melalui: (i) penguatan konten dan kemasan pariwisata dengan dukungan ekraf; (ii) inovasi produk kreatif berbasis keunggulan lokal; (iii) dukungan dan bantuan modal kerja; (iv) *upskilling* dan *reskilling* SDM ekraf dan digital, serta pendampingan dan penciptaan produk kreatif. Selain itu, inisiatif pembentukan Komite Ekonomi Kreatif (KEK) di daerah diarahkan untuk dapat lebih mengintegrasikan strategi pengembangan ekraf melalui penyusunan peta jalan, rancangan program prioritas, serta menjadi wadah untuk menampung aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan.



Sumber : Bank Indonesia

Gambar 4.2. Kluster UMKM Ekraf Binaan Bank Indonesia

Pengembangan potensi ekraf di berbagai daerah juga tercermin dari inisiatif pembentukan *creative hub* di berbagai daerah. Pemerintah juga telah mempromosikan ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan di masa pandemi, di antaranya melalui konferensi internasional *Connecting City 2022*. Lebih lanjut, Bank Indonesia turut mendukung pengembangan ekraf melalui

pendekatan program pengembangan kluster UMKM pendukung yang telah diimplementasikan di berbagai destinasi wisata (Gambar 4.2.), serta pengembangan implementasi QRIS dalam mendukung efisiensi ekraf di destinasi wisata.

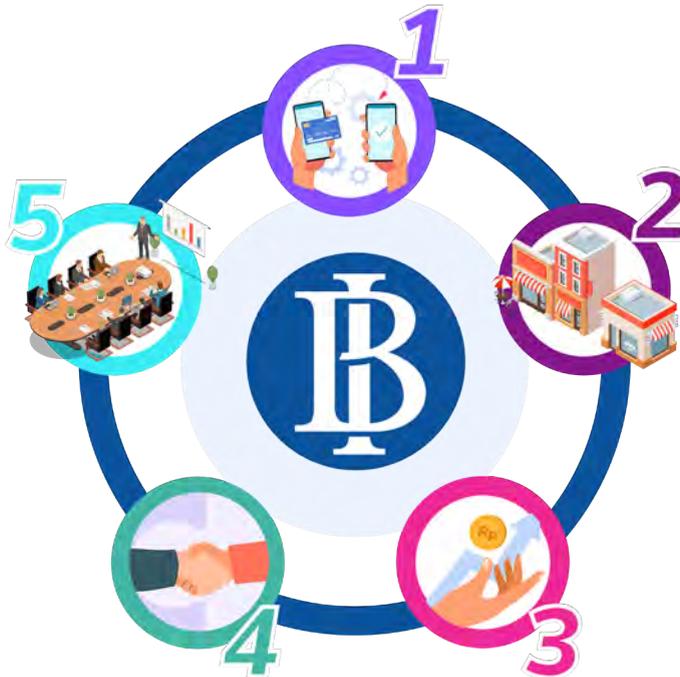
# 4.5 Peran Bank Indonesia dalam Mendukung Pariwisata

Bank Indonesia terus bersinergi mendukung percepatan pemulihan dan pengembangan pariwisata untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Hal ini mempertimbangkan peran strategis pariwisata bagi perekonomian, baik dampaknya dalam menggerakkan berbagai sektor ekonomi maupun mendukung ketahanan sektor eksternal melalui kontribusinya dalam penerimaan devisa. Dukungan Bank Indonesia dalam percepatan pemulihan pariwisata dan pengembangannya ke depan ditempuh melalui akselerasi

digitalisasi sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital, pengembangan UMKM pendukung pariwisata dan ekraf untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dukungan fasilitas promosi melalui jaringan kantor perwakilan Bank Indonesia di dalam dan luar negeri, dan turut mendorong peningkatan pembiayaan UMKM, disertai penguatan sinergi kebijakan terutama dalam kerangka Sekber Pariwisata (Gambar 4.3.).



Gedung Cagar Budaya dan Memorabilia Bank Indonesia, Bandung, Jawa Barat



1

### DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI

Memperluas penggunaan transaksi non-tunai, terutama QRIS, pada aktivitas pariwisata secara *end-to-end*, termasuk memanfaatkan potensi QRIS *cross-border*

2

### PENGEMBANGAN UMKM PENDUKUNG PARIWISATA

Mendukung perkembangan UMKM, termasuk UMKM pendukung pariwisata melalui 3 model bisnis agar naik tahapan dan tetap bertahan di masa pandemi.

- **MB-1** : UMKM yang menjual produknya langsung kepada wisatawan
- **MB-2** : UMKM yang *men-supply* produknya melalui pelaku usaha pariwisata
- **MB-3** : UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem wisata, termasuk di desa wisata

3

### AKSELERASI PEMBIAYAAN SEKTOR PRIORITAS

Kebijakan insentif GWM kepada perbankan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan terhadap sektor prioritas, termasuk terkait pariwisata. Selain itu, mendorong perbankan untuk meningkatkan rasio pembiayaan kepada UMKM, termasuk UMKM pariwisata, melalui RPIM

4

### PROMOSI INVESTASI SEKTOR PARIWISATA

Melakukan sinergi dan kolaborasi dalam mempromosikan sejumlah proyek investasi terkait pariwisata melalui *linkage* IRU-RIRU-GIRU baik dalam hal pembangunan/ pengembangan amenities, atraksi maupun aksesibilitas ke lokasi wisata.

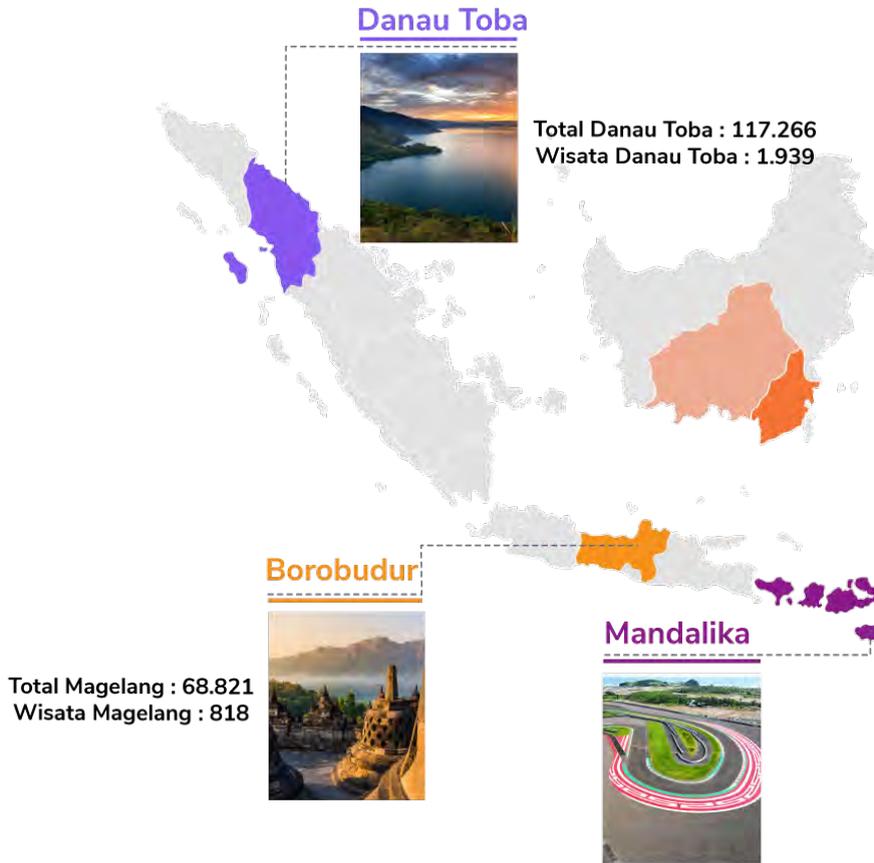
5

### KOORDINASI DAN SINERGI KEBIJAKAN

Memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan melalui Tim Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Pariwisata a.l penyusunan kajian

Sumber : Bank Indonesia

Gambar 4.3. Strategi yang Ditempuh Bank Indonesia dalam Mendukung Percepatan Pemulihan dan Pengembangan Pariwisata



Sumber : Bank Indonesia, Agustus 2022

Gambar 4.4. Jumlah UMKM Pengguna QRIS di Wilayah DPSP

**Digitalisasi sistem pembayaran akan terus didorong secara end-to-end, termasuk untuk mendukung transaksi ritel di sektor terkait pariwisata.** Hal ini dilakukan dengan memperluas penggunaan *Quick Response Indonesia Standard (QRIS)* baik dari sisi *merchant/UMKM*, sisi pengguna maupun transaksi. Hingga akhir September 2022, total pengguna QRIS secara nasional telah mencapai lebih dari 25,1 juta, dengan jumlah *merchant* mencapai 21,6 juta. Sebanyak 90,3% di antara *merchant* tersebut merupakan

*merchant* kategori UMKM, termasuk di dalamnya *merchant* di kawasan pariwisata yang terus meningkat (Gambar 4.4.). Bank Indonesia menargetkan total pengguna QRIS mencapai 26 juta pada akhir tahun 2022 dengan 15 juta tambahan pengguna baru QRIS sepanjang tahun 2022. Untuk mendukung perluasan QRIS tersebut, penambahan fitur QRIS terus dilakukan, antara lain implementasi QRIS Antarnegara. Pada 29 Agustus 2022, implementasi QRIS Antarnegara antara Indonesia

## Likupang



**Total Minahasa Utara : 13.433**  
**Wisata Minahasa Utara : 543**

## Labuan Bajo

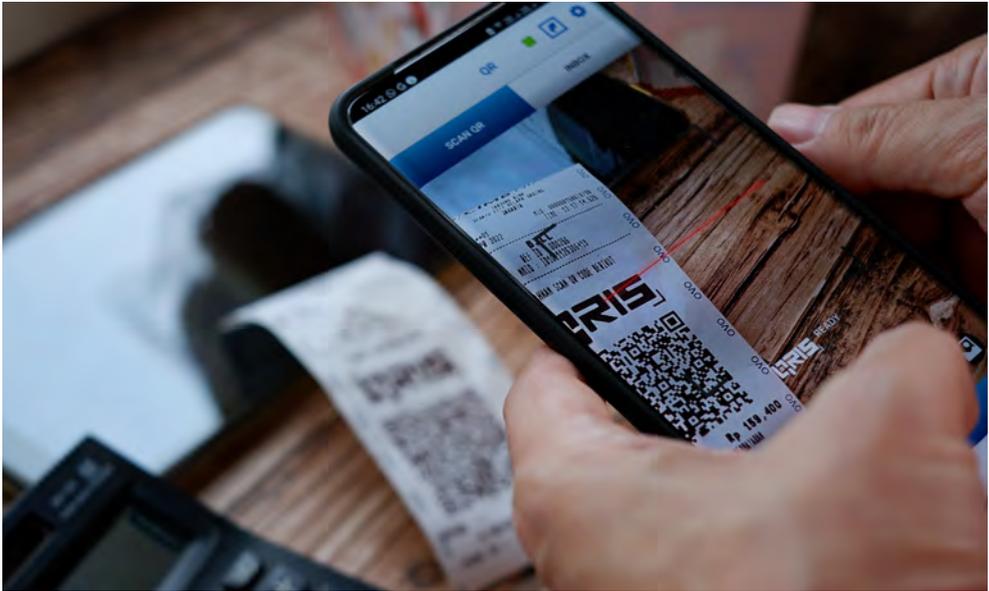


**Total Manggarai Barat : 6.814**  
**Wisata Manggarai Barat : 802**

**Total Lombok Tengah : 22.721**  
**Wisata Lombok Tengah : 726**

dengan Thailand telah diresmikan oleh Presiden RI, setelah sebelumnya diinisiasi dengan tahap uji coba sejak Agustus 2021. Melalui inisiatif ini, wisman asal Thailand dapat menggunakan aplikasi pembayaran Thailand dari penyelenggara yang telah bergabung dalam skema QRIS Antarnegara untuk melakukan transaksi pembayaran dengan memindai QRIS pada *merchant* QRIS Indonesia (berlaku pula sebaliknya).

QRIS Antarnegara akan terus diperluas baik dari sisi penyelenggara, transaksi, dan kerjasama dengan negara mitra lainnya, khususnya di Kawasan ASEAN. Saat ini QRIS Antarnegara dengan Malaysia sedang dalam tahap uji coba, dan kerjasama QRIS Antarnegara dengan Singapura tengah diinisiasi.



**Pengembangan UMKM pendukung pariwisata terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan mendukung ekonomi yang lebih inklusif.** Bank Indonesia melalui jaringan kantor di berbagai daerah terus melakukan pendampingan UMKM pendukung pariwisata secara *end-to-end*. Hal tersebut diwujudkan melalui tiga model bisnis: (i) penjualan langsung kepada wisman; (ii) memasok produk/jasa kepada industri pariwisata, antara lain hotel dan restoran; dan (iii) sebagai bagian dari ekosistem obyek wisata, antara lain desa wisata. Ketiga model bisnis tersebut juga diarahkan untuk memperkuat aspek digitalisasi. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia melalui seluruh kantor perwakilan di daerah melaksanakan program peningkatan kapasitas, kurasi produk, program *onboarding* UMKM, dan fasilitasi akses pasar kepada UMKM pendukung pariwisata. Sebagai bentuk konkritnya, sejumlah program pada sisi hulu

dilaksanakan antara lain melalui pelatihan pengelolaan aset digital dan pemasaran, pelatihan *customer service*, *sales*, dan penyempurnaan proses bisnis, dukungan sarana dan prasarana, termasuk dukungan dalam penerapan sertifikasi *cleanliness* (kebersihan), *health* (kesehatan), *safety* (keamanan), dan *environment sustainability* atau CHSE dan sertifikasi lain seperti SNI/HKI. Pada sisi proses, juga dilakukan pelatihan pencatatan transaksi keuangan, fasilitasi adopsi pembayaran nontunai, dan pendampingan pengembangan paket dan potensi wisata, digitalisasi promosi, kerjasama dengan pelaku *travel agent* digital (OTA). Pada sisi hilir, dilakukan *link and match* dengan industri pariwisata, fasilitasi *business matching*, serta fasilitasi *onboarding homestay* di wilayah DPSP dan/atau daerah penyangga dalam OTA.

Bank Indonesia juga terus mendorong peningkatan pembiayaan sektor prioritas, termasuk terkait pariwisata, bersinergi dengan otoritas terkait lain. Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, sejak awal 2022 Bank Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan makroprudensial akomodatif. Bank Indonesia menerbitkan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)<sup>16</sup> bagi perbankan untuk mendorong penyaluran kredit kepada UMKM, termasuk kepada UMKM pendukung pariwisata. Selain itu Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan insentif yang berbentuk pelonggaran atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah kepada bank yang memberikan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target RPIM. Melalui kebijakan ini, penyaluran kredit perbankan kepada sektor terkait pariwisata diharapkan dapat meningkat.



**16** Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) merupakan rasio yang menggambarkan porsi penyediaan dana yang diberikan Bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) dalam rupiah dan valuta asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.



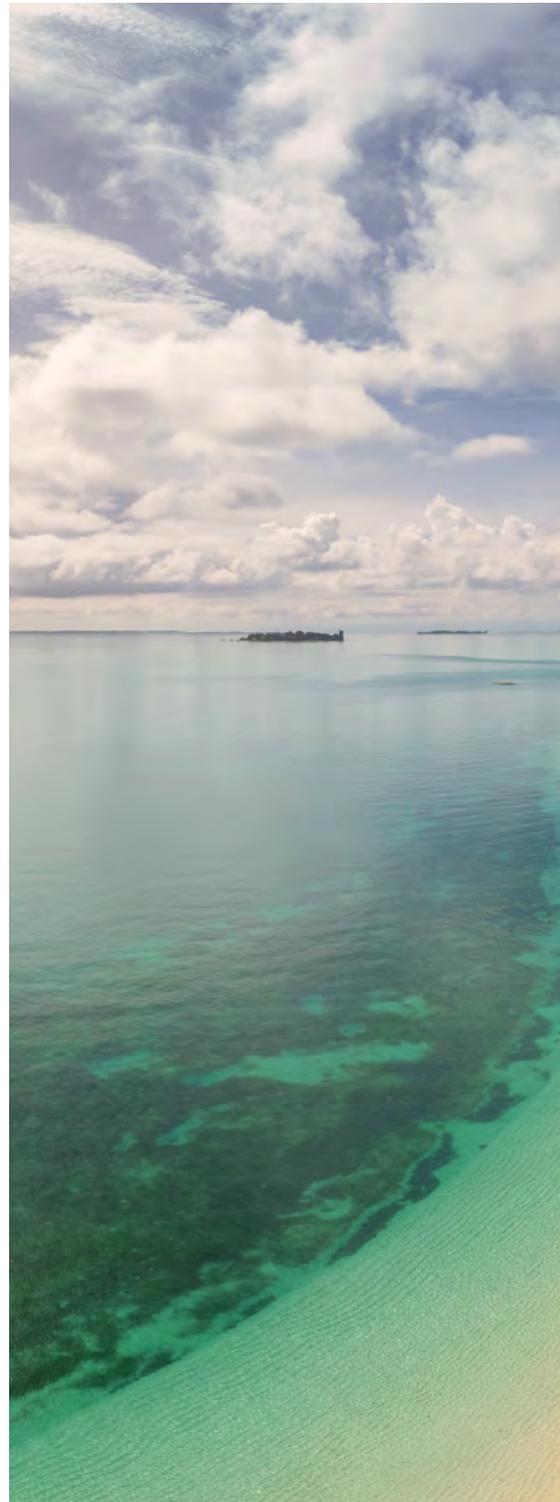
**Dukungan terhadap fasilitasi promosi investasi terkait sektor pariwisata juga ditempuh Bank Indonesia.** Fasilitasi promosi investasi dilakukan dalam kerangka *linkage* IRU-RIRU-GIRU<sup>17</sup>, promosi proyek investasi terkait pariwisata, termasuk pembangunan/pengembangan amenitas, atraksi, maupun aksesibilitas. Pada 2021, Bank Indonesia melalui IRU-RIRU-GIRU bersama lembaga terkait menyelenggarakan tiga event promosi investasi terkait pariwisata, yakni: (i) *InSight Webinar: Investment Opportunities in Tourism Sector* di Singapura; (ii) *Indonesia Corporation Forum on Investment Trade, Culture,*

*and Tourism* di Chongqing; dan (iii) *Indonesia: Opportunities in Tourism Development and Infrastructure* di New York. Melalui kegiatan tersebut, Bank Indonesia turut mempromosikan potensi investasi antara lain terkait Borobudur Highland, The Mandalika, The Tanamori, Labuan Bajo, KEK Likupang, Walini Eco Valley, dan Ciater Agrotourism. Pada tahun 2022 Bank Indonesia melalui *linkage* RIRU-GIRU juga menyelenggarakan kegiatan *Webinar Exploring Wakatobi: The World Hidden Marine Heritage* untuk mendukung promosi destinasi wisata di Indonesia khususnya Wakatobi, termasuk peluang investasinya.



Rakor High Level Sekber Pariwisata, Oktober 2022

**Penguatan sektor pariwisata terus ditempuh melalui sinergi terutama dalam kerangka Sekber Pariwisata.** Pada 2019, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Bank Indonesia, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyepakati pembentukan Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata (Sekber Pariwisata). Sekber Pariwisata ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan dalam rangka percepatan pengembangan sektor pariwisata, serta menetapkan landasan dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi kebijakan percepatan pengembangan sektor pariwisata. Melalui kesepakatan tersebut, sinergi melalui Sekber Pariwisata dilakukan antara lain dengan melaksanakan pertemuan koordinasi untuk merumuskan opsi kebijakan dan program prioritas, penguatan dukungan data dan informasi, asesmen, dan kajian. Koordinasi dalam Sekber Pariwisata semakin intensif dilakukan untuk mendorong pemulihan pariwisata di masa pandemi COVID-19, serta upaya untuk tetap memperkuat strategi untuk membangkitkan kinerja pariwisata pasca pandemi, termasuk dengan mempercepat pengembangan DPSP.





*Pulau Dodola, Morotai, Maluku Utara*

# **BOKS:** **Kajian Penguatan Pariwisata Indonesia Melalui Pengembangan Quality Tourism**

**Konsep pariwisata berkualitas (QT) memiliki definisi yang luas dan berbeda bagi setiap orang.** Sebagian besar literatur menyebutkan kriteria kualitas dalam pariwisata sangat terkait dengan aspek pariwisata keberlanjutan. Theng, Qiong & Tatar (2015), Holloway, dkk. (2009), dan Markplus (2020) menyatakan bahwa kriteria utama dari QT adalah aspek pemenuhan pariwisata berkelanjutan berkaitan dengan manfaat bagi ekonomi masyarakat lokal dan pada saat yang bersamaan dapat tetap memerhatikan kelestarian lingkungan dan budaya. Hasil diskusi terfokus yang dilakukan oleh Sekber Pariwisata bersama dengan pakar pariwisata nasional menyimpulkan aspek terpenting dari pariwisata yang berkualitas adalah pariwisata yang menjunjung tinggi norma kepariwisataan Indonesia, yaitu menjunjung tinggi kearifan masyarakat lokal, berwawasan budaya, dan lingkungan. Beberapa literatur seperti Perdue, Long & Yang (1999), serta Theng, Qiong & Tatar (2015) menyatakan bahwa salah satu karakteristik dari QT adalah adanya pengalaman yang unik yang dapat

diukur dari kepuasan wisatawan hasil interaksi dengan penyedia layanan wisata di destinasi. Selain aspek keberlanjutan dan pengalaman unik, beberapa literatur juga menyebutkan kriteria kemampuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar sebagai imbalan dari nilai tambah yang tinggi (*high value*) yang dirasakan oleh wisatawan pada destinasi QT. Penelitian MarkPlus (2020) menyatakan bahwa QT merupakan irisan antara pariwisata berkelanjutan dengan pariwisata premium (*luxury tourism*), sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar, namun tetap memerhatikan aspek keberlanjutan, termasuk kelestarian lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

---

*Kajian Bank Indonesia: Penguatan Pariwisata Indonesia melalui Pengembangan Quality Tourism, 2020*



Likupang, Sulawesi Utara



Sumber : Bank Indonesia

Gambar 4.5. Faktor-faktor Pembentuk Quality Tourism

Destinasi dan pelaku pariwisata mampu memberikan kepuasan wisatawan



Untuk menjadi pariwisata yang berkualitas, destinasi wisata harus tetap memiliki daya saing dasar sebagai prasyarat utama. Konsep resmi dari UNWTO terkait QT tercantum dalam *Practical Guidelines for Integrated Quality Management in Tourism Destinations* (UNWTO, 2017), menyatakan bahwa kualitas dari destinasi wisata merupakan hasil dari proses yang mempertemukan kepuasan atas produk dan layanan pariwisata, dengan harapan konsumen pada tingkat harga yang dapat diterima, sesuai dengan kriteria yang disepakati bersama dan

memerhatikan faktor-faktor dasar dalam layanan pariwisata, yaitu keselamatan, keamanan, kebersihan, aksesibilitas, komunikasi, infrastruktur, serta fasilitas dan layanan umum. Konsep ini menunjukkan bahwa faktor-faktor dasar pariwisata dari suatu destinasi menjadi prasyarat bagi pariwisata berkualitas.

Secara keseluruhan, esensi pengembangan QT berkaitan dengan empat faktor utama. Pertama, faktor dasar (*basic competitiveness*) yang harus dipenuhi suatu destinasi untuk menjadi destinasi wisata yang berdaya

# TOURISM



## DEMAND (Kepuasan wisatawan)



← Kepuasan wisatawan harus memperhatikan aspek *sustainability* dan kesejahteraan masyarakat lokal

saing. *Kedua*, faktor *sustainability* yang mendukung keberlangsungan lingkungan, nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, sejarah, dan pengetahuan pada suatu destinasi. *Ketiga*, faktor *unique experience* dari suatu destinasi yang memberikan pengalaman yang jarang ditemukan di destinasi lainnya. *Terakhir*, faktor aktivitas wisata bernilai tinggi bagi wisatawan (*high value tourism*) yang dapat memberikan pengalaman bernilai tinggi, adanya eksklusivitas dari produk dan layanan pariwisata, serta *privacy* dan *premiumness*. Keempat faktor tersebut kemudian diturunkan menjadi berbagai

indikator pendukung (Gambar 4.5.). Indikator faktor dasar mengadopsi indikator pada studi *Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI)* oleh *World Economic Forum*. Indikator *sustainability* mengadopsi indikator pada studi GSTC terkait *GSTC Standards on Sustainable Tourism* dan Peraturan Menteri Pariwisata No.14 tahun 2016. Sementara itu, indikator *unique experience* dan *high value* diadopsi dari berbagai studi literatur.



**Faktor sustainabilitas dinilai sebagai faktor terpenting dalam membangun pariwisata yang berkualitas.** Bobot untuk masing-masing faktor dan indikator QT ditentukan melalui survei terhadap 44 pakar pariwisata. kemudian diolah menggunakan metode *confirmatory factor analysis* atau metode analisis faktor yang digunakan

untuk menguji konsistensi dari hubungan antar variabel terhadap sebuah model/konstruksi yang sudah dispesifikasikan berdasarkan teori atau pengetahuan terdahulu/*priori information* (Brown, 2015).

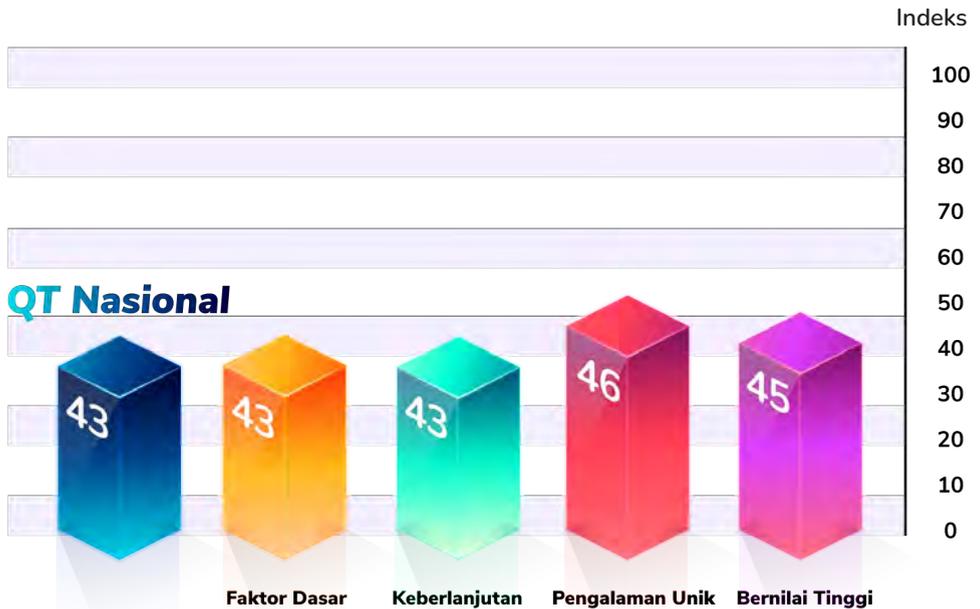


Secara total, terdapat 69 dari 88 indikator awal yang memiliki *factor loading* di atas 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut dapat dikatakan memiliki hubungan yang kuat terhadap faktornya. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, pada *layer* 1 ditemukan bahwa faktor dengan

bobot terbesar dalam membentuk QT adalah faktor *sustainability* (63,7%), diikuti oleh faktor *unique experience* (18,7%), faktor daya saing dasar (10,1%), dan faktor *high value* (7,5%).

Selanjutnya, dilakukan survei secara paralel untuk mengukur indikator QT pada beberapa destinasi utama nasional. Survei dilakukan terhadap 349 responden yang terdiri atas pelaku usaha, pemangku kebijakan, maupun akademisi di 10 destinasi wisata utama yakni Danau Toba, Bintan, DKI Jakarta, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Nusa Dua, Ubud, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Hasil survei kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengidentifikasi kekuatan maupun peluang perbaikan masing-masing destinasi wisata dan menghasilkan indeks QT.

Secara umum, hasil pengukuran indeks QT menunjukkan pengembangan QT di destinasi wisata nasional masih memerlukan penguatan (Grafik 4.3.). Prioritas perbaikan terutama terdapat pada faktor sustainabilitas dan faktor daya saing dasar yang menghasilkan angka indeks paling rendah. Kendati demikian, Nusa Dua dan Ubud merupakan dua destinasi dengan indeks QT paling baik. Sementara itu, Manado dan sekitarnya, Lombok dan sekitarnya, serta Danau Toba secara berurutan berada pada peringkat tiga terbawah.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.3. Performa Quality Tourism Nasional

Ke depan, indikator QT dapat dipertajam untuk digunakan sebagai acuan dalam *monitoring* pembangunan destinasi pariwisata prioritas. Sejalan dengan pembangunan pariwisata ke depan yang diarahkan pada pembangunan pariwisata berkualitas, maka indikator QT yang telah disusun dalam kajian dapat diimplementasikan untuk *monitoring* pembangunan destinasi pariwisata prioritas dengan sejumlah penajaman serta dukungan data sekunder yang tersedia. Penggunaan indikator QT diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai aspek, baik yang telah memiliki kesesuaian maupun aspek-aspek yang belum sesuai di masing-masing destinasi pariwisata, sehingga dapat dijadikan prioritas perbaikan untuk mendukung pembangunan destinasi wisata ke depan dengan berbasis QT.



Ubud, Bali

Taman Nasional Tanjung Puting,  
Kalimantan Tengah





# **Bab 5** Bersinergi Membangkitkan Pariwisata Nasional

# 5

## Bersinergi

# Membangkitkan

# Pariwisata Nasional

**Sinergi dan kolaborasi yang kuat telah terbukti sebagai elemen yang sangat penting dalam menopang kinerja pariwisata nasional dapat melewati krisis pandemi COVID-19.**

Berbagai upaya kebijakan dan program pemulihan yang digulirkan pemerintah, bersinergi dengan Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya berdampak positif pada pemulihan pariwisata. Upaya ini juga disertai langkah-langkah stimulus untuk menopang daya dukung pelaku usaha pariwisata dapat menghadapi tekanan berat di masa pandemi. Hal tersebut disertai konsistensi dalam pengembangan destinasi di tengah pandemi pada akhirnya berkontribusi besar pada daya saing pariwisata nasional yang justru semakin baik sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, termasuk dinobatkannya pariwisata nasional sebagai salah satu destinasi ramah muslim terbaik secara global.

**Momentum pemulihan pariwisata semakin kuat pada 2022 seiring pembukaan pariwisata yang lebih luas dan kondisi pandemi yang jauh membaik.** Dinamika perkembangan terkini mengindikasikan jumlah

kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) diperkirakan dapat melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya pada kisaran 1,8-3,6 juta orang. Prospek ini juga didukung *global travel demand* yang terus membaik dengan pembukaan akses perjalanan (*border policy*) di berbagai negara. Perkembangan positif ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap membaiknya penerimaan devisa pariwisata nasional. Mobilitas masyarakat yang terus meningkat, didukung pelonggaran restriksi perjalanan domestik, disertai meningkatnya penyelenggaraan *event dan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE)*, baik skala nasional maupun internasional memberi peluang yang lebih besar untuk akselerasi kinerja pariwisata ke depan.



Candi Prambanan, Yogyakarta

**Kendati demikian, perkembangan terkini juga menunjukkan dinamika tantangan global yang semakin kompleks.** Mengemukanya risiko stagflasi dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang tidak sebaik prakiraan sebelumnya, disertai resesi di sejumlah negara akan dapat memengaruhi perbaikan mobilitas global yang tengah berlangsung. Terlebih, kenaikan tekanan inflasi global khususnya untuk energi yang diikuti tingginya biaya transportasi. Kondisi ini juga terjadi ditengah masih berlangsungnya proses penyesuaian kapasitas angkutan udara dalam merespons kenaikan permintaan, setelah sebelumnya mengalami tekanan cukup berat di masa pandemi. Menghadapi kondisi global yang belum menguntungkan tersebut dan dapat berisiko pada tertahannya wisatawan mancanegara, maka upaya untuk mendorong potensi pergerakan wisatawan domestik yang lebih tinggi menjadi semakin penting.

---

*Menghadapi kondisi global yang semakin kompleks, upaya untuk mendorong pergerakan wisatawan domestik yang lebih tinggi menjadi semakin penting*

---

Pemerintah terus berfokus untuk meningkatkan sinergi dalam mewujudkan target pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) berjalan dengan baik. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pengembangan DPSP ini diarahkan untuk memperkuat daya saing pariwisata nasional sehingga dapat bangkit lebih kuat. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan pada forum strategis yang secara khusus diselenggarakan secara periodik dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, baik pusat maupun daerah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait lainnya. Pada forum Rapat Koordinasi Nasional 15 Juli 2022 disepakati seluruh proyek pengembangan DPSP, termasuk infrastruktur aksesibilitas dan amenitas pendukung, akan rampung pada 2024 dengan didukung tambahan alokasi anggaran hingga sekitar Rp18,9 triliun.<sup>18</sup> Pemerintah terus berkolaborasi untuk menyiapkan kalender event untuk meningkatkan atraksi, sehingga mendorong aktivitas pariwisata di DPSP. Selain itu, beberapa DPSP yang telah memiliki event internasional reguler seperti MotoGP di Mandalika akan terus dikembangkan, termasuk mempersiapkan Danau Toba menyelenggarakan event F1 H2O pada awal tahun 2023 mendatang. Ke depan, kalender event pengembangan DPSP akan terus diperkuat untuk dapat menarik wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Sinergi kebijakan menjadi elemen penting untuk memastikan terus berjalannya proses pemulihan pariwisata untuk dapat tumbuh lebih kuat ke depan. Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Pariwisata (Sekber Pariwisata) yang telah terbentuk sejak 2019, menjadi salah satu forum strategis lintas Kementerian/Lembaga dan otoritas terkait, bersama dengan Bank Indonesia, untuk memperkuat sinergi kebijakan yang diperlukan untuk mengakselerasi pemulihan dan pengembangan pariwisata nasional<sup>19</sup>. Berdasarkan berbagai asesmen yang dilakukan oleh Sekber Pariwisata dan memerhatikan dinamika perkembangan terkini, setidaknya terdapat sepuluh langkah strategis yang perlu ditempuh bersama untuk mendorong akselerasi pemulihan pariwisata ditengah dinamika ketidakpastian global yang masih tinggi<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Sekber Pariwisata dibentuk berdasarkan Nota Kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia, Menko Maritim, dan Menteri Pariwisata pada 18 Maret 2019

<sup>20</sup> Berdasarkan kesimpulan dan kesepakatan Rapat Koordinasi High Level Sekber Pariwisata pada 3 Oktober 2022.

---

<sup>18</sup> Konferensi Pers Rakornas Pengembangan DPSP 15 Juli 2022 yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan dihadiri pimpinan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan otoritas terkait.



5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)

**Pertama**, melanjutkan dan mengoptimalkan pelonggaran akses wisatawan wisman dan wisatawan nusantara (wisnus), termasuk disertai dengan upaya untuk menyempurnakan regulasi terkait visa. Hal ini juga mempertimbangkan perlunya memanfaatkan perubahan preferensi *travel demand* masyarakat global sebagai dampak dari proses adaptasi terhadap situasi pandemi, seperti mengemukanya tren *'workcation'* dan *digital nomad*. Di samping itu, penyempurnaan skema visa perlu diarahkan untuk lebih mengedepankan asas manfaat dan resiprokal.

**Kedua**, mendorong percepatan perbaikan kapasitas dan frekuensi angkutan udara, khususnya untuk menunjang mobilitas ke destinasi wisata, sejalan dengan permintaan yang meningkat. Upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas dan frekuensi angkutan udara ini menjadi salah satu kunci yang akan menunjang pergerakan mobilitas masyarakat antar destinasi wisata. Terlebih dengan karakteristik geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Dukungan stimulus pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan untuk dapat memperluas rute penerbangan domestik.

**Ketiga**, mempercepat pengembangan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP). Upaya ini diperlukan sebagai langkah *quick wins* untuk memperkuat pariwisata nasional ke depan. Pengembangan DPSP ini juga didukung penguatan akses, atraksi, dan amenitas, termasuk sarana hunian pariwisata (*homestay*). Pengembangan DPSP diarahkan untuk dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip pariwisata berkelanjutan (*quality tourism*).

**Keempat**, pengembangan DPSP juga disertai upaya untuk memastikan berlanjutnya pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan destinasi pariwisata lainnya. Hal ini didukung alokasi anggaran yang memadai, termasuk dukungan dari pemerintah daerah, serta memastikan adanya pengaturan terkait pengelolannya secara optimal.

**Kelima**, memastikan terselenggaranya event skala internasional dan nasional yang telah terjadwal, termasuk agenda *Kharisma Event Nusantara* (KEN) 2022 dan rangkaian kegiatan pendukung ketetuaan ASEAN pada 2023.

**Keenam**, meningkatkan sinergi dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan *Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions* (MICE), antara lain melalui fasilitasi *bidding* MICE oleh pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, bersama dengan asosiasi pelaku usaha MICE dan asosiasi profesi.

**Ketujuh**, melanjutkan dukungan insentif dan peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dan desa wisata, termasuk melalui dukungan kebijakan makroprudensial untuk sektor prioritas.

**Kedelapan**, mendorong sinergi program dalam pengembangan UMKM pendukung pariwisata dan desa wisata, termasuk memperluas digitalisasi transaksi pembayaran antara lain melalui QRIS dan memanfaatkan potensi dari QRIS antarnegara.

**Kesembilan**, mendorong promosi pembukaan pariwisata Indonesia yang lebih luas melalui rangkaian kegiatan *Bangga Berwisata Indonesia* (BBWI) 2023. Dalam konteks ini, Bank Indonesia melalui seluruh jaringan kantor perwakilan akan turut mendukung kegiatan promosi terkait pariwisata dalam kerangka *investor relation unit*, di daerah dan di luar negeri.

**Terakhir**, sebagai prasyarat untuk memastikan aktivitas pariwisata yang aman, maka akselerasi vaksinasi perlu terus dilakukan termasuk di destinasi pariwisata. Di samping itu, penerapan *cleanliness, healthy, safety, and environmental sustainability* (CHSE) berstandar SNI perlu terus diperluas untuk meningkatkan keyakinan (*confidence*) wisatawan terhadap aktivitas pariwisata yang aman.



**Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah** dalam upaya meningkatkan peran terkait pariwisata-ekraf, antara lain melalui penguatan advokasi dan kajian, pengembangan UMKM, digitalisasi sistem pembayaran pendukung pariwisata, serta melalui kebijakan makroprudensial akomodatif mendorong pembiayaan sektor prioritas termasuk pariwisata.

Dengan berbagai dukungan kebijakan dan komitmen sinergi yang kuat antara Pemerintah, Bank Indonesia, otoritas terkait, dan asosiasi/pelaku pariwisata, akan mendukung optimisme pemulihan pariwisata yang lebih cepat, untuk bangkit lebih kuat mendukung perekonomian nasional.





*Tegalalang, Gianyar, Bali*

# Daftar Pustaka

- Brown, T. A. (2015). *Confirmatory factor analysis for applied research*. Guilford publications.
- Calderwood, L. U., & Soshkin, M. (2019). *The travel and tourism competitiveness report 2019*. *World business research*, 44(3), 137-152.
- Cracolici, M. F., Nijkamp, P., & Rietveld, P. (2008). *Assessment of tourism competitiveness by analysing destination efficiency*. *Tourism economics*, 14(2), 325-342.
- Crescent. (2022). *Global Muslim Travel Index*. June, 31–62.
- Crouch, G. I., & Ritchie, J. B. (1999). *Tourism, competitiveness, and societal prosperity*. *Journal of business research*, 44(3), 137-152.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2022). *Siaran Pers & Berita*. Direktorat Jenderal Imigrasi - Kementerian Hukum dan HAM RI. Diakses pada 7 Oktober 2022, dari <https://www.imigrasi.go.id/id/siaran-pers-dan-berita/>
- FEB UB. (2022) . *Pariwisata: Kapan Bangkit?*. Diakses pada 10 Oktober 2022, dari <https://feb.ub.ac.id/id/pariwisata-kapan-bangkit.html>.
- Holloway, C., Humphreys, C., & Davidson, R. (2009). *The business of tourism*. Essex.
- IATA Economics. (2022). *Media Briefing: Update on The Air Transport Outlook*. Montreal: IATA.
- li, B. A. B., Pariwisata, P., Nusa, H., & Barat, T. (2016). *Global Muslim Travel Index* . June, 31–62.
- International Labour Organisation. (2022). *The future of work in the tourism sector: Sustainable and safe recovery and decent work in the context of the COVID-19 pandemic*.
- Kemenkominfo. (2022). *Pemerintah Dorong Optimalisasi Pertumbuhan Industri Kreatif Indonesia*. Diakses pada 10 Oktober 2022, dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39347/pemerintah-dorong-optimalisasi-pertumbuhan-industri-kreatif-indonesia/0/berita>.
- Kemendparekraf. (2020). *Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia*.

- Kementerian Dalam Negeri. (2021). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). Siaran Pers HM.4.6/37/SET.M.EKON.3/03/2021 “Industri Kreatif dan Digital: Kembangkan Potensi, Gerakkan Ekonomi, dan Ciptakan Lapangan Kerja.”
- Kementerian PPN/ Bappenas. (2022). Focus Group Discussion “Kebijakan dan Dukungan dalam Mendorong Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Termasuk Penguatan 5 DPSP.”
- MarkPlus. (2020). *Whitepaper on Quality Tourism: Post Crisis: Indonesia toward Quality Tourism Strategies, Tactics, Policies*. MarkPlus.
- Masruroh. (2021). Strategi Penguatan Karakter Bangsa. Diakses pada 6 Oktober 2022, dari <http://repository.stipram.ac.id/273/1/e-book>. Danang Prasetyo. Strategi Penguatan Karakter Bangsa.pdf
- Mathieu, E., Ritchie, H., Rodés-Guirao, L., Appel, C., Giattino, C., Hasell, J., Roser, M. (2022). *Coronavirus Pandemic (COVID-19): Policy Responses*. Diakses pada 5 Oktober 2022, dari <https://ourworldindata.org/policy-responses-covid>
- OECD. (2020). *OECD Tourism Trends and Policies 2020*.
- Pemerintah Daerah Jawa Barat. (2022). Jabar CONNECTI: CITY 2022 Hidupkan Semangat Dasasila Bandung. Diakses pada 9 Oktober 2022, dari <https://jabarprov.go.id/berita/jabar-connecti-city-2022-hidupkan-semangat-dasasila-bandung-28>.
- Perdue, R. R., Long, P. T., & Yang, Y. S. (1999). Boomtown tourism and resident quality of life—A Colorado case study. *Journal of Business Research*, 44(3), 165-177.
- Ramadhian, N., & Prasetya, A. W. (2021, October). Bali Sambut Kembali Turis Asing Mulai 14 Oktober 2021. Diakses pada 5 Oktober 2022, dari <https://travel.kompas.com/read/2021/10/04/173900427/bali-sambut-kembali-turis-asing-mulai-14-oktober-2021?page=all>
- Rasbin. (2022). Dampak Ekonomi Dari Pergelaran Motogp Mandalika 2022: Jangka Pendek Dan Jangka Panjang. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2022). Peta Sebaran Kasus COVID-19. Diakses pada 8 Oktober 2022, dari <https://covid19.go.id/id/peta-sebaran>.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2022). Regulasi. Penanganan COVID-19 di Indonesia. Diakses pada 6 Oktober 2022, dari <https://covid19.go.id/id/p/regulasi>.
- Simangunsong, W. S., & Prasetya, A. W. (2022). Uji Coba Travel Bubble Indonesia-Singapura Dimulai 24 Januari 2022. Diakses pada 9 Oktober 2022, dari <https://travel.kompas.com/read/2022/01/22/203100927/uji-coba-travel-bubble-indonesia-singapura-dimulai-24-januari-2022>
- Theng, S., Qiong, X., & Tatar, C. (2015). *Mass tourism vs alternative tourism? challenges and new positionings*. *Études caribéennes*, (31-32).
- UNWTO. (2013). *Sustainable tourism for development guidebook*. World Tourism Organization, European Commission. Madrid.
- UNWTO. (2017). *Practical Guidelines for Integrated Quality Management in Tourism Destinations—Concepts, Implementation and Tools for Destination Management Organizations*.
- World Economic Forum. (2022). *Travel & Tourism Development Index 2021: Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future*.

# Daftar Istilah

<b>Aksesibilitas</b>	Suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain, dan kemudahan lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi.
<b>Amenitas</b>	Segala fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di destinasi, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum.
<b>Arrival Test</b>	Tes atau konfirmasi kondisi kesehatan terhadap pengunjung yang baru saja mendarat di sebuah negara untuk meminimalisasi risiko penyebaran penyakit.
<b>Atraksi</b>	Sesuatu yang menjadi daya tarik di suatu destinasi dan dipersembahkan untuk menarik minat wisatawan.
<b>Bebas Visa Kunjungan</b>	Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada orang asing dengan warga negara tertentu dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan tujuan memberikan kemudahan masuk dan keluar wilayah Indonesia.
<b>Content Creator</b>	Sebutan untuk seseorang yang memproduksi konten baik tulisan, gambar, video, suara, maupun gabungan dari materi tersebut dan dimuat di <i>platform</i> digital seperti Youtube, media sosial, dll.
<b>COVID-19</b>	Penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 dan dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia.
<b>Desain Komunikasi Visual</b>	Cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik, dan media dengan memanfaatkan konsep-konsep visual untuk menyampaikan pesan dengan tujuan tertentu.
<b>Devisa</b>	Aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional
<b>Domestik</b>	Berhubungan dengan atau mengenai permasalahan dalam negeri.

<b>Ekonomi Kreatif</b>	Kegiatan ekonomi yang didasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu guna menciptakan daya kreasi serta daya cipta yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.
<b>Ekowisata</b>	Kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan.
<b>Giro Wajib Minimum</b>	Dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia.
<b>Heritage tourism</b>	Sebuah perjalanan yang dikemas dengan mengunjungi tempat yang dianggap mempunyai sejarah yang penting bagi sebuah daerah atau kota yang dapat menjadi daya tarik wisata.
<b>Homestay</b>	Rumah tinggal yang sebagian kamarnya disewakan kepada tamu dalam jangka waktu tertentu untuk mempelajari budaya setempat atau suatu rutinitas tertentu.
<b>Hybrid</b>	Konsep acara atau kegiatan yang menggunakan lebih dari satu media dengan menggabungkan pertemuan dalam jaringan ( <i>online</i> ) dan luar jaringan ( <i>offline</i> ).
<b>Inflasi</b>	Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
<b>Influencer</b>	Seseorang yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan orang lain karena memiliki otoritas, pengetahuan, posisi, ataupun karena hubungannya dengan publik atau audiens.
<b>Inklusif</b>	Penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah.
<b>Jaringan Pariwisata Hub (JP Hub)</b>	<i>Platform digital</i> pariwisata yang merupakan inisiasi dari pemerintah sebagai jendela utama informasi destinasi pariwisata nusantara.
<b>Kharisma Event Nusantara</b>	Sekumpulan <i>event</i> berkualitas dari seluruh Indonesia yang dikurasi Kemenparekraf bersama Pemerintah Daerah dan seluruh <i>stakeholder</i> pariwisata untuk menaikkan citra pariwisata Indonesia dan penggerak kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
<b>Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<b>Length of Stay</b>	Lama tinggal wisatawan di suatu kawasan wisata.
<b>Neraca Transaksi Berjalan</b>	Indikator yang mengukur penerimaan dan pengeluaran suatu negara yang berasal dari transaksi barang dan jasa ( <i>goods and services</i> ), pendapatan ( <i>income</i> ), dan transfer berjalan ( <i>current transfer</i> ) dengan bukan penduduk.
<b>Newskilling</b>	Program pelatihan yang ditujukan untuk memberikan keterampilan baru agar pegawai/pekerja tetap relevan dengan tuntutan perkembangan dunia kerja.
<b>Non-Leisure Resources</b>	Sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara untuk mendorong kunjungan terkait bisnis ataupun kunjungan lainnya selain untuk tujuan berwisata.
<b>Onboarding homestay</b>	Proses pengintegrasian <i>homestay</i> ke dalam <i>platform</i> promosi/penjualan digital.
<b>Onboarding UMKM</b>	Proses pengintegrasian UMKM ke dalam <i>platform</i> promosi/penjualan digital.
<b>PeduliLindungi</b>	Aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19.
<b>Quality Tourism</b>	Konsep pariwisata yang mengedepankan produk dan layanan wisata yang memiliki dampak positif pada keberlanjutan lingkungan, aspek sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat sekitar.
<b>Rantai Pasok</b>	Sistem rangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan dan pengendalian yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa dari suatu pemasok kepada pelanggan.
<b>Reskilling</b>	Program pelatihan yang ditujukan untuk memberikan keterampilan baru agar dapat bekerja di divisi/bagian lain.
<b>Side Events</b>	Program-program tambahan yang sejalan dan terkait dengan isu-isu yang dibahas pada pertemuan G20.
<b>Stagflasi</b>	Kondisi ekonomi yang ditandai dengan tingginya tingkat inflasi di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang tinggi.
<b>Surat Berharga Negara (SBN)</b>	Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran negara.

<b>Sustainability</b>	Kemampuan atau daya tahan suatu sistem atau proses untuk dapat terus berlangsung dalam waktu yang lama.
<b>Sustainable Tourism</b>	Konsep pariwisata yang dapat memberikan dampak positif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, baik terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi masyarakat sekitar.
<b>Travel Bubble</b>	Sistem koridor perjalanan yang bertujuan untuk membagi peserta ke dalam kelompok ( <i>bubble</i> ) yang berbeda, dengan memisahkan peserta yang memiliki risiko terpapar COVID-19.
<b>Upskilling</b>	Program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan memperdalam pengetahuan dalam bidang keahlian.
<b>Workcation</b>	Aktivitas mengunjungi destinasi tertentu untuk berwisata sekaligus bekerja.
<b>Vaccinated Travel Lanes (VTL)</b>	Konsep pariwisata yang mensyaratkan wisatawan telah memperoleh dosis lengkap vaksin untuk mengakses suatu destinasi yang telah ditentukan.
<b>Varian Delta</b>	Salah satu varian virus corona hasil mutasi (B.1.617.2) yang bersifat lebih cepat menular dibandingkan jenis lainnya dengan gejala ringan hingga berat.
<b>Varian Omicron</b>	Salah satu varian virus corona hasil mutasi (B.1.1.529) yang dilaporkan pertama kali di Afrika Selatan dan bersifat cepat menular namun dengan gejala lebih ringan atau cenderung tidak bergejala.
<b>Visa On Arrival</b>	Dokumen izin masuk dengan jangka waktu 30 hari yang diberikan kepada orang asing dengan warga negara tertentu saat tiba di Indonesia, yang ditujukan untuk meningkatkan kemudahan dalam berkunjung ke Indonesia.
<b>Volunteerism</b>	Kegiatan meluangkan waktu, tenaga, maupun dana pribadi secara sukarela untuk membantu sesama demi kesejahteraan sosial.
<b>Webinar</b>	Kegiatan seminar yang dilakukan secara daring atau menggunakan situs internet.
<b>Wisata Bahari</b>	Segala jenis kegiatan wisata atau rekreasi yang menggunakan atau memanfaatkan potensi lingkungan bentang pantai ( <i>coastal landscape</i> ) dan bentang laut ( <i>seascape</i> ) sebagai daya tarik utama.
<b>Wisata Petualangan</b>	Jenis pariwisata yang memiliki risiko tertentu, seperti mendaki gunung, arung jeram, susur gua, dan menyelam.

# Daftar Singkatan

Singkatan	Kepanjangan
<b>ASEAN</b>	Association Of Southeast Asian Nations
<b>BBWI</b>	Bangga Berwisata Di Indonesia
<b>BPJS</b>	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
<b>BPS</b>	Badan Pusat Statistik
<b>BUMN</b>	Badan Usaha Milik Negara
<b>BVK</b>	Bebas Visa Kunjungan
<b>CHSE</b>	Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability
<b>COVID-19</b>	Coronavirus Disease-2019
<b>DIY</b>	Daerah Istimewa Yogyakarta
<b>DPP</b>	Destinasi Pariwisata Prioritas
<b>DPSP</b>	Destinasi Pariwisata Super Prioritas
<b>F1H20</b>	Formula One Powerboat World Championship
<b>G20</b>	Group of Twenty
<b>GMTI</b>	Global Muslim Travel Index
<b>GSTC</b>	Global Sustainable Tourism Council
<b>GWM</b>	Giro Wajib Minimum
<b>JP Hub</b>	Jaringan Pariwisata Hub
<b>KEN</b>	Kharisma Event Nusantara
<b>LPS</b>	Lembaga Penjamin Simpanan
<b>LSUP</b>	Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata
<b>LU</b>	Lapangan Usaha
<b>MICE</b>	Meeting, Incentive, Convention, Dan Exhibition
<b>MPD</b>	Mobile Positioning Data
<b>MRO</b>	Maintenance, Repair, And Overhaul
<b>OJK</b>	Otoritas Jasa Keuangan
<b>OTA</b>	Online Travel Agent

<b>Singkatan</b>	<b>Kepanjangan</b>
PCR	Polimerase Chain Reaction
PDB	Produk Domestik Bruto
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
QRIS	Quick Response Indonesia Standard
QT	Quality Tourism
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SBN	Surat Berharga Negara
SDM	Sumber Daya Manusia
STC	Sustainable Tourism Certification
Stdev	Sustainable Tourism Development
STI	Sustainable Tourism Industry
STM	Sustainable Tourism Marketing
STO	Sustainable Tourism Observatory
TTDI	Travel Tourism Development Index
UEA	Uni Emirat Arab
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNWTO	United Nation World Tourism Organization
VoA	Visa On Arrivals
VTL	Vaccinated Travel Lanes
WEF	World Economic Forum
WFB	Work From Bali
WFH	Work From Home
WFO	Work From Office
WISMAN	Wisatawan Mancanegara
WISNUS	Wisatawan Nusantara

*Halaman ini sengaja dikosongkan*







**BANK INDONESIA**  
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



**SekberParwisata**